



Muhamad Fajar Pramono



Sosiologi Agama

Dalam Konteks Indonesia

**SOSIOLOGI AGAMA
DALAM KONTEKS INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

SOSIOLOGI AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA

Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si



SOSIOLOGI AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA

Penulis:

Muhamad Fajar Pramono

ISBN : 978-602-60033-8-6

Editor:

Syamsul Hadi Untung

Layouter:

Moh. Ismail

Desain Sampul:

Sam'un Salim

Penerbit:

UNIDA GONTOR PRESS

Redaksi:

Lembaga Penerbitan Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Telp. : +62 352 3574562

Fax. : +62 352 488182

Email : press@unida.gontor.ac.id

Cetakan Pertama, Mei 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

SAMBUTAN KEPALA LPPM UNIDA GONTOR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP DIKTI) pada Pasal 5, standar kompetensi lulusan adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pengetahuan yang dimaksud terkait dengan penguasaan konsep, teori, metode dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu. Ketersediaan bahan ajar merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan penguasaan konsep dan teori tersebut.

Bahan ajar adalah materi perkuliahan yang disusun secara sistematis yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Buku yang berisi bahan ajar umumnya ditulis sebagai buku ajar, yang berfungsi untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan. Adanya bahan ajar tertulis, menjadikan dosen tidak perlu terlalu banyak menyajikan materi di kelas. Dosen akan lebih punya waktu untuk memberikan

bimbingan kepada mahasiswa.

Sedangkan bagi mahasiswa, buku ajar dapat meningkatkan kegembiraannya (karena tidak terus menerus mendengar ceramah dosennya, dan dapat belajar aktif mandiri melalui membaca) dan mampu memperkaya informasi yang diterimanya. Buku ajar berbeda dengan buku teks. Perbedaannya tidak hanya pada format, tataletak dan perwajahan, tetapi terutama pada orientasi dan pendekatan yang dipakai dalam penyusunannya.

Maka atas dasar itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Unida Gontor mengapresiasi dengan terbitnya buku ajar yang berjudul *Sosiologi Agama dalam Konteks Indonesia*. Semoga tidak hanya memberi manfaat kepada penulisnya saja, tetapi juga untuk menambah gairah dalam membangun iklim akademik baik untuk Program Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan juga membangun iklim akademik di lingkungan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.

Akhirnya kita berharap karya penulis menjadi amal jariyahnya. Dan semoga kebaikan, keberkahan dan keutamaan senantiasa mengiringi hidup dan kehidupan kita semua.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 19 April 2017



Dr. Muh Fajar Pramono, M.Si

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan penghargaan yang setulus-tulusnya, baik secara pribadi maupun sebagai Dekan Fakultas Ushuludin kepada penulis (Dr. Muh Fajar Pramono, M.Si) yang telah menyusun dan menerbitkan buku ajar dengan judul *Sosiologi Agama dalam Konteks Indonesia*. Semoga karya ini sebagai awal yang baik dan bisa membangun tradisi akademik khususnya di Fakultas Ushuluddin dan umumnya di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.

Kita berharap buku ini memberi beberapa manfaat: 1) membantu peserta didik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku; 2) menjadi pegangan dosen dalam menentukan metode pengajaran; 3) memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari materi yang baru; 4) Memberikan pengetahuan bagi

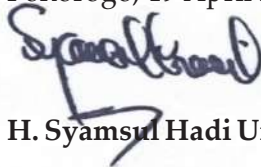
peserta didik maupun pendidik; 5) Menjadi penambah nilai angka kredit untuk mempermudah kenaikan pangkat dan golongan bagi dosen;

Kita berharap buku ini sebagai momentum penguatan bahwa Ushuluddin adalah nyawa bagi *Islamic-studies* di Indonesia. Dalam aspek “ekspektasi sosial”, Ushuluddin adalah harapan bagi lahirnya para intelektual muslim yang tinggi ilmunya, kokoh mentalitasnya, matang kepribadiannya, luas kosmos spiritualitasnya, lentur jiwanya, dewasa kehidupannya. Para sarjana Ushuluddin adalah para agen perubahan sosial dengan visi keislaman, dengan misi “rahmatan lil ‘alamin”, dalam kapasitas dirinya sebagai abdullah dan khalifatullah, melalui jalur kecermatan dalam membaca, kedalaman dalam refleksi, serta ketulusan dalam mencari solusi dan mengabdikan.

Sekali lagi kita berharap dengan terbitnya buku ini dengan keridloan dan inayah-Nya, buku ini bisa memberikan pembelajaran dan pencerahan bagi dunia akademik dan masyarakat yang senantiasa dinamis. Semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 19 April 2017



H. Syamsul Hadi Untung, M.A, M.Ls.

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang dikaruniakan-Nya tak terhitung banyaknya kepada penulis sampai buku yang berjudul, "**Sosiologi Agama Dalam Konteks Indonesia**", bisa diselesaikan, yang diharapkan sebagai buku pendamping mata kuliah **Sosiologi Agama**.

Secara umum kajian dalam buku ini mencakup konsep-konsep dasar sosiologi umum, sosiologi agama dan sosiologi Islam serta pengaruh dan kontribusinya di Indonesia. Ada beberapa pokok pembahasan yang diuraikan dalam buku ini, tentunya dengan berbagai pendalaman dan pengayaan penulis sebagai dosen sosiologi agama sejak 1997 (tepatnya sembilan belas tahun yang lalu) dan sebagai pemerhati sosial, baik terkait dengan isu-isu sosiologi agama, yaitu:

1. Pengertian dan ruang lingkup
2. Sejarah dan perkembangan
3. Tokoh-tokoh dan teori yang dikembangkan
4. Isu-isu atau studi kasus fenomena sosiologi agama
5. Pengaruh dan kontribusinya di Indonesia

Setelah membaca dan mempelajari buku ini diharapkan: 1) Mahasiswa mampu mengkaitkan konsep-

konsep dasar sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis fenomena sosial dan agama dengan menggunakan perspektif sosiologi Agama. 2) Supaya mahasiswa mampu melakukan diagnosis/identifikasi/pemetaan persoalan terhadap kondisi masyarakat dengan menggunakan perspektif sosiologi Agama. 3) Secara praktis mahasiswa mampu menyusun makalah terkait dengan isu-isu sosiologi agama kontemporer, khususnya di Indonesia.

Sebagai suatu karya tulis tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan, terkait validasi data maupun dari sisi teknis penulisan. Maka dengan ini diharapkan input dan kritik dari pembaca dalam rangka penyempurnaan tulisan ini ke depan.

Penulis berharap buku ini bisa membantu dan mempermudah mahasiswa dalam studi sosiologi agama, sebagai tambahan atau alternatif buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh dan tentunya memudahkan dosen dalam melaksanakan pembelajaran.

Ponorogo, 19 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala LPPM Unida Gontor.....	v
Sambutan Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor	vii
Pengantar Penulis.....	ix
Daftar Isi.....	xi

BAB 1

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Sosiologi Agama.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Sosiologi Konteks Indonesia	6
1.4 Diskusi.....	9

BAB 2

SEKILAS SOSIOLOGI UMUM	11
2.1 Pengertian Sosiologi	11
2.2 Bidang Kajian Sosiologi	14
2.3 Lahirnya Sosiologi.....	16
2.4 Sosiologi Sebagai Ilmu	18

BAB 3

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SOSIOLOGI

AGAMA	21
3.1 Sejarah Perkembangan	21
3.2 Sosiologi Gereja di Eropa.....	25
3.3 Sosiologi Gereja di Amerika Serikat.....	26
3.4 Sosiologi Agama di Indonesia.....	27
3.5 Diskusi	30

BAB 4

PENDIRI SOSIOLOGI AGAMA: EMILE

DURKHEIM DAN MAX WEBER

4.1 Emile Durkheim (1858-1917).....	33
4.1.1 Biografi Singkat.....	33
4.1.2 Pokok-Pokok Pemikiran Durkheim	35
4.2 Max Weber (1864-1920)	53
4.2.1 Biografi Singkat.....	53
4.2.2 Pokok-Pokok Pemikiran	54
4.3 Diskusi	61

BAB 5

TOKOH-TOKOH LAIN SOSIOLOGI AGAMA

5.1 <i>Edward B. Tylor</i> (1832-1917)	63
5.1.1 Kajian Budaya	64
5.1.2 Kajian Evolucionisme.....	66
5.1.3 Asal-Usul Agama.....	69
5.2 Herbert Spencer	75
5.2.1 Sekilas Biografi (27 April 1820-8 Desember 1903)	75
5.2.2 Pokok-Pokok Pemikiran	77
5.2.3 Kesimpulan.....	81

5.3 Friedrich Max Müller (6 Desember 1823-28 Oktober 1900)	82
5.3.1 Sekilas Biografi.....	82
5.3.2 Pokok-Pokok Pemikiran	83
5.4 James G. Frazer dan Teori Batas Akal (1854-1941)	86
5.5 Diskusi	90

BAB 6

SOSIOLOGI DI DUNIA ISLAM	91
6.1 Ibnu Khaldun (1332-1408)	92
6.1.2 Pokok-Pokok Pemikiran	96
6.2 Ali Syariati dan Sosialisme Islam (1933-1977)	99
6.2.1 Sekilas Biografi.....	99
6.2.2 Pokok-Pokok Pemikiran	102
6.3 Ilmu Sosial Profetik (ISP).....	105
6.3.1 Tokoh-Tokoh ISP	105
6.3.2 Gagasan Utamanya.....	108
6.4 HOS Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme (16 Agustus 1882-17 Desember 1934).....	109
6.4.1 Sekilas Biografi.....	109
6.4.2 Islam dan Sosialisme	114
6.5 Diskusi	119

BAB 7

POSISI AGAMA DALAM TINJAUAN

SOSIOLOGIS	121
7.1 Agama dalam Tinjauan Teori Fungsional.....	121
7.1.1 Teori Fungsional	121
7.1.2 Agama Bentuk Asosiasi Manusia yang Paling Mungkin Bertahan.....	123
7.2 Posisi Agama dalam Tinjauan Teori Konflik	127

7.2.1 Teori Konflik.....	127
7.2.2 Agama Sebagai Penyebab Dis-integrasi.....	135
7.3 Diskusi	142

BAB 8

ISU-ISU SOSIOLOGI AGAMA.....	143
8.1 Jaringan Islam Liberal (JIL)	145
8.2 Sekulerisme.....	146
8.3 Pluralisme	150
8.4 Terorisme	155
8.5 Radikalisme Agama.....	160
8.6 Diskusi	165

BAB 9

STUDI KASUS	167
9.1 Terorisme, Radikalisme dan Komunisme Dalam Tinjauan Sosiologis.....	167
9.1.1 Kerangka Berpikir	168
9.1.2 Studi Kasus Indonesia	172
9.1.3 Diskusi.....	175
9.2 Politik Pondok Modern Gontor.....	175
9.2.1 Kerangka Pemikiran.....	176
9.2.2 Legitimasi Politik.....	176
9.2.3 Diskusi.....	179
9.3 Politik <i>Golek Bolo</i>	179
9.3.1 Kerangka Pemikiran.....	180
9.3.2 Ketidak-jelasan Posisi Masyarakat dalam Proses Politik	181
9.3.3 Diskusi.....	183
9.4 Paguyuban Kepala Desa, Warok dan Keluarga Besar Pondok Modern Gontor	183

9.4.1	Kerangka Pemikiran.....	183
9.4.2	PMG Mempunyai Asset Besar	184
9.4.3	Diskusi.....	187
9.5	Merasionalisasikan Sistem Pemerintahan Desa: In Memoriam Mbah Jolego dan Pergolakan Kades.	188
9.5.1	Kerangka Pemikiran.....	188
9.5.2	Prinsip “ <i>Mikul Dhuwur, Mendhem Jero</i> ”	190
9.5.3	Diskusi.....	191
9.6	Mbah Wo Kucing - (In Memoriam-Tokoh Reyog Ponorogo).....	192
9.6.1	Kerangka Pemikiran.....	192
9.6.2	Simbol Sisa Kekuatan Kultural Orde Baru	194
9.6.3	Diskusi.....	196
9.7	‘Grebeg Suro’ Telah Keluar Dari Khitohnya?	197
9.7.1	Ki Demang Suryongalam	198
9.7.2	Misi Raden Batoro Katong	199
9.8	NU dan Pemberdayaan Potensi Lokal	201
9.8.1	Kondisi Pembangunan.....	203
9.8.2	Peranan dan Kontribusi NU	204
9.8.3	Diskusi.....	207
9.9	Pasang Surut Hubungan Muhammadiyah (PDM) dan Pemkab Ponorogo-Suatu Tinjauan Analisis.	207
9.9.1	Kontribusi dalam Pembangunan	207
9.9.2	Pola Hubungan Sinergis	209
9.9.3	Diskusi.....	210
9.10	Membedah Sisi Linguistik Kalimat Ahok Soal Al-Maidah 51	211
9.10.1	Kerangka Pemikiran.....	211
9.10.2	Kajian Brili Agung	212
9.10.3	Diskusi	214

9.11 Ketidakadilan dan Kemiskinan Picu	
Radikalisme	215
9.11.1 Kerangka Pemikiran.....	216
9.11.2 Kontraversi Picu Radikalisme	216
9.11.3 Diskusi	219
9.12 <i>The Highest Result of Tolerance Is Respect and Social Relations</i> (Catatan untuk Ahok)	219
9.12.1 Kerangka Pemikiran.....	220
9.12.2 Catatan untuk Pak Ahok	221
9.12.3 Diskusi	222
DAFTAR PUSTAKA	223

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Sosiologi Agama

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu *Socius* yang berarti kawan, sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul “*Cours De Philosophie Positive*” karangan August Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.

Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di kontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan

bersama, dan memiliki budaya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, sosial.

Sedangkan sosiologi agama mempelajari peran agama di dalam masyarakat; praktik, latar sejarah, perkembangan dan tema universal suatu agama di dalam masyarakat. Ada penekanan tertentu di dalam peran agama di seluruh masyarakat dan sepanjang sejarah. Sosiologi agama berbeda dari filsafat agama karena tidak menilai kebenaran kepercayaan agama, meski proses membandingkan dogma yang saling bertentangan membutuhkan apa yang disebut Peter L. Berger sebagai “ateisme metodologis” yang melekat. Sementara sosiologi agama berbeda dengan teologi dalam mengasumsikan ketidak-absahan supernatural, para teoritis cenderung mengakui reifikasi sosial budaya dalam praktik keagamaan.

Sosiologi akademik modern *dimulai* dengan analisis agama dalam studi tingkat bunuh diri Durkheim tahun 1897 di antara penduduk Katolik dan Protestan, sebuah karya mendasar dari penelitian sosial yang ditujukan untuk membedakan sosiologi dari ilmu disiplin lain seperti psikologi. Karya Karl Marx dan Max Weber menekankan hubungan antara agama dan ekonomi atau struktur sosial masyarakat. Perdebatan kontemporer lebih memusat pada masalah seperti sekularisasi, agama sipil, dan kepaduan agama dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme. Sosiologi agama kontemporer juga dapat mencakup sosiologi *ketiadaan agama* (contohnya dalam analisis sistem kepercayaan Humanis Sekuler).

Meski Ibnu Khaldun telah berpulang enam abad yang lalu, pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji, dipelajari dan digunakan hingga sekarang. Sebagai seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh pada semua bidang ilmu, terutama dalam bidang ekonomi dan sosiologi. Jadi, tidak heran kalau dunia kemudian mendaulatnya sebagai Bapak Ekonomi dan Sosiologi Islam. Di bukunya *Muqadimah*, Ibn Khaldun menggarisbawahi sejarah dan ilmu sosial bahwa ada kesinambungan antara abad kuno dan pertengahan dan sangat mencerminkan sosiologi modern. Masyarakat, ia percaya, disatukan oleh kekuatan kesatuan sosial yang dapat ditingkatkan oleh kesatuan beragama. Perubahan sosial dan dinamika masyarakat mengikuti hukum empiris ditemukan dan merefleksikan aktivitas dan iklim ekonomi yang sejalan dengan realitas.

1.2 Ruang Lingkup

Teori-teori Barat atau yang lahir dan berkembang di masyarakat Eropa dan juga Amerika, tidak semuanya relevan dijadikan sebagai alat analisis terhadap mayoritas penganut Islam. Maka pembelajaran sosiologi Islam memungkinkan digunakan sebagai alternatif basis perlawanan terhadap mainstream sosiologi positivis Barat dan posmodern yang liar. Disatu sisi sosiologi Islam yang dikembangkan di dunia Islam oleh Ibnu Khaldun (27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H), artinya, jauh sebelum sosiologi modern yang dikembangkan oleh August Comte (1798-1857) kurang dikembangkan

secara baik di dunia Islam, termasuk di Indonesia.

Maka atas dasar itu tulisan ini mencoba untuk **memulai** dengan segala kelemahan dan polemik yang mengiringinya dalam menformulasikan baik dengan perspektif sosiologi umum, sosiologi agama dan sosiologi Islam untuk kepentingan analisis atau memahami fenomena agama yang terjadi di Indonesia. Kemudian penulis lebih tertarik dengan menggunakan judul **Sosiologi Agama dalam konteks Indonesia**. Kenapa tidak menggunakan Sosiologi Islam dimana mayoritas penduduk Indonesia Muslim? Asumsi tersebut tidak salah, tetapi dalam kenyataannya isu-isu yang berkembang di Indonesia tidak hanya terkait dengan dinamika internal ummat Islam, tetapi seringkali justru terkait dengan agama-agama lain, atau dinamika eksternal, khususnya sikap negara terhadap agama-agama di Indonesia dan terutama terhadap Islam dan ummatnya.

Tulisan ini tidak dalam konteks membenturkan antara sosiologi umum, sosiologi agama dan sosiologi Islam, tetapi mencoba mengeksplorasi (menggambil kebaikan) dari ketiganya, sehingga diharapkan bisa menjelaskan fenomena agama di Indonesia secara tepat dan jernih baik dari pihak pemerintah, aparat dan ilmuwan serta ummat beragama. Karena dalam realitas di Indonesia dalam melihat fenomena agama tidak menggunakan pendekatan tunggal, dimana pemerintah dan aparat cenderung menggunakan pendekatan sosiologi umum, yaitu melihat agama sebagaimana yang terjadi di Barat. Agama dipahami sebagai urusan personal, bukan urusan negara, sekalipun ada

lembaga-lembaga agama yang lahir dari dinamika berbangsa dan bernegara. Namun berkembangnya tidak lebih sebagai lembaga administratif dibanding sebagai lembaga yang melakukan pencerahan dan pemberdayaan umat.

Adapun para ilmuwan umumnya cenderung menggunakan pendekatan sosiologi agama, yaitu melihat agama masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Konsekuensi mereka seringkali melihat fenomena agama tidak mendalam. Mungkin karena rasa hati-hatinya, sehingga tidak tuntas pembahasan dan kurang jelas kesimpulannya. Tidak hanya membingungkan pemerintah/aparat, tetapi juga membingungkan masyarakat luas, misalnya, dalam fenomena terorisme.

Sedangkan sosiologi Islam yang seharusnya bisa menjelaskan fenomena Islam di Indonesia selama ini tidak lebih sebatas “aset/kekayaan” yang belum tergali secara maksimal, misalnya, dalam konteks sosiologi Islam yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun (lahir 27 Mei 1332 – meninggal 19 Maret 1406, 73 tahun). Kurang aplikatif dalam memahami fenomena agama di Indonesia. Bukan karena persoalan konsep, tetapi karena kurang kesungguhan dari ilmuwan Muslim untuk menggali gagasan-gagasan orisinal Ibnu Khaldun yang bisa dijabarkan dan diimplementasi untuk melihat dinamika agama di Indonesia.

1.3 Sosiologi Konteks Indonesia

Sosiologi Agama dalam konteks Indonesia ini tidak ada hubungannya dengan Islam Nusantara. Jika Islam Nusantara lebih bersifat ideologis, tetapi Sosiologi Agama dalam konteks Indonesia ini adalah suatu pendekatan alternatif (*alternative approach*) untuk memahami atau menjelaskan fenomena agama dan masyarakat di Indonesia dengan pendekatan orang Indonesia. Suatu pendekatan yang memahami fenomena agama dan masyarakat dengan cara pandang orang Indonesia, dimana di Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama dan yang sama penting dimana Islam sebagai agama mayoritas. Islam sebagai pemilik yang sah, bukan sebagai agama yang asing di negerinya sendiri.

Seharusnya Islam bukan suatu agama yang dipahami dengan penuh kecurigaan. Bukan agama yang diperlakukan dengan diskriminatif. Misalnya, fenomena ISIS, terorisme, komando jihad dan sebagainya. Dalam banyak kasus tidak ada sangkut-pautnya dengan Islam, justru seringkali ummat Islam mendapatkan limbah atas berbagai fenomena di atas. Tetapi suatu agama yang melekat di hampir semua kehidupan, baik berbangsa dan bernegara. Ummat Islam pernah dan selalu bergandeng-tangan dengan komponen lain dalam mewujudkan Indonesia merdeka (1945). Ummat Islam pernah bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menumpas PKI (komunisme) (1965).

Agama Islam, termasuk agama-agama lain tidak hanya dipahami sebagai asset, tetapi sebagai fungsi

pemelihara dan menjaga harmonisasi alam. Indonesia mengenal peradaban, ketika Indonesia mengenal agama. Indonesia mengenal sistem irigasi/pengairan melalui Sunan Maulana Malik Ibrahim (Turki) dan Sunan Kalijogo. Indonesia mengenal politik dan pemerintahan melalui Maulana Sunan Malik Ibrahim (Turki). Indonesia mengenal peradaban-baju setelah berinteraksi dengan Islam (1480-an), kemudian Indonesia mengenal sekulerisme setelah berinteraksi dengan agama Kristen/Katolik (1600-an). Indonesia mulai mengenal istilah ekstrem kanan-ekstrem kiri, Islam Fundamentalisme, Islam Garis Keras setelah Indonesia berinteraksi dengan zionisme (1970-an).

Jika memang dalam perjalanan sejarah Indonesia ummat Islam dianggap ada suatu kesalahan atau sengaja melakukan kesalahan, hendaknya tidak disikapi dengan cara bumi-hangus atau dengan hitam-putih (*absolutisme*). Ummat Islam seakan-akan tidak ada benarnya. Ummat Islam seakan-akan tidak punya jasa sama sekali dalam membangun bangsa ini. Artinya, harus adil terhadap seluruh anak bangsa. Ketika kita bisa mentolerir atau memaafkan beberapa oknum TNI dalam berbagai pemberontakan, seperti, keterlibatan Letnan Kolonel (*Oversrste*) Abdul Qahar Muzakar dalam DI/TII di Sulawesi (1950), keterlibatan Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia pada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) (1958), juga keterlibatan Letkol Untung dalam G30S/PKI (1965) dan berbagai pemberontakan lain, kita cukup dewasa dan terukur untuk membedakan mana institusi dan oknum TNI. Kenapa tidak bisa bersikap

dewasa untuk memahami Islam dan ummatnya?

Indonesia dalam konteks ini adalah suatu negara merdeka dan berdaulat. Negara yang terus berbenah dalam semua sektor pembangunan. Suatu negara yang terus mencari bentuk. Maka sudah seharusnya menyikapi semua komponen bangsa sebagai asset pembangunan. Bukan diposisikan sebagai negara yang terbelakang dan dimana masa depannya terus didekte dan diarahkan kepentingan asing dengan berbagai dalih, seperti, kesiapan SDM dan sebagainya, misalnya, dalam kasus *Freeport*. Padahal dari segi SDM-pun kita punya potensi besar, sebagaimana fenomena Habibie, mantan Presiden; Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan pada masa SBY dan masih banyak lagi. Ketika mereka diberi ruang untuk mengembangkan potensinya, maka karya-karyanya bisa dirasakan oleh ummat. Sekalipun masih dilihat secara individu-individu. Jadi, tidak bisa dipandang dengan mata sebelah berbagai potensi SDM di Indonesia untuk membangun bangsa ini.

Jadi, yang dibutuhkan adalah sosiologi yang memahami Indonesia secara jernih dan adil, khususnya hubungan antara agama dan sektor lain. Sosiologi yang mendorong suatu keadaan dimana mayoritas yang menyayangi minoritas dan minoritas menghormati mayoritas. Bukan mayoritas yang arogan terhadap minoritas, atau sebaliknya minoritas yang tidak tahu diri terhadap mayoritas. Mengabaikan Islam sebagai agama mayoritas sama halnya mengabaikan realitas Indonesia.

1.4 Diskusi

Ada persoalan yang bisa didiskusikan lebih mendalam bagaimana titik temu dan perbedaan sosiologi umum, sosiologi agama dan sosiologi Islam serta bagaimana kontribusinya terhadap sosiologi agama dalam konteks Indonesia dalam tataran konsep.

BAB 2

SEKILAS SOSIOLOGI UMUM

Sebelum mendiskusikan lebih jauh sosiologi agama, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu sosiologi umum. Karena sosiologi agama adalah bagian dari sosiologi umum. Berdasarkan kekhususan dari ruang lingkungannya, menurut Soerjono Soekanto (1992) sosiologi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam cabang, yaitu sosiologi umum dan khusus. **Sosiologi Umum** mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya, dalam mengadakan hubungan masyarakat.

Sedangkan **Sosiologi Khusus** mempelajari dan menyelidiki berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, dari suatu segi kehidupan tertentu, seperti, sosiologi pembangunan, sosiologi industri, sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi pendidikan dan sosiologi agama.

2.1 Pengertian Sosiologi

Istilah Sosiologi berasal dari kata; *Socius* dan *Logus*. *Socius* berarti teman/kawan. *Logus* berarti ilmu. Dapat

dikatakan secara lebih luas sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Beberapa definisi sosiologi menurut para ahli, Pertama, **Pitirim Sorokin (1889-1968)** berpendapat sosiologi adalah ilmu yang mempelajari: 1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi. Gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya. 2) Hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial & gejala non sosial. Misalnya gejala-gejala geografi biologis dan sebagainya.

Kedua, **Roucek & Warren (1902-1984)** berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Roucek pernah mengungkapkan konsep pengendalian sosial yang pernah digunakan dalam sosiologi pada tahun 1894 oleh *Small* dan *Vincent*, yaitu bahwa pengendalian sosial adalah sebuah istilah berusaha untuk suatu proses baik yang terencana maupun tidak terencana, oleh individual yang diajar, dibujuk atau dipaksa untuk menyesuaikan diri terhadap pemakaian dan nilai hidup suatu kelompok yang dapat kita klasifikasikan sebagai proses sosialisasi.

Ketiga, **Selo Soemardjan¹ (1915-2003) & Soelaeman Soemardi** berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Termasuk perubahan-perubahan sosial. Struk-

¹ Ia dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia setelah tahun 1959 -- seusai meraih gelar doktornya di Cornell University, AS -- mengajar sosiologi di Universitas Indonesia (UI). Dialah pendiri sekaligus dekan pertama (10 tahun) Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (sekarang FISIP) UI.

tur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan. Inti dari definisi diatas mempunyai kesamaan yaitu sosiologi adalah hubungan/interaksi antar manusia dalam masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari/dikaji interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (keluarga, kelas sosial masyarakat) dan produk-produk yang timbul dari interaksi tersebut seperti nilai, norma serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok/masyarakat tersebut.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pergaulan hidup antara seseorang dengan seseorang, perseorangan dengan golongan atau golongan dengan golongan. Dengan demikian terdapat dua unsur pokok dalam sosiologi, yaitu manusia dan hubungan sosial (masyarakat). Terdapat berbagai pendapat tentang kedudukan individu dan masyarakat ini. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa individu lebih dominan daripada masyarakat, tetapi di pihak lain berpendapat bahwa masyarakat lebih dominan daripada individu.

Sementara itu terdapat pendapat yang mengambil posisi tengah yang mengatakan bahwa antara individu dan masyarakat terjadi proses saling mempengaruhi. Sejumlah kritik diajukan kepada sosiologi, yaitu 1) sosiologi adalah ilmu yang sulit, 2) sosiologi hanya merupakan kumpulan dari berbagai kajian ilmu sosial lainnya, dan 3) tidak ada lapangan yang khusus bagi sosiologi karena objeknya telah banyak digarap oleh ilmu-ilmu sosial lainnya.

2.2 Bidang Kajian Sosiologi

Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang dahulunya berinduk pada ilmu filsafat. Dengan demikian pokok-pokok pikiran sosiologi tidak bisa terlepas dari pemikiran para ahli filsafat yang mengkaji tentang masyarakat. Sosiologi mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-20, di mana pada masa ini mulai banyak bermunculan berbagai cabang sosiologi, seperti sosiologi industri, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, dan lain-lain. Pemikiran para ahli yang mengkonsentrasikan diri pada masalah kajian sosiologi ini dibedakan atas tokoh-tokoh sosiologi klasik dan tokoh-tokoh sosiologi modern.

Objek kajian sosiologi adalah manusia. Sosiologi mempelajari manusia dari aspek sosial yang disebut masyarakat. Istilah masyarakat sering digunakan untuk menyebut kesatuan hidup manusia. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bertema. Ciri-ciri masyarakat:

1. Adanya manusia yang hidup bersama yang dalam ukuran minimal dua orang atau lebih.
2. Adanya pergaulan dan kehidupan bersama antara manusia dalam waktu yang cukup lama.
3. Adanya kesadaran bahwa mereka yang menghasilkan kebudayaan.

Sosiologi sebagai ilmu sosial yang mempunyai fokus kajian mengenai tingkah laku manusia mempunyai bidang kajian yang sangat luas, antara lain bidang

kajian **Sosiologi Industri, Sosiologi Hukum, Sosiologi Pendidikan, Sosiologi Perkotaan, Sosiologi Pedesaan, Sosiologi Kesehatan, Sosiologi Agama dan lain-lain**. Sosiologi Industri mengkaji masalah fenomena industri dengan menitikberatkan kajiannya pada faktor manusia, dan mengaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan Sosiologi Hukum merupakan cabang sosiologi yang mengkaji fenomena-fenomena hukum yang ada di masyarakat. Sementara itu Sosiologi Pendidikan mengkaji proses-proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan dengan tekanan dan wilayah tekanannya pada lembaga pendidikan. Di lain pihak Sosiologi Perilaku Menyimpang mengkaji perilaku dan kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang sudah disepakati dalam masyarakat. Adapun **Sosiologi agama** adalah suatu cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah dan pasti, demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.

Dalam melakukan kajiannya, terutama pada masyarakat modern, sosiologi perlu bekerja sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya membentuk kajian multidisipliner. Antropologi bisa membantu sosiologi dalam hal metodologi mengingat antropologi mempunyai pengalaman yang sangat panjang dalam melakukan penelitian yang bersifat kualitatif. Psikologi bisa memberi masukan bagi sosiologi dalam hal informasinya

mengenai kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya individual. Sementara itu sosiologi juga harus meminta bantuan ahli sejarah untuk memberi informasi tentang proses historis yang ada dalam fenomena perubahan sosial.

2.3 Lahirnya Sosiologi

Latar belakangnya adalah perubahan masyarakat di Eropa Barat akibat revolusi industri (Inggris) dan revolusi Prancis. Yang pertama kali membuat deskripsi ilmiah atas situasi sosial adalah **Auguste Comte** (1798-1857). Beliau seorang ahli filsafat berkebangsaan Prancis yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Tiga tahap yang dialami manusia menurut Auguste Comte: 1) Jenjang teologi mengacu pada hal yang bersifat adikodrati. 2) Jenjang metafisika mengacu pada kekuatan-kekuatan metafisik/abstrak. 3) Jenjang positif jenjang ilmiah.

Comte mengatakan bahwa sosiologi mirip satu ilmu-ilmu sosial dan menempati peringkat teratas dalam hirarki ilmu-ilmu sosial. Ia membagi ke dalam dua bagian besar, yaitu statika sosial yang memiliki stabilitas dan kemantapan dan dinamika sosial yang mewakili perubahan.

Tokoh lain yang tidak bisa diabaikan, yaitu: **Karl Marx (1818-1883)**. Marx percaya bahwa masyarakat terbentuk di sekeliling kontradiksi-kontradiksi yang hanya bisa di selesaikan melauli perubahan sosial yang aktual. Salah satu kontradiksi mendasar yang di lihat Marx adalah antara sifat dasar manusia dan syarat-syarat kerja di dalam kapitalisme. Bagi Marx

sifat dasar manusia dikaitkan dengan kerja yang mengekspresikan dan mentransformasikan hakikat kita. Di bawah kapitalisme, kerja kita dijual sebagai komoditas, dan hal lain menyebabkan kita teralienasi dari aktivitas produktif kita.

Tokoh lain adalah **Herbet Spencer** (1820-1903). Ia adalah orang Inggris yang menguraikan materi sosiologi secara rinci dan sistematis. Menurutnya objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial dan industri. Termasuk pula asosiasi, masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan.

Juga **Emile Durkheim** (1858-1917). Menurutnya sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses sosial. Ia mengadakan pembagian sosiologi dalam tujuh bagian yaitu:

- 1) Sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia.
- 2) Sosiologi agama
- 3) Sosiologi hukum dan moral yang mencakup organisasi politik, sosial, perkawinan, dan keluarga.
- 4) Sosiologi tentang kejahatan
- 5) Sosiologi ekonomi yang mencakup ukuran-ukuran penelitian dan kelompok kerja.
- 6) Sosiologi yang mencakup masyarakat perkotaan dan pedesaan.
- 7) Sosiologi estetika

Salah satu bukunya yang terkenal berjudul *Rules Of*

Sociological Method (1895) yang menyoroiti metodologi yang digunakan dalam penelitian klasiknya tentang bunuh diri.

Satu tokoh lagi yang perlu dikeukakan di sini, yaitu: **Max Weber (1864-1920)**. Menurutny sosiologi sebagai ilmu berusaha memberikan pengertian tentang aksi-aksi sosial. Analisanya tentang wewenang, birokrasi sosiologi, agama, organisasi-organisasi, ekonomi dan sebagainya. Tokoh-tokoh sosiologi di Indonesia antara lain Selo Soemardjani Soelaeman Soemardi, dan Hassan Shadily.

2.4 Sosiologi Sebagai Ilmu

Menurut Soerjono Soekanto (1983) ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran (logika) unsur pokok ilmu pengetahuan yang tergabung dalam satu kebulatan yaitu sebagai berikut: 1) Pengetahuan (*Knowledge*). 2) Tersusun secara sistematis. 3) Menggunakan pemikiran (logis dan rasional). 4) Terbuka terhadap kritik (objektif)

Sedangkan sifat ilmu pengetahuan: 1) Empiris didasarkan pada obsesi (pengamatan) terhadap kenyataan dan menggunakan akal sehat. 2) Teoritis menyusun abstraksi dari hasil-hasil obsesi abstraksi adalah kerangka dan unsur yang tersusun secara logis tujuannya untuk menjelaskan antar hubungan & sebab sehingga menjadi teori. 3) Kumulatif dasar-dasar teori yang diperluas diperbaiki dan diperhalus. 4) Natetis inti persoalan yang bertujuan untuk mencapai &

menjelaskan fakta tersebut.

Adapun sifat hakikat sosiologi sebagai berikut:

1) Sosiologi merupakan ilmu social. 2) Sosiologi merupakan ilmu murni. 3) Sosiologi adalah ilmu yang abstrak. 4) Sosiologi bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum interaksi. 5) Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris rasional. 6) Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum.

Adapun manfaatnya: 1) Sosiologi membantu memahami pola-pola interaksi sosial, kontrol sosial, status, dan peranan sosial dalam masyarakat. 2) Memahami nilai-nilai norma, tradisi dan keyakinan yang dianut. 3) Membantu bersikap tanggap, kritis, dan rasional terhadap setiap kenyataan sosial dalam masyarakat serta mampu mengambil sikap dan tindakan yang tepat terhadap berbagai kenyataan sosial itu.

BAB 3

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SOSIOLOGI AGAMA

Bab ini akan menguraikan perkembangan sosiologi agama dan kaitannya dengan sosiologi umum dan sosiologi Islam. Diharapkan pembaca mengetahui mata rantai, karakteristik dan kontribusi pada masing-masing dalam studi sosiologi agama, baik secara akademik maupun secara praktis.

3.1 Sejarah Perkembangan

Kelahiran sosiologi lazimnya dihubungkan dengan seorang ilmuwan Perancis bernama Auguste Comte (1798-1857), yang dengan kreatif telah menyusun sintesa berbagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empirik yang kuat. ilmu tentang masyarakat ini pada awalnya oleh Auguste Comte

diberi nama "social physics" (fisika sosial), kemudian dirubahnya sendiri menjadi "sociology" karena istilah fisika sosial tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan ternyata dipergunakan oleh seorang ahli statistik sosial berasal dari Belgia bernama Adophe Quetelet.

Selanjutnya Auguste Comte dikenal sebagai "bapak" sosiologi. Fenomena agama sudah mulai tumbuh sekitar pertengahan abad ke-19 oleh sejumlah sarjana Barat terkenal seperti Edward B.Taylor (1832-1917), Herbert Spencer (1820-1903), Friedrich H.Muller (1823-1917), Sir James G.Fraser (1854-1941). Tokoh-tokoh ini lebih tertarik kepada agama-agama primitif. Namun pengkajian masalah agama secara ilmiah dan terbina baru mulai sekitar 1900. Mulai saat itu hingga menjelang 1950 muncullah buku-buku sosiologi agama yang sering disebut sosiologi agama klasik. Periode klasik ini dikuasai oleh dua orang sosiolog yang terkenal yaitu Emile Durkheim dari Perancis (1858-1917) dan Max Weber dari Jerman (1864-1920). Dua sarjana ini lazim dipandang sebagai pendiri sosiologi agama.

Sesudah Perang Dunia II tumbuh perkembangan baru. Dalam arus sosiologi klasik itu munculah suatu minat yang kuat dari sebagian besar ahli sosiologi yang ditujukan kepada kehidupan agama di dalam gereja. Maka lahirlah **sosiologi gereja**. Tujuan penelitian para peminat semata-mata diarahkan dalam bidang kehidupan gereja dan hasilnya dimaksudkan untuk kepentingan gereja, khususnya dalam menentukan kebijaksanaan baru. Berkaitan dengan pengambilan kebijaksanaan itu para peneliti cukup cepat menyadari

bahwa pelayanan pastoral dirasa sebagai kunci utama untuk mendatangkan perbaikan. Maka cukup cepat kegiatan penelitian dipusatkan pada pelayanan pastoral. Lalu muncullah apa yang dinamakan **sosiologi pastoral**.

Ternyata usaha itu mendatangkan hasil yang positif. Maka sosiologi pastoral itu mendapat gairah lebih besar lagi dan mengalami perkembangan bagus. Bahkan, di beberapa negara (Perancis, Jerman, dan Belanda) didirikan lembaga khusus untuk penelitian kehidupan sosial gerejani. Hasil positif dari sosiologi gereja dan sosiologi pastoral di atas ternyata menumbuhkan sikap-sikap baru dari peminatnya. Entah disadari entah tidak Sosiologi Agama (yang bercorak gerejani) ini **memisahkan diri dari sosiologi umum**.

Namun sekitar tahun 1960-an terjadi perkembangan lain. Sosiologi gereja mengalami frustrasi dan kemunduran, bahkan akhirnya berhenti untuk nantinya muncul kembali dalam bentuk baru. Menurut para paninjau yang kompeten memang terdapat alasan-alasan yang cukup kuat menyebabkan hal tersebut, antara lain:

- a) Pimpinan Gereja umumnya merasa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan semula. Hal ini membawa akibat yang tidak menguntungkan. Jelasnya, dukungan dari pihak pimpinan gereja berkurang.
- b) Sementara itu kalangan para sosiolog (dari Sosiologi Umum) tidak tinggal diam. Mereka menilai dan mengeluarkan pendapat mereka, bahwa cara kerja dan

hasil kerja para sosiolog gerejani kurang bermutu ilmiah. Mutunya paling tinggi hanya sejajar dengan karangan yang berbobot deskripsi dan sosiografi.

Sementara itu pengertian tentang sasaran dan lingkup sosiologi agama di pandang perlu untuk diperluas, dan hanya di persempit pada Gereja saja. Sebab dalam pengertian agama termasuk juga pengertian iman atau kepercayaan. Gereja hanya merupakan salah satu bentuk kepercayaan tertentu. Maka disimpulkan bahwa mulai saat itu penelitian sosial keagamaan tidak boleh terbatas pada kehidupan gerejani saja. Tetapi harus mencakup semua bentuk kepercayaan yang ada di luar Gereja.

Berdasarkan timbangan-timbangan di atas terjadilah perubahan alam sikap sosiologi agama. Pertama, Sosiologi Agama menjauhkan diri dari Gereja dan kembali pada pangkuan *Sosiologi Umum*. Kedua, sosiologi agama mengadakan langkah baru menuju kepada tercapainya pengetahuan yang sungguh bersifat ilmu. Untuk itu dirasa perlu mengadakan koreksi-koreksi mengenai: sasaran, metodologi dan problematikanya.

Sejak tahun 1970-an Sosiologi Agama menghadapi problematik baru yang menyangkut aspek-aspek sebagai berikut:

1. Lingkup tinjauan Sosiologi Agama harus diperluas. Tegasnya tidak hanya menangani agama-agama institusional saja. Tetapi mencakup semua agama (termasuk nonkonstitusional) yang sungguh memberi pengaruh nyata atas kehidupan manusia dan

masyarakatnya.

2. Masalah pengertian agama dan makna agama. Apakah dalam hal ini ada perubahan? Untuk mengatasi kesulitan ini perlu terlebih dahulu diadakan pertanyaan kepada penganut-penganut agama yang berbeda-beda apa sesungguhnya yang mereka maksud dengan agama.
3. Apabila setiap orang atau kelompok mempunyai pengertian yang jauh berbeda satu dengan yang lain, hal tersebut akan menimbulkan kesulitan baru dalam menentukan batas-batas pengertiannya.
4. Apabila pengertian baru agama sudah dirumuskan setepat-tepatnya dalam definisi yang baru dengan sendirinya akan timbul problematika baru tentang cara pendekatannya.

3.2 Sosiologi Gereja di Eropa

Dalam uraian diatas telah dikemukakan bahwa sosiologi agama sudah periode klasik berkembang menjadi sosiologi tentang Gereja. Untuk mengenai Sosiologi Gereja di Eropa akan diperkenalkan beberapa tokoh penting. Di Prancis. Dari negara yang sebagian beragama katolik patut disebut nama Gabriel Le Bras. Karena dialah perintis dan pendorong Sosiologi Agama (dalam arti Gereja) di Eropa selatan. Dia tergerak oleh kedua kenyataan yang saling bertolak belakang tentang negaranya.

Untuk negara Belgia patut disebut nama J. Leclercq yang sejak tahun 1941 bergiat dalam sosiologi agama

(Gereja). Dia dikenal lagi sebagai seorang pemrakarsa berdirinya kongres Internasional Sosiologi Agama 1948. Pusat kegiatannya ialah Universitas Leuven. Di Jerman. Pengantar sosiologi Agama yang lebih sistematis diterbitkan oleh Joachim Wach (1931) dan Gustave Mensching (1944). Namun keduanya masih bermutu sejarah agama dari pada sosiologi agama.

Di Netherland. Penelitian sosiografis tentang hidup religius dimulai oleh Steinmatz. Dari kehidupan agama di Netherland juga dalam mengkaji masalah "Agama dan kesadaran kelompok". Dari negeri ini muncul suatu majalah "*social kompas*" dalam tahun 1950, yang kemudian mulai tahun 1960 ditingkatkan menjadi majalah internasional mengenai studi sosio-keagamaan dengan nama "*social compass*". Di Itali. Dorongan pertama untuk mempelajari masalah hidup religius datang dari seorang uskup di Mantua (1935). Muncullah kemudian sebuah buku statistik umat gereja yang disusun oleh Blodrini, Filograsi.

3.3 Sosiologi Gereja di Amerika Serikat

Baiklah diketahui bahwa dari kalangan para sosiolog sendiri yang sungguh ahli dalam bidang ini sebagian besar tidak tertarik kepada sosiologi agama sebelum Perang Dunia II. Mereka memandang agama sebagai suatu bentuk kelambanan kultural, yang tidak "bermanfaat" untuk dipelajari, karena pengkajiannya tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan masyarakat yang rasional. Baru sesudah Perang Dunia II terdapat perubahan dalam sikap

tersebut, dan minat kepada sosiologi agama mulai bertumbuh, praduga yang kurang baik mulai berkurang didesak oleh pandangan yang positif. (dan sistematis). Dorongan terbesar untuk merefleksi kehidupan agama secara sosiologis yang mendalam diberikan oleh R.K. Merton dan T. Parsons, dan ahli sosiologi ternama, yang ternyata berhasil meyakinkan bukan saja kalangan sosiolog tetapi juga kalangan Gereja.

Dari kalangan Katolik pada tahun 1938 kalangan sarjana katolik mendirikan suatu organ yang diberi nama "The American Catholic Sociological Society". Tujuan yang ingin dicapai organ ini ada dua hal, pertama, memberikan karangan-karangan ilmiah mengenai teoro-teori sosiologis di penelitian dalam lapangan keagamaan, dan kedua sebagai sarana kontak antara para sosiolog katolik sendiri atau pada awal penerbitannya ternyata karangan-karangannya sebagian besar masih bersifat filosofis, namun dalam kurun waktu selanjutnya dapat mengubah corak itu menjadi positif empiris, sehingga majalah tersebut pada tahun 1964 berganti nama menjadi "Sociological Analysis".

3.4 Sosiologi Agama di Indonesia

Sejalan dengan pertumbuhan Sosiologi Umum di negara kita yang masih dalam hidup permulaan maka dapat di mengerti bahwa masih terdapat kekosongan di bidang Sosiologi Agama. Hal ini disadari kalangan para ahli ilmu sosial dan tidak kurang dari Dr. Mukti Ali (bekas menteri Agama RI). Beliau menganjurkan

para sarjana Indonesia supaya mengadakan penelitian dalam bidang masalah kehidupan agama.

Terlepas dari himbauan Mukti Ali sementara itu telah muncul dalam peredaran sebuah buku yang berjudul "profil pesantren" oleh Sudjoko dkk. LP3ES Jakarta (1974) dari sebuah buku lain "pesantren dan pembaharuan". Dua buku tersebut menyingkap bentuk, kehidupan keagamaan islam dalam ruang lingkup kecil yang disebut pesantren (oleh Abdul Rahman Wahid pernah disebut sebagai subkultur) dikatakan menyingkapkan karena dalam kurun waktu cukup lama dalam pendidikan itu beserta sistem pendidikannya berjalan di luar arus pendidikan umum tertutup bagi dunia luar. Meskipun isi uraian yang disajikan secara formal tidak dapat disebut sosiologi agama dalam arti sesungguhnya namun harus diakui bahwa apa yang telah di kerjakan oleh penulis-penulisnya yang di sponsori Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tersebut harus disambut dengan rasa gembira. Karena bagaimanapun nilainya mereka telah menanamkan benih-benih yang dapat menumbuhkan rangsangan ke arah penelitian yang diinginkan Sosiologi Agama untuk masa depan.

Dari kalangan Gereja Katolik. Langkah-langkah yang telah diambil Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Patut disambut dengan rasa syukur. Universitas tersebut pada tahun 1972 mendirikan suatu pusat penelitian yang diberi nama Pusat Penelitian Atma Jaya (PPA) Jakarta dan diberi tugas untuk mengadakan penelitian masalah sosial kegerejaan yang berkaitan dengan perkembangan gereja katolik di indonesia. Tujuan

tersebut dituangkan dalam beberapa program. PPA tersebut juga bermaksud mengadakan perpustakaan dan dokumentasi khusus yang meliputi buku, laporan, karangan dan majalah yang berkenaan dengan bidang penelitian sosial kegerejaan dan bidang yang bertalian.

Di jelaskan bahwa pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dibidang kehidupan beragama para warga negara, bukan dalam arti yang menyangkut perkembangan atau pertemuan manusia dengan tuhan, melainkan sejauh agama itu sudah merupakan fakta sosial di masyarakat indonesia. Se jauh itu maka agama dapat dipelitakan, supaya agama sebagai unsur pembangunan yang di PELITAKAN dapat mengembangkan fungsinya dengan baik dan terarah. Dari tinjauan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa dibidang Sosiologi Agama di negara kita baru di dapati kuncup-kuncup kecil yang mudah-mudahan dapat berkembang menjadi bunga yang menghasilkan buah yang berarti.

Di Indonesia sendiri, pada awalnya sosiologi hanya dipelajari di perguruan tinggi sebagai ilmu pengetahuan murni. Akan tetapi, ketika program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terus berkembang, yang ternyata kemudian ada beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik karena berbagai hambatan, terutama masalah sosial kemasyarakatan, maka kemudian kajian ilmu kemasyarakatan sangat penting artinya dalam mengatasi hal tersebut. Sosiologi dilibatkan sebagai ilmu pengetahuan terapan untuk membantu memecahkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, terutama untuk mendukung program pembangunan. agar masyarakat bisa sedini mungkin

bisa mengenal, menganalisis dan memecahkan berbagai persoalan sosial dilingkungannya, maka sekarang ini sosiologi dikenalkan setelah di bangku perguruan tinggi, dewasa ini pengetahuan sosiologi telah diperkenalkan semenjak bangku sekolah lanjut tingkat pertama.

Pada perkembangannya fenomena sosial, terutama yang terkait dengan agama semakin hari semakin kompleks. Lebih-lebih semakin semaraknya isu Islam garis keras, terorisme, Syi'ah dan sebagainya. Tidak jelas lagi antara gerakan inteljen dan murni sebagai fenomena agama dan masyarakat dalam konteks keilmuan. Disamping sosiologi kurang bisa menjelaskan secara tepat, bahkan yang terjadi kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan akhirnya memposisikan pemerintah dipersimpangan jalan. Akhirnya, yang dirugikan adalah ummat Islam sebagai mayoritas. Islam sebagai pihak yang tertuduh.

3.5 Diskusi

Paparan di atas menggambarkan bagaimana perkembangan sosiologi agama, baik dalam konteks barat dan dunia Islam. Bagaimana tantangan ke depan bagaimana bisa menjelaskan posisi dan peran agama dengan sikap obyektif dan proposional dalam kontes akademik dan praktis?

BAB 4

PENDIRI SOSIOLOGI AGAMA: EMILE DURKHEIM DAN MAX WEBER

Sosiologi umum yang dimaksud di sini adalah Sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, baru muncul pada abad ke 19, yang dipopulerkan oleh seorang filosof Prancis yang bernama *Auguste Comte* (1798–1857). Di dalam bukunya *Course De Philosophie Positive*, ia menjelaskan bahwa untuk mempelajari masyarakat harus melalui urutan-urutan tertentu, yang kemudian akan sampai pada tahap akhir yaitu tahap ilmiah.

Karena ajaran yang dikemukakan oleh Auguste Comte ini, maka terlahir beberapa pendekatan untuk mempelajari masyarakat yang sangat berguna bagi perkembangan sosiologi. Misalnya saja Herbert Spencer (1820-1903) dengan bukunya, "*The Principles of Sociology*", yang memperkenalkan pendekatan analogi organik, Karl Marx (1818-1883) yang memperkenalkan

pendekatan materialisme dialektis, Emile Durkheim (1858-1917) dengan karyanya; *The Social Division of Labor*, *The rules of Sociological method* dan *The Elementary forms of religious life*", yang memperkenalkan fakta sosial, sedang Max Weber (1864-1920) dengan karyanya; *Economic and Society*, *Collected Essays on sociology of religion* memperkenalkan pendekatan tindakan sosial.

Sedangkan embrio minat mempelajari fenomena agama dalam masyarakat mulai tumbuh sekitar pertengahan abad ke-19 oleh sejumlah sarjana Barat terkenal seperti *Edward B. Tylor* (1832-1917), *Herbert Spencer* (1820-1903), *Frederich H. Muller* (1823-1917), *James G. Fraser* (1854-1941). Tokoh-tokoh ini lebih tertarik pada agama-agama primitif, namun kajian ilmiah tentang agama relatif mulai sekitar tahun 1900. Sejak saat itu hingga menjelang munculnya buku-buku sosiologi agama, disebut juga Sosiologi Agama Klasik. Periode klasik ini terutama dikuasai oleh dua sosiolog yang terkenal, yaitu *Emile Durkheim* dari Perancis (1858-1917) dengan karyanya *The Elementery Form of Religious Life* dan *Max Weber* dari Jerman (1864-1920) dengan karya monumentalnya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* dan *Ancient Judaism*. Dua sarjana ini lazim disebut sebagai pendiri Sosiologi Agama.

Sosiologi agama menjadi disiplin ilmu tersendiri sejak munculnya karya *Weber* dan *Durkheim*. Jika tugas dari sosiologi umum adalah untuk mencapai hukum kemasyarakatan yang seluas-luasnya, maka tugas dari sosiologi agama adalah untuk mencapai keterangan-keterangan ilmiah tentang masyarakat agama khususnya. Masyarakat agama tidak lain ialah suatu

persekutuan hidup (baik dalam lingkup sempit maupun luas) yang unsure konstitutif utamanya adalah agama atau nilai-nilai keagamaan. Jika teologi mempelajari agama dan masyarakat agama dari segi “*supra-natural*”, maka sosiologi agama mempelajarinya dari sudut empiris sosiologis.

4.1 Emile Durkheim (1858-1917)

4.1.1 Biografi Singkat

David Emile Durkheim, lahir tanggal 15 April 1858 lahir di kota Epinal ibu kota bagian Vosges, Lorraine, Prancis bagian timur. bersama dengan Max Weber, diakui disebut sebagai Bapak Fase Teori Sosiologi Modern yang paling utama. Durkheim peranakan Yahudi, dan beberapa dari nenek moyangnya adalah rabbi (guru), Pendeta Agama Yahudi, yang bekerja di Prancis sejak tahun 1784. Ibu Emile adalah wanita sederhana, ahli sulam-menyulam. Sesungguhnya Durkheim diharapkan menjadi seorang rabbi, menuruti jejak Ayahnya, namun pada kehidupan selanjutnya ia beralih perhatian pada pendidikan, filsafat dan sosiologi.



Sesudah mendapatkan pendidikan dasar dan lulus dengan gemilang, Durkheim melanjutkan studinya di Paris, mempersiapkan diri masuk di *École Normale Supérieure*, di mana nanti ia menemukan sahabat-sahabat yang setia sepanjang hayatnya. Suasana

akademik yang bertingkat tinggi yang meliputi École Normale Supérieure itu, dengan mahasiswa pilihan, membangkitkan jiwa Durkheim secara penuh, untuk aktif berdiskusi, mengajukan argumentasi-argumentasi yang bernada politik, moral dan filsafati. Filsuf yang sangat berpengaruh pada Durkheim adalah A. Comte (Bapak Sosiologi). Pengaruh Comte pada Durkheim adalah bersifat formatif.

Durkheim membangun suatu kerangka yang luas untuk analisis sistem sosial yang tetap penting bagi sosiologi dan sejumlah disiplin ilmu lain yang berkaitan, khususnya antropologi hingga saat ini. Bahkan orang-orang yang pada dasarnya tidak sependapat dengannya tetap memandang Durkheim sebagai kerangka acuan utama. Beberapa karya utama Emile Durkheim diantaranya *The Division of Labour in Society* (1893), *The Rules of Sociological Method* (1895), *Suicide* (1897) dan diakhiri dengan *The Elementary Forms of The Religious Life* (1912) serta sejumlah artikel, monografi dan beberapa makalah serta materi kuliahnya yang telah diterjemahkan dan dipublikasikan dalam bentuk buku berbahasa Inggris.

Sosiologi Durkheim terlalu ditandai oleh tegangan antar ilmu pengetahuan, kesusilaan, politik dan ideologi. Banyak dari pekerjaan ilmiahnya menampilkan perubahan moral dengan tujuan umumnya adalah untuk menggambarkan kondisi yang stabil ditengah-tengah masyarakat modern. Pribadi Durkheim dapat dikatakan aneh. Dengan wajah yang tampak dingin dan keras, hati sanubarinya sangat halus. Kematian sahabatnya, Victor Hommay, akibat

bunuh diri sangat memukul perasaan Durkheim, hingga ide tentang bunuh diri ini nanti menjadi salah satu unsur dalam teorinya tentang masyarakat. Durkheim meninggal pada 15 November 1917 sebagai seorang tokoh intelektual Perancis tersohor.

4.1.2 Pokok-Pokok Pemikiran Durkheim

4.1.2.1 Teori Solidaritas

Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim (1858-1917) dalam mengembangkan teori sosiologi. Durkheim (dalam Lawang, 1994: 181) menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Menurut Durkheim, berdasarkan hasilnya, solidaritas dapat dibedakan antara solidaritas positif dan solidaritas negatif. Solidaritas negatif tidak menghasilkan integrasi apapun, dan dengan demikian tidak memiliki kekhususan.

Menurut Durkheim dapat di bedakan dua macam solidaritas positif yang dapat di tandai oleh ciri-ciri berikut:

- 1) Pada solidaritas pertama, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Didalam hal solidaritas yang kedua, seorang warga masyarakat tergantung kepada masyarakat, karena dia tergantung pada bagian-bagian masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal solidaritas kedua tersebut, masyarakat tidak dilihat dari aspek yang sama. Dalam hal pertama, masyarakat merupakan kesatuan kolektif dimana terdapat kepercayaan dan perasaan yang sama. Sebaliknya, pada hal kedua masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan yang tetap, sebetulnya keduanya merupakan suatu gabungan, akan tetapi dilihat dari sudut-sudut yang berbeda.
- 3) dari perbedaan yang kedua itu muncul perbedaan yang ketiga, yang akan memberi ciri dan nama kepada kedua solidaritas itu. Ciri-ciri tipe kolektif tersebut adalah individu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan, tetapi berbeda peranan dan fungsinya dalam masyarakat, namun masih tetap dalam satu kesatuan.

Berkaitan dengan perkembangan masyarakat, Durkheim melihat bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Salah satu komponen utama masyarakat yang menjadi pusat perhatian Durkheim dalam memperhatikan perkembangan masyarakat adalah bentuk solidaritas sosialnya. Masyarakat sederhana memiliki bentuk

solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial pada masyarakat modern. Masyarakat sederhana mengembangkan bentuk solidaritas sosial mekanik, sedangkan masyarakat modern mengembangkan bentuk solidaritas sosial organik. Jadi, berdasarkan bentuknya, solidaritas sosial masyarakat terdiri dari dua bentuk yaitu:

1. Solidaritas sosial mekanik

Pandangan Durkheim mengenai masyarakat adalah sesuatu yang hidup, masyarakat berpikir dan bertingkah laku dihadapkan kepada gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah berada di luar individu. Fakta sosial yang berada di luar individu memiliki kekuatan untuk memaksa. Pada awalnya, fakta sosial berasal dari pikiran atau tingkah laku individu, namun terdapat pula pikiran dan tingkah laku yang sama dari individu-individu yang lain, sehingga menjadi tingkah laku dan pikiran masyarakat, yang pada akhirnya menjadi fakta sosial. Fakta sosial yang merupakan gejala umum ini sifatnya kolektif, disebabkan oleh sesuatu yang dipaksakan pada tiap-tiap individu.

Dalam masyarakat, manusia hidup bersama dan berinteraksi, sehingga timbul rasa kebersamaan diantar mereka. Rasa kebersamaan ini milik masyarakat yang secara sadar menimbulkan perasaan kolektif. Selanjutnya, perasaan kolektif yang merupakan akibat (resultant) dari kebersamaan, merupakan hasil aksi dan reaksi di antara kesadaran individual. Jika setiap kesadaran individual itu menggemakan perasaan kolektif, hal itu bersumber dari dorongan khusus yang

berasal dari perasaan kolektif tersebut.

Pada saat solidaritas mekanik memainkan peranannya, kepribadian tiap individu boleh dikatakan lenyap, karena ia bukanlah diri individu lagi, melainkan hanya sekedar makhluk kolektif. Jadi masing-masing individu diserap dalam kepribadian kolektif.

Argumentasi Durkheim, diantaranya pada kesadaran kolektif yang berlainan dengan dari kesadaran individual terlihat pada tingkah laku kelompok. Bilamana orang berkumpul untuk berdemonstrasi politik, huru-hara rasial atau untuk menonton sepakbola, gotong royong dan sebagainya, mereka melakukan hal-hal yang tidak mungkin mereka lakukan jika sendirian. Orang melakukan perusakan dan merampok toko-toko, menjungkirbalikan mobil, atau menunjukkan sikap kepahlawanan, kegiatan religius, semangat pengorbanan yang luar biasa, semuanya dianggap musatahil oleh yang bersangkutan.

Masyarakat bukanlah sekedar wadah untuk terwujudnya integrasi sosial yang akan mendukung solidaritas sosial, melainkan juga pangkal dari kesadaran kolektif dan sasaran utama dari perbuatan moral. Moralitas merupakan suatu keinginan yang rasional. Jadi perbuatan moral bukanlah sekedar "kewajiban" yang tumbuh dari dalam diri melainkan juga "kebaikan" ketika diri telah dihadapkan dengan dunia sosial. Setiap individu yang melakukan pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma kolektif timbul rasa bersalah dan ketegangan dalam batin. Nilai-nilai itu sudah merasuk dalam batin dan memaksa individu, sekalipun pemaksaannya tidak langsung dirasakan karena proses

pembatiran itu untuk menyesuaikan diri.

Moralitas mempunyai keterikatan yang erat dengan keteraturan perbuatan dan otoritas. Suatu tindakan bisa disebut moral, kalau tindakan itu tidak menyalahi kebiasaan yang diterima dan didukung oleh sistem kewenangan otoritas sosial yang berlaku, juga demi keterikatan pada kelompok. Jadi, keseluruhan kepercayaan dan perasaan umum di kalangan anggota masyarakat membentuk sebuah sistem tertentu yang berciri khas, sistem itu dinamakan hati nurani kolektif atau hati nurani umum.

Solidaritas mekanik tidak hanya terdiri dari ketentuan yang umum dan tidak menentu dari individu pada kelompok, kenyataannya dorongan kolektif terdapat dimana-mana, dan membawa hasil dimana-mana pula. Dengan sendirinya, setiap kali dorongan itu berlangsung, maka kehendak semua orang bergerak secara spontan dan seperasaan. Terdapat daya kekuatan sosial yang hakiki yang berdasarkan atas kesamaan-kesamaan sosial, tujuannya untuk memelihara kesatuan sosial. Hal inilah yang diungkapkan oleh hukum bersifat represif (menekan). Pelanggaran yang dilakukan individu menimbulkan reaksi terhadap kesadaran kolektif, terdapat suatu penolakan karena tidak searah dengan tindakan kolektif. Tindakan ini dapat digambarkan, misalnya tindakan yang secara langsung mengungkapkan ketidaksamaan yang menyolok dengan orang yang melakukannya dengan tipe kolektif, atau tindakan-tindakan itu melanggar organ hati nurani umum.

2. Solidaritas Sosial Organik

Solidaritas organik berasal dari semakin terdiferensiasi dan kompleksitas dalam pembagian kerja yang menyertai perkembangan sosial. Durkheim merumuskan gejala pembagian kerja sebagai manifestasi dan konsekuensi perubahan dalam nilai-nilai sosial yang bersifat umum. Titik tolak perubahan tersebut berasal dari revolusi industri yang meluas dan sangat pesat dalam masyarakat. Menurutnya, perkembangan tersebut tidak menimbulkan adanya disintegrasi dalam masyarakat, melainkan dasar integrasi sosial sedang mengalami perubahan ke satu bentuk solidaritas yang baru, yaitu solidaritas organik. Bentuk ini benar-benar didasarkan pada saling ketergantungan di antara bagian-bagian yang terspesialisasi.

Kesadaran kolektif pada masyarakat mekanik paling kuat perkembangannya pada masyarakat sederhana, dimana semua anggota pada dasarnya memiliki kepercayaan bersama, pandangan, nilai, dan semuanya memiliki gaya hidup yang kira-kira sama. Pembagian kerja masih relatif rendah, tidak menghasilkan heterogenitas yang tinggi, karena belum pluralnya masyarakat. Lain halnya pada masyarakat organik, yang merupakan tipe masyarakat yang pluralistik, orang merasa lebih bebas. Penghargaan baru terhadap kebebasan, bakat, prestasi, dan karir individual menjadi dasar masyarakat pluralistik. Kesadaran kolektif perlahan-lahan mulai hilang. Pekerjaan orang menjadi lebih terspesialisasi dan tidak sama lagi, merasa dirinya semakin berbeda dalam kepercayaan, pendapat, dan juga gaya hidup. Pengalaman orang menjadi semakin beragam, demi-

kian pula kepercayaan, sikap, dan kesadaran pada umumnya.

Heterogenitas yang semakin beragam ini tidak menghancurkan solidaritas sosial. Sebaliknya, karena pembagian kerja semakin tinggi, individu dan kelompok dalam masyarakat merasa semakin tergantung kepada pihak lain yang berbeda pekerjaan dan spesialisasinya. Peningkatan terjadi secara bertahap, saling ketergantungan fungsional antar pelbagai bagian masyarakat yang heterogen itu mengakibatkan terjadi suatu pegeseran dalam tata nilai masyarakat, sehingga menimbulkan kesadaran individu baru. Bukan pembagian kerja yang mendahului kebangkitan individu, melainkan sebaliknya perubahan dalam diri individu, di bawah pengaruh proses sosial mengakibatkan pembagian kerja semakin terdiferensiasi.

Kesadaran baru yang mendasari masyarakat modern lebih berpangkal pada individu yang mulai mengidentifikasi dirinya dengan kelompok yang lebih terbatas dalam masyarakat dan mereka tetap mempunyai kesadaran kolektif yang terbatas pada kelompoknya saja, contohnya yang sesuai dengan pekerjaannya saja. Corak kesadaran kolektif lebih bersifat abstrak dan universal. Mereka membentuk solidaritas dalam kelompok-kelompok kecil, yang dapat bersifat mekanik.

Terjadinya perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya pembagian kerja dan kompleksitas sosial, dapat juga dilihat sebagai perkembangan evolusi model linier (Lawang, 1986: 188). Kecenderungan sejarah pada umumnya dalam masyarakat Barat adalah

ke arah bertambahnya spesialisasi dan kompleksitas dalam pembagian kerja. Perkembangan ini mempunyai dua akibat penting. Pertama, dia merombak kesadaran kolektif yang memungkinkan berkembangnya individualitas. Kedua, dia meningkatkan solidaritas organik yang didasarkan pada saling ketergantungan fungsional. Durkheim melihat masyarakat industri kota yang modern ini sebagai perwujudan yang paling penuh dari solidaritas organik.

Ikatan yang mempersatukan individu pada solidaritas mekanik adalah adanya kesadaran kolektif. Kepribadian individu diserap sebagai kepribadian kolektif sehingga individu saling menyerupai satu sama lain. Pada solidaritas organik, ditandai oleh heterogenitas dan individualitas yang semakin tinggi, bahwa individu berbeda satu sama lain. Masing-masing pribadi mempunyai ruang gerak tersendiri untuk dirinya, dimana solidaritas organik mengakui adanya kepribadian masing-masing orang. Karena sudah terspesialisasi dan bersifat individualistis, maka kesadaran kolektif semakin kurang. Integrasi sosial akan terancam jika kepentingan-kepentingan individu atau kelompok merugikan masyarakat secara keseluruhan dan kemungkinan konflik dapat terjadi.

Kita dapat membandingkan sifat-sifat pokok dari masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik dengan solidaritas organik.

SOLIDARITAS MEKANIK	SOLIDARITAS ORGANIK
Pembagian kerja rendah	Pembagian kerja tinggi
Kesadaran kolektif kuat	Kesadaran kolektif rendah

SOLIDARITAS MEKANIK	SOLIDARITAS ORGANIK
Hukum represif dominan	Hukum restitutif dominan
Individualisme rendah	Individualiasme tinggi
Secara relatif saling ketergantungan rendah	Saling ketergantungan yang tinggi
Konsensus terhadap pola-pola normatif penting	Konsensus pada nilai-nilai abstrak, dan umum penting
Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang.	Badan-badan kontrol yang menghukum orang yang menyimpang.
Bersifat primitif atau pedesaan	Bersifat insdustrial-perkotaan

Disini Durkheim mengkaji masyarakat ideal berdasarkan konsep solidaritas sosial. Solidaritas sosial menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan solidaritas sosial menurutnya lebih mendasar dari pada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional.

4.1.2.2 Teori Bunuh Diri (*Suicide*)

Dalam karyanya yang populer *Le Suicide* (1897), dikemukakan dengan jelas hubungan antara integrasi sosial terhadap kecenderungan untuk melakukan bunuh diri (*suicide*). Durkheim melihat bunuh diri sebagai tindakan individu dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sosial. Dengan membandingkan data statistik diri masyarakat yang berbeda-beda. Ia menunjukkan bahwa ada keteraturan dalam pola-pola bunuh diri. Di sini Durkheim menolak adanya serangkaian anggapan bahwa bunuh diri di sebabkan oleh penyakit kejiwaan,

imitasi, atau peniruan, iklim, alkoholisme, kemiskinan, dan juga adanya pengaruh ras tertentu yang memiliki kecenderungan melakukan bunuh diri.

Sebagai perintis dalam pendekatan statistik sosial Durkheim menemukan bahwa tingkat bunuh diri dan karakteristik lain dari banyak kelompok. Durkheim menyimpulkan bahwa ada benar-benar perbedaan jenis bunuh diri. Misalnya, bunuh diri egoistik lebih sering pada kelompok dengan ikatan sosial yang lemah (misalnya, negara-negara dengan nilai-nilai agama yang menekankan individualisme) dan bunuh diri altruistik lebih sering pada kelompok dengan ikatan sosial yang sangat kuat (misalnya, militer). Dalam studinya itu, Durkheim bermaksud untuk menyelidiki sampai sejauh mana dan bagaimana individu-individu dalam masyarakat modern masih tergantung dan berada dibawah pengaruh masyarakat. Dalam kajian tersebut, Durkheim merumuskan empat tipe bunuh diri yaitu:

1. Bunuh Diri *Egoistic*

Yaitu suatu tindakan bunuh diri karena merasa kepentingan individu lebih tinggi dari pada kepentingan kesatuan sosialnya. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadinya sebagaimana yang diharapkan, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan bunuh diri. Kondisi egoistik dapat menjadi semakin menguat jika terjadi penurunan dalam intensitas interaksi sosialnya. Karena sikap seseorang yang tidak berinteraksi dengan kelompoknya dan memilih untuk menyendiri dari kehidupan sekeliling. Sedangkan kehidupan sekelilingnya berinteraksi dengan dirinya.

Kelompok yang dimaksudkan disini adalah tempat untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan yang lainnya, baik yang terjadi pada keluarga,teman-teman, maupun masyarakat secara luas.

Di sini Durkheim mengkaji bunuh diri dalam kesatuan agama dan kesatuan keluarga. Durkheim melihat fakta sosial ini memiliki hubungan dengan agama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingginya laju bunuh diri di kalangan Protestan disebabkan oleh integrasi sosial yang rendah dibandingkan dengan ajaran Katolik. Padahal, pada dasarnya kedua agama ini melarang melakukan bunuh diri, hanya saja perbedaanya terletak pada kebebasan para penganutnya. Penganut agama Protestan lebih bebas dalam mencari sendiri hakikat ajaran kitab suci, tanpa ditentukan oleh para pemuka gereja sebagaimana yang ditempuh oleh Katolik. Atas kebebasan itu, kepercayaan bersama menjadi berkurang sehingga timbul keadaan tidak adanya kepercayaan bersama dan secara langsung akan berpengaruh terhadap integrasi sosial diantara penganutnya.

Temuan Durkheim tentang hubungan integrasi sosial dalam agama dengan kecenderungan bunuh diri dalam kesatuan keluarga. Dalam kajiannya itu, ia menolak anggapan bahwa bunuh diri lebih cenderung dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga atau sudah menikah, dibandingkan dengan mereka yang belum berkeluarga atau yang belum menikah. Bantahan itu didukung oleh bukti bahwa jumlah angka bunuh diri dari orang-orang yang bunuh diri melibatkan anak-anak dalam usia 0-16 tahun yang pada umumnya terintegrasi dengan kuat dalam keluarganya. Durkheim

menyimpulkan bahwa angka bunuh diri lebih besar ditemukan pada mereka yang belum menikah daripada mereka yang sudah menikah. Lantas apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Perseolan ini terletak pada masalah integrasi sosial dalam keluarga. Kesatuan keluarga yang lebih besar pada umumnya akan lebih terintegrasi, sehingga angka bunuh diri relatif rendah. Durkheim mengatakan bahwa semakin kecil jumlah anggota keluarga, maka akan semakin kecil pula keinginan atau harapan untuk terus hidup. (Siahaan, 1986)

Fakta lainnya yang dapat kita temukan berkenaan dengan contoh kasus yang dikemukakan oleh Durkheim yakni fenomena bunuh diri di era yang semakin mengarah kepada nuansa individualistik ini. Sebagai contoh, pelajar bunuh diri karena tidak lulus Ujian Akhir Nasional (UAN). Pada kondisi seperti ini, pelajar atau siswa merasa diri sebagai anak yang tidak berhasil dan menganggapnya sebagai aib keluarga atau lingkungan sekitarnya, sehingga kemudian ia menyendiri. Dalam kesendiriannya itulah ia merasa dirinya tidak berguna dan tidak dibutuhkan, sehingga bunuh diri adalah jalan terbaik. Lazimnya, tipe bunuh diri seperti ini didasari oleh sikap *introvert*, yakni sikap yang tidak terbuka kepada orang lain, sehingga akan menyebabkan perasaan terasing dari masyarakat dan akan menyebabkan orang tersebut untuk memikirkan dan mengusahakan kebutuhannya sendiri tanpa memerhatikan kebutuhan maupun bantuan dari orang lain ataupun masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan contoh kasus tentang faktor bunuh diri dapat ditarik kesimpulan teoretik bahwa semakin rendah ikatan

solidaritas (*egoistic*) dalam suatu agregat tertentu, maka akan semakin tinggi pula angka bunuh diri.

2. Bunuh Diri *Altruism*

Kalau tipe bunuh diri yang pertama disebabkan oleh kurangnya integrasi dengan kelompoknya, maka tipe bunuh diri yang satu ini justru merupakan kebalikan dari tipe bunuh dari *egoistik*. Dengan adanya perasaan integrasi antara sesama individu yang satu dengan yang lain, maka menciptakan masyarakat yang memiliki integrasi yang kuat. menurut mereka harus mengorbankan diri mereka, maka tentu saja mereka tidak mempunyai pilihan lain selain melakukannya. Atas dasar integrasi yang kuat inilah menyebabkan rasa, sikap dan perilaku individualisme anggota kelompok dipandang, tidak layak, tidak penting, bahkan tidak pantas dalam kedudukannya sebagai individu.

Bunuh diri yang demikian ini merasa kepentingan kelompok atau masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Sebagai contoh, bunuh diri Hara Kiri yang dilakukan oleh orang-orang Jepang dan bunuh diri yang dilakukan oleh anggota militer demi membela negara. Untuk contoh kasus di Indonesia, kita dapat melihat tragedi Bom Bali yang mana dalam analisis kasusnya merupakan bom bunuh diri. Dalam hal ini terdapat organisasi yang mempunyai misi untuk melakukan pengeboman tersebut. Oleh karena kuatnya ikatan sosial dalam organisasi tersebut, maka salah satu dari anggota kelompok tersebut rela mengorbankan dirinya demi tercapainya tujuan kelompok.

3. **Bunuh Diri *Anomie***

Tipe bunuh diri yang satu ini lebih terfokus pada keadaan moral di mana individu yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya. Secara moral, nilai-nilai yang semula menjadi dasar motivasi dalam berperilaku, kemudian tidak lagi berpengaruh. Pada kondisi yang seperti ini, dapat menimbulkan keguncangan dan kebimbangan pada diri seseorang. Keadaan anomie ini dapat melanda seluruh masyarakat ketika terjadi perubahan sosial, politik, hukum, dan budaya pada masyarakat secara revolusioner. Kondisi demikian, di lain pihak masyarakat belum sepenuhnya menerima perubahan karena nilai-nilai lama pada masyarakat belum begitu pahami, sementara nilai-nilai yang baru belum jelas. Dalam situasi yang demikian inilah seseorang akan merasa gamang, bimbang, bahkan tanpa arah dan tujuan hidup, sehingga menyebabkan jalan pintas untuk memilih bunuh diri.

4. **Bunuh diri *Fatalistic***

Tipe bunuh diri yang demikian ini tidak begitu banyak dibahas oleh Durkheim. Pada tipe bunuh diri anomie terjadi dalam situasi di mana nilai dan norma yang berlaku di masyarakat melemah, lain halnya pada bunuh diri fatalistik. Ini terjadi ketika nilai norma yang berlaku di masyarakat meningkat dan terasa berlebihan, sehingga menyebabkan individu ataupun kelompok merasa ter-pressure oleh nilai dan norma dalam masyarakat. Durkheim menggambarkan seseorang yang melakukan bunuh diri fatalistik seperti seseorang

yang masa depannya telah tertutup dan nafsu yang tertahan oleh nilai dan norma yang menindas, sebagai contoh pada masyarakat budak.

4.1.2.3 Teori Asal Usul Agama

Dalam karya Emile Durkheim, agama yaitu fakta sosial non-material menempati posisi yang jauh lebih sentral, dalam karya ini membahas masyarakat primitif untuk menemukan akar agama. Durkheim yakin bahwa ia akan dapat secara lebih baik untuk menemukan akar agamaitu dengan cara membandingkan masyarakat primitive yang sederhana ketimbang didalam masyarakat modern yang kompleks. Temuannya adalah bahwa sumber agama adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menentukan bahwa sesuatu itu bersifat sacral dan yang lain itu bersifat profan, khususnya kasus yang disebut totenisme. Dalam agama primitif (*totenisme*) ini benda-benda seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang didewakan. Selanjutnya totenisme dilihat dari tipe khusus fakta sosial nonmaterial, sebagai bentuk kesadaran kolektif. Akhirnya Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat dan agama atau lebih umum lagi, kesatuan kolektif adalah satu dan sama. Agama adalah cara masyarakat memperlihatkan dirinya sendiri dalam bentuk fakta sosial nonmaterial. Sedikitnya banyak Durkheim tampak mendewakan masyarakat dan produk-produk utamanya.

1. Agama dan Masyarakat.

The Elementary forms on The Religious Life (1912) adalah karyanya yang mengulas secara mendalam tentang hal itu. Ia menyadari sepenuhnya bahwa agama

merupakan fenomena sosial. Durkheim mendefinisikan agama sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Kepercayaan dan praktik tersebut menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Berdasarkan definisi yang dikemukakan tersebut terdapat dua unsure yang penting sebagai syarat sesuatu dapat disebut agama, yaitu adanya sifat kudus, suci, sacral (*sacred*) dari agama dan praktik-praktik ritual dari agama. Agama tidak harus melibatkan adanya konsep mengenai suatu makhluk supranatural, tetapi tidak bisa melepaskan kedua unsure di atas, karena ia akan menjadi bukan agama lagi ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi. Dengan adanya agama dalam masyarakat maka dapat dibedakan antara hal-hal yang sakral dan hal-hal yang tidak sacral, biasa, dan duniawi (*profane*).

Jika dikolaborasi lebih lanjut definisi agama menurut Durheim, maka ditemukan makna bahwa sesuatu itu disebut agama bukan dilihat dari substansi isinya, melainkan dari bentuknya, yang meliputi dua cirri tersebut tadi. Untuk memahami lebih jauh tentang kedua hal yang dimaksud, berikut ini diuraikan sifat kudus dari agama dan praktik ritual agama, kemudian dilanjut pada pandangan Durheim bahwa agama selalu memiliki hubungan dengan masyarakat.

a. Sifat Kudus Dari Agama

Sifat kudus dari agama yang dimaksud Durheim disini bukanlah makna yang teologis melainkan sosiologis. Sifat kudus tersebut dapat diartikan bahwa

sesuatu yang kudus itu dikelilingi oleh ketentuan-ketentuan tata cara keagamaan dan larangan-larangan, yang memaksa pemisahan radikal dari yang duniawi. Sifat kudus ini dibayangkan suatu kesatuan yang berada diatas segala-galanya. Durheim menghubungkan lahirnya pengkudusan dengan perkembangan masyarakat.

Di dalam totemisme, ada tiga obyek yang dianggap kudus, yaitu totem, lambing totem, dan para anggota suku itu sendiri. Pada totemisme Australia, suatu (benda) yang berada dalam semesta dianggap sebagai bagian dari kelompok totem tertentu, dan olehnya itu memiliki tempat tertentu didalam organisasi masyarakat. Dengan demikian, semua benda dalam totemisme Australia memiliki sifat yang kudus. Dan pada totemisme Australia tersebut tidak ada pemilahan yang jelas antara objek-objek totem dengan kekuatan kudusnya.

Pada dunia modern dengan mrlitas rasionalnya pun tidak menghilangkan sifat kudus dari pada moralitasnya sendiri. Cirri khas yang sama, yaitu kekudusan, tetap terdapat pada moralitas rasionalnya. Ini terlihat dari rasa hormat dan perasaan yang tidak dapat diganggu-gugat yang diberikan oleh masyarakat kepada moralitas rasionalnya. Sebuah aturan moral hanya dapat hidup jika ia memiliki sifat kudus, sehingga setiap upaya untuk menghilangkan sifat kudus dari moralitas akan menjurus kepada penolakan dari setiap bentuk moral. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekudusan pun merupakan prasyarat (prerequisite) bagi suatu aturan moral untuk dapat hidup dimasyarakat. Kekudusan suatu obyek tidak tergantung pada sifat-sifat objek itu semata, melainkan ditentukan pada pemberian sifat

kudus oleh masyarakatnya sendiri.

b. Praktik Ritual Agama

Di samping melibatkan sifat-sifat kudus dalam suatu agama, praktik ritual pun menjadi suatu hal yang selalu mengiringi agama sebagai suatu fenomena sosial. Tentu saja praktik ritual ini ditentukan oleh suatu bentuk lembaga yang jelas dan pasti. Terdapat dua jenis praktik ritual yang saling berhubungan era satu sama lain, *pertama*: praktik ritual yang negatif. Praktik ini terwujud dari bentuk pantangan-pantangan atau larangan-larangan dalam suatu ritual keagamaan. Upacara-upacara atau ritual yang negatif berfungsi untuk membatasi antara yang kudus dan duniawi. Dari pemisahan inilah yang merupakan dasar dari eksistensi kudus itu sendiri. Praktik ini menjamin agar kedua dunia (sacral dan profan) tidak saling mengganggu. Seseorang yang selalu taat terhadap praktik negatif ini berarti ia telah menyucikan dan mempersiapkan dirinya untuk masuk kedalam lingkungan yang kudus.

Kedua, praktik ritual yang positif. Ritual ini terimple-
masikan dalam bentuk upacara-upacara keagamaan, dan inilah yang merupakan intinya. Adapun bentuk prakti-
praktik ritual yang positif adalah upacara keagamaan itu sendiri, yang dimaksudkan untuk menyatukan diri dengan keimanan secara lebih khusyuk, sehingga berfungsi untuk memperbarui tanggung jawab seseorang terhadap ideal-ideal keagamaan. Dengan demikian, tampak bahwa agama dan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Kendati demikian, perlu digaris bawahi bahwa dari kedua hubungan hal tersebut

tidak mengimplikasikan pengertian bahwa agama menciptakan masyarakat. Melainkan sekedar cerminan atau gambaran bahwa agama merupakan implikasi dari perkembangan masyarakat. Dalam artian bahwa agama menurut Durheim adalah sebuah fakta sosial yang penjelasannya perlu dijelaskan lebih lanjut oleh fakta-fakta sosial lainnya.

4.2 Max Weber (1864-1920)

4.2.1 Biografi Singkat

Max Weber seorang sosiolog modern kelahiran Efrut, Jerman, 21 April 1864. Nama lengkapnya Maxilian Weber. Berasal dari keluarga menengah ke atas. Kedua orang tuanya memiliki latar belakang dan kecenderungan berbeda, dan itu membentuk karakter pemikiran Weber. Ayahnya politikus kaya, ibunya calvinis saleh. Saat usia 16 tahun, Weber belajar di universitas Heilderberg. Saat perang dunia I, Weber ikut dinas militer. Tahun 1884 kembali kuliah di universitas Berlin. Setelah 8 tahun, lulus, menjadi pengacara dan pengajar di universitas.

Minat Weber berubah ke sosiologi dan ekonomi. Weber lalu mengalami fase gila kerja, yang mengantarkannya menjadi professor ekonomi di universitas Herlburg di tahun 1896. Tahun 1893 dia menikah dengan seorang perempuan bernama Marianne Schnitger. Tahun 1897 ayahnya meninggal dunia. Tak



lama kemudian Weber mengalami gangguan syaraf. Baru ditahun 1904 ia pulih dan kembali aktif di dunia akademis, hingga pada akhirnya meninggal dunia pada 14 Juni 1920 akibat sakit pneumonia.

Selain menulis buku dan menjadi dosen, Weber juga membantu mendirikan *German Sociological Society* ditahun 1910, konsultan dan peneliti. Rumahnya dijadikan pertemuan pakar berbagai cabang ilmu seperti Georg Simmel, Alfred maupun Georg Lukacs. Weber hidup dimasa pertumbuhan kapitalisme modern, ketika kapitalisme telah berkembang jauh dan menunjukkan eksistensi bentuk dan pola produksi yang telah berubah dengan bentuk awal yang diperhatikan Karl Marx.

4.2.2 Pokok-Pokok Pemikiran

4.2.2.1 Etika Protestan

Membicarakan terbitan karya Webber, kita segera dibanjiri oleh beraneka ragam persoalan sosiologi agama, sejarah dan hukum zaman pertengahan dan kuno, sosiologi music ("*The History of Piano*"), tindakan, perkotaan, metodologi, charisma ... Benang merahnya adalah perhatian Webber terhadap kebudayaan, atau bagaimana kita hidup, beserta rasionalisasinya. Karya Webber terpenting dan paling controversial disini adalah *The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904-5). Bertolak belakang dengan teks yang berat dan kering seperti *Economi and Society* (terjemah inggris 1968), dalam karyanya yang ini ia sangat refleksif dan lincah. Essay Webber ini acap kali dituduh sebagai uraian mengenai agama secara sempit, atau sebagai metanarasi mengenai ideology serta pentingnya ide-ide

dalam kehidupan sosial. Sedikit sekali proposisi yang berupaya memahami tujuan Webber, yang bermaksud membahas persoalan rasionalitas dan rasionalisasi kebudayaan. Jikalau Marx menganggap komodifikasi sebagai kecenderungan utama dalam modernitas, sedangkan Webber mengarahkan perhatian pada kecenderungan kalkulasi universal, yang dilandasi oleh rasionalisasi, memudarnya pesona (disenchantment) atau demagifikasi kehidupan sehari-hari (Webber 1904)

Serupa dengan Marx dan Durkheim, Webber mengambil posisi menentang utilitarian atau kultus terhadap manfaat (Utility), yang hendak menggantikan segala pertimbangan mengenai kualitas dengan kuantitas (Seidman 1983). Webber menganggap rasionalisasi sebagai proses yang tidak mungkin ditawarkan, tetapi sifatnya ambivalen (Lowith 1982). Sebagaimana ia nyatakan kemudian, warga modernitas memerlukan birokrasi, keadilan, legalitas dan administrasi, namun kesemuanya itu, pada gilirannya, justru menguasai kita. Namun demikian Webber tidak mengkonstruksi teorinya menurut sistem birokratis. Dalam bentuk maupun isinya, metode Webber bersifat esaisistik. Karyanya tidak bertele-tele menghimpin sejumlah besar bukti empiris dan tidak pula sistematis seperti Kapitalismenya Marx. Pendekatan Webber dalam pengetahuan lebih bersifat uraian bebas, dalam cara yang hermeneutis, ia memasukkan contoh-contoh teladan, tokoh-tokoh sejarah seperti Franklin dan Baxter, untuk menggambarkan pendapat bahwa bersamaan dengan kapitalisme munculah cara hidup baru atau lebih tepatnya, kapitalisme lahir bersama cara hidup yang

baru, rasional dan kalkulatif.

Calvinisme mendorong asketisisme, pengumpulan kekayaan demi memperoleh perkenan tuhan yang lebih besar, dan bukan demi kemewahan duniawi. Akumulasi modal ini memungkinkan demi terjadinya transisi dari feodalisme menuju kapitalisme. Kini logika pengejaran kekayaan duniawi demi Tuhan itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jika agama membantu lahirnya kapitalisme, sedangkan kapitalisme sendiri segera mulai menghancurkan agama. Webber mengutip Goethe: asketisisme sebenarnya hendak mengupayakan kebaikan, tapi akhirnya menciptakan kejahatan (Webber 1904-5: 172) dan itulah tema yang tampil dan di bahas sepanjang karyanya. Penalaran Hegelian yang cerdas atau ironi sejarah, atau sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita sebut dengan perasaan getir sebagai konsekuensi tak di sengaja. Rasionalitas kapitalis menciptakan kosmos yang cukup diri dan berdiri sendiri., sampai batas dimana warganya lantas melupakan kemajemukan rasionalitas.

Dalam *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Weber mengajukan tesis bahwa etika dan pemikiran Puritan memengaruhi perkembangan kapitalisme. Bukti keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan duniawi, termasuk pengejaran ekonomi. Mengapa hal ini tidak terjadi dalam Protestanisme? Weber menjelaskan paradoks tersebut dalam esainya.

Ia mendefinisikan “semangat kapitalisme” sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran yang rasional terhadap keuntungan ekonomi. Di antara kecenderungan-kecenderungan yang diidentifikasi

oleh Weber adalah keserakahan akan keuntungan dengan upaya yang minimum, gagasan bahwa kerja adalah kutukan dan beban yang harus dihindari, khususnya apabila hal itu melampaui apa yang secukupnya dibutuhkan untuk hidup yang sederhana. Agar suatu cara hidup yang teradaptasi dengan baik dengan ciri-ciri khusus kapitalisme, demikian Weber menulis, dapat mendominasi yang lainnya, hidup itu harus dimulai di suatu tempat, dan bukan dalam diri individu yang terisolasi semata, melainkan sebagai suatu cara hidup yang lazim bagi keseluruhan kelompok manusia”

Setelah mendefinisikan semangat kapitalisme, Weber berpendapat bahwa ada banyak alasan untuk mencari asal-usulnya di dalam gagasan-gagasan keagamaan dari Reformasi. Banyak pengamat seperti William Petty, Montesquieu, Henry Thomas Buckle, John Keats, dan lain-lainnya yang telah berkomentar tentang hubungan yang dekat antara Protestanisme dengan perkembangan semangat perdagangan.

Weber menunjukkan bahwa tipe-tipe Protestanisme tertentu mendukung pengejaran rasional akan keuntungan ekonomi dan aktivitas duniawi yang telah diberikan arti rohani dan moral yang positif. Ini bukanlah tujuan dari ide-ide keagamaan, melainkan lebih merupakan sebuah produk sampingan-logika turunan dari doktrin-doktrin tersebut dan saran yang didasarkan pada pemikiran mereka yang secara langsung dan tidak langsung mendorong perencanaan dan penyangkalan diri dalam pengejaran keuntungan ekonomi.

4.2.2.2 Teori Proses Rasionalisasi

Marx pada dasarnya mengemukakan teori kapitalisme, sedangkan karya Webber pada dasarnya adalah teori tentang proses rasionalisasi (Brubaker, 1984; Kalberg, 1980,1990,1994). Webber tertarik pada masalah umum seperti mengapa intuisi sosial di dunia barat berkembang semakin rasional sedangkan rintangan kuat tampaknya mencegah perkembangan serupa di belahan bumi lain. Meski konsep rasionalitas digunakan dengan berbagai cara yang berlainan. Dalam karya Webber, yang menjadi sasaran perhatian kita disini adalah salah satu dari empat jenis proses yang diidentifikasi oleh Karlberg (1990, 1994) yakni *rasionalitas formal*. Rasionalitas formal meliputi proses berfikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Dalam hal ini pilihan dibuat dengan merujuk kepada kebiasaan, peraturan, dan hukum yang diterapkan secara universal. Ketiganya berasal dari berbagai struktur berskala besar. Terutama struktur birokrasi dan ekonomi. Webber mengembangkan teorinya dalam konteks studi perbandingan sejarah masyarakat Barat, Cina, India, dan berbagai masyarakat lainnya. Dalam studi ini ia mencoba melukiskan faktor yang membantu mendorong atau merintanggi perkembangan rasionalisasi.

Webber memasukkan diskusinya mengenai proses birokratisasi kedalam diskusi yang lebih luas tentang lembaga politik. Ia membedakan antara tiga jenis system otoritas, tradisional, karismatik, dan rasional-legal. System otoritas rasional- legal hanya dapat berkembang penuh. Masyarakat lain didunia tetap disominasi

oleh system otoritas tradisional atau karismatik yang umumnya merintang perkembangan system hokum rasional dan birokrasi modern. Singkatnya, system otoritas tradisional berasal dari system kepercayaan di Yunani kuno. Contohnya adalah seseorang pemimpin yang berkuasa karena garis keluarga atau sukunya selalu merupakan pemimpin kelompok. Pemimpin karismatik mendapat otoritasnya dari kemampuan atau ciri-ciri luar biasa, atau mungkin dari keyakinan pihak pengikut bahwa pemimpin itu memang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Meski kedua jenis otoritasnya itu mempunyai arti penting di masa lalu, Weber yakin bahwa masyarakat Barat, akan akhirnya berkembang menuju system otoritas rasional-legal. Dalam system otoritas semacam ini, otoritas berasal dari peraturan yang diberlakukan secara hokum dan rasional. Jadi, presiden Amerika memperoleh otoritasnya yang tertinggi dari peraturan hukum masyarakat. Evolusi otoritas hukum rasional diiringi evolusi birokrasinya hanyalah merupakan sebagian dari argument umum Weber tentang rasionalisasi masyarakat Barat.

Weber juga membuat analisis rinci dan canggih tentang rasionalisasi fenomena seperti agama, hukum, kota, dan bahkan musik. Kita dapat melukiskan cara berfikir Weber dengan salah satu contoh lain rasionalisasi institusi ekonomi. Diskusi ini tertuang dalam analisis Weber yang lebih luas dengan hubungan antara hukum-hukum dan kapitalisme. Weber berupaya memahami mengapa system ekonomi rasional (kapitalis) berkembang di Barat dan mengapa gagal berkembang di masyarakat lain di luar masyarakat

Barat. Dalam studi ini Webber mengakui peran central agama.

4.2.2.3 Penerimaan Teori Webber

Salah satu alasan diterimanya teori Webber ini adalah karena teori Webber terbukti secara politik lebih mudah diterima ketimbang radikalisme Marxian. Webber lebih berpandangan liberal terhadap masalah tertentu dan konservatif terhadap masalah lain (misalnya, tentang peran negara). Meskipun Webber mengakui kecaman keras terhadap berbagai aspek masyarakat kapitalis modern, dan ia sampai pada kesimpulan penting yang sama dengan Marx, tapi ia tidak menganjurkan cara penyelesaian masalah secara radikal yang ditawarkan oleh kebanyakan Marxis dan sosiolog lain lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Yang disukai dari Webber adalah cara ia menyajikan pendapatnya. Ia menghabiskan sebagian besar dari usianya untuk mempelajari sejarah secara rinci dan kesimpulan politis yang di buatnya selalu dalam konteks risetnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang disajikan sangat ilmiah dan akademis. Marx meski juga melakukan riset yang serius, menulis banyak materi yang mengundang polemik. Juga kebanyakan karya akademisnya direnda dengan pertimbangan politis. Misalnya, dalam *The Capital*(1867/1967) ia melukiskan kapitalis sebagai “vampir” dan “serigala rakus”. Gaya Webber yang lebih akademis membantu membuatnya lebih dapat diterima oleh sosiolog selanjutnya.

Alasan lain yang membuat Webber lebih dapat di terima adalah karena ia bekerja menurut tradisi filsafat

yang juga membentuk karya sosiolog yang kemudian. Webber berkarya menurut tradisi filsafat Kant yang antara lain berarti bahwa ia cenderung berpikir dalam hubungan sebab-akibat. Cara berpikir ini lebih dapat diterima oleh sosiolog yang kemudian, yang sebagian besar tak akrab dan tak menyayangi logika dialektika yang ditunjukkan karya Marx. Terakhir, Webber lebih tampil dengan menawarkan pendekatan terhadap kehidupan sosial yang lebih jauh bervariasi ketimbang Marx.

4.3 Diskusi

Marx (1864-1920) pada dasarnya mengemukakan teori kapitalisme. Salah satu alasan diterimanya teori Webber ini adalah karena teori Webber terbukti secara politik lebih mudah diterima ketimbang radikalisme Marxian. Webber lebih berpandangan liberal terhadap masalah tertentu dan konservatif terhadap masalah lain (misalnya, tentang peran negara). Sedangkan konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim (1858-1917) dalam mengembangkan teori sosiologi, Durkheim (dalam Lawang, 1994) menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Bagaimana peranan dan kontribusi Marx Weber dan Durkheim dalam sosiologi agama?

BAB 5

TOKOH-TOKOH LAIN SOSIOLOGI AGAMA

Sedangkan embrio minat mempelajari fenomena agama dalam masyarakat mulai tumbuh sekitar pertengahan abad ke-19 oleh sejumlah sarjana Barat terkenal seperti *Edward B. Tylor* (1832-1917), *Herbert Spencer* (1820-1903), *Frederich H. Muller* (1823-1917), *James G. Fraser* (1854-1941). Tokoh-tokoh ini lebih tertarik pada agama-agama primitif, namun kajian ilmiah tentang agama relatif mulai sekitar tahun 1900. Sejak saat itu hingga menjelang munculnya buku-buku sosiologi agama, disebut juga Sosiologi Agama Klasik.

5.1 *Edward B. Tylor* (1832-1917)

Berbicara mengenai agama merupakan suatu hal yang tidak baru lagi bagi kita. Karena bagi kita agama merupakan tema yang umum yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan moralitas, kesucian dan hal-hal yang transenden. Pemahaman sederhana kita

akan agama hampir sama dengan apa yang orang lain pahami. Bagi kita agama merupakan suatu prosesi ritual dan rutinitas kita dalam hal berhubungan dengan Tuhan. Hampir setiap saat kita selalu bersentuhan dengan agama.

Saat agama diartikan sebagai sebuah sistem sosial yang berkaitan erat dengan maju mundurnya kebudayaan manusia. Melahirkan berbagai pertanyaan besar tentang agama. Keintegralan agama dengan kebudayaan manusia sendiri sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Dan dua abad terakhir para pengkaji agama mulai mencari dan menganalisa tentang keberadaan agama sebagai sistem sosial yang berkaitan dengan peradaban manusia tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa arti agama (secara universal) itu? Bagaimanakah agama itu? kapan dan dimana agama itu muncul? faktor apa yang mempengaruhi kemunculannya? merupakan pertanyaan awal yang menyelidik tentang keberadaan agama. karena bagaimanapun juga agama merupakan suatu bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Dari sinilah kemudian tulisan ini membahas tentang agama perspektif antropologis dan mengkaji tentang asal-usul agama serta perkembangannya.

5.1.1 Kajian Budaya

Kepiawaian Tylor dalam kajian kebudayaan membuatnya diangkat sebagai guru besar di *Harvard University*. Menurut Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang

didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Ada banyak tulisan yang berhasil ia sumbangkan bagi kajian kebudayaan, utamanya untuk semakin menguatkan dan menyebarkan pandangannya mengenai teori evolusi kebudayaan. Salah satu bukunya berjudul *Researches into the Early History of Mankind*, semakin menguatkan keteguhannya mengenai teori evolusi kebudayaan yang memang telah sekian lama ia perjuangkan. Dalam buku yang ditulis pada tahun 1871 ini, Tylor mengungkapkan tujuan sesungguhnya dari kajian kebudayaan yang dilakukan oleh seorang ahli antropologi.

Menurutnya, kajian antropologi adalah untuk mempelajari aneka ragam kebudayaan sebanyak-banyaknya, kemudian dicarikan unsur-unsur persamaannya, selanjutnya dilakukan proses klasifikasi. Dengan cara dan tahapan seperti ini, menurut Tylor, maka akan tampak kemudian adanya evolusi kebudayaan manusia yang terdiri dari beragam tingkatan perkembangan yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Apa yang dipaparkan oleh Tylor dalam buku di atas, sepertinya diimplementasikannya dalam bukunya yang lain berjudul *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language Art and Custom*. Dalam buku yang ditulis tahun 1874 ini, Tylor memaparkan bahwa kebudayaan manusia dalam sejarah evolusinya berjalan melalui tiga tahap perkembangan yang masing-masing tahapan dibedakan berdasarkan unsur ekonomi dan teknologi yang mereka gunakan. Ketiga tahapan perkembangan kebudayaan manusia tersebut adalah *savagery*, *barbarian* dan *civilization*.

Pada tahap pertama (*savagery*), manusia hanya bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu dengan menggunakan peralatan yang mereka ciptakan dari benda-benda yang ada di sekitar mereka, seperti kayu, tulang dan batu. Berkembang kemudian menuju tahap kedua (*barbarian*) yang ditandai dengan mulainya manusia mengenal cocok tanam. Karena mulai memahami cara menanam, maka mereka berpikir untuk menjaga agar tanaman tersebut dapat dipelihara dan dimanfaatkan hasil sehingga mereka mulai hidup menetap di sekitar tanaman tersebut.

Tahapan kedua ini juga ditandai dengan perkembangan peralatan mereka dari yang sebelumnya hanya terbuat dari kayu, batu dan tulang menjadi terbuat dari logam. Berkembang kemudian menjadi tahap ketiga (*civilization*) atau peradaban yang ditandai dengan pengenalan manusia dengan tulisan, kehidupan perkotaan dan kemampuan mereka membangun bangunan-bangunan besar yang sebelumnya belum pernah ada. Untuk dapat mencapai semua itu, tentunya manusia memerlukan ilmu pengetahuan dan peralatan-peralatan yang canggih serta yang tidak boleh terlupakan adalah memiliki kompleksitas sistem organisasi sosial.

5.1.2 Kajian Evolucionisme

Edward B Tylor (1832-1917) adalah orang Inggris yang mula-mula mendapatkan pendidikan dalam kesusasteraan dan peradaban Yunani dan Rum Klasik, dan baru kemudian tertarik akan ilmu Arkeologi. Karena ia mendapat kesempatan untuk turut dengan

keluarganya berkelana ke Afrika dan Asia, ia menjadi tertarik untuk membaca etnografi. Sebagai orang yang dianggap memiliki keahlian dalam ilmu arkeologi, dalam tahun 1856 ia turut dengan ekspedisi Inggris untuk menggali benda-benda arkeologi di Meksiko masa kini, berjudul *Anahuac, or Mexico and the Mexicians, Ancient and Modern* (1861).

Buku ini merupakan karya Tylor yang pertama, dan beratus-ratus buku dan karangan yang lain terbit kemudian, baik dari waktu sebelum ia diangkat menjadi guru besar di Universitas Oxford dalam tahun 1883, maupun setelah itu, merupakan sumbangannya terhadap antropologi. Dari karangan-karangan itu, terutama dari buku yang tebalnya dua jilid berjudul *Researches Into The Early History of Mankind* (1871), tampak pendiriannya sebagai penganut cara berfikir Evolucionisme. Menurut uraiannya sendiri, seorang ahli antropologi bertujuan mempelajari sebanyak mungkin kebudayaan yang beraneka ragam di dunia, mencari unsur-unsur persamaan itu sedemikian rupa, sehingga tampak sejarah evolusi kebudayaan manusia itu dari satu tingkat ke tingkat yang lain.

Paradigma evolusi kebudayaan yang ingin mengganti model dogmatis agama yang telah mendarah daging di Eropa Barat dalam memandang kebudayaan manusia ini dikemukakan pertama kali oleh *Edward Burnett Tylor* (1832-1917), seorang ahli antropologi yang berasal dari Inggris. Persinggungan Tylor dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan dimulai ketika ia menempuh pendidikan kesusastraan dan peradaban Yunani dan Romawi klasik. Ketertarikan

seputar kebudayaan ini membuatnya sangat menyukai ilmu arkeologi yang memang mengambil objek kajian terhadap benda-benda peninggalan masa lampau. Ketertarikan ini terus tumbuh subur seiring didapatnya kesempatan untuk melakukan suatu perjalanan menyusuri Afrika dan Asia hingga membuatnya tertarik untuk membaca naskah-naskah etnografi yang mengisahkan tentang masyarakat yang ada di kedua benua tersebut. Setelah mendapat pengakuan sebagai seorang pakar arkeologi, Tylor diajak serta mengikuti ekspedisi Inggris untuk mengungkap benda-benda arkeologis peninggalan beragam suku yang ada di Meksiko.

Kemudian Tylor melanjutkan teorinya tentang asal mula religi dengan suatu uraian tentang evolusi religi, yang berdasarkan cara berpikir evolusionisme. Katanya animisme yang pada dasarnya merupakan keyakinan kepada roh-roh yang mendiami alam semesta sekeliling tempat tinggal manusia, merupakan bentuk religi yang tertua. Pada tingkat kedua dalam evolusi religi, manusia yakin bahwa gerak alam yang hidup itu juga disebabkan adanya jiwa dibelakang peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala alam itu. Sungai-sungai yang mengalir dan terjun ke laut, gunung-gunung yang meletus, gempa bumi, angin taufan, gerak matahari, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pokoknya seluruh gerak alam. Disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang menempati alam. Jiwa alam itu kemudian deparsonifikasikan dan dianggap seperti makhluk-makhluk yang memiliki suatu kepribadian dengan kemauan dan pikiran, yang disebut dewa-dewa alam.

Pada tingkat ketiga evolusi religi, bersama dengan timbulnya susunan kenegaraan dalam masyarakat manusia, timbul pula keyakinan bahwa dewa-dewa alam itu juga hidup dalam suatu susunan kenegaraan, serupa dalam dunia makhluk manusia. Maka terdapat pula susunan pangkat dewa-dewa, mulai dari raja dewa-dewa sebagai dewa tertinggi, sampai pada dewa-dewa yang terendah pangkatnya. Susunan serupa itu lambat laun menimbulkan kesadaran bahwa semua dewa itu pada hakekatnyahnya merupakan penjelmaandari satu dewa saja, yaitu dewa yang tertinggi. Akibat dari keyakinan itu adalah berkembangnya keyakinan pada satu Tuhan dan timbulnya religi-religi yang bersifat monotheisme sebagai tingkat yang terakhir dalam evolusi religi manusia.

Pada tingkat tertua dalam evolusi religinya, manusia percaya bahwa makhluk-makhluk halus itulah yang menempati alam sekeliling tempat tinggalnya. Makhluk-makhluk halus yang tinggal dekat tempat tinggal manusia itu, yang bertubuh halus sehingga tidak dapat tertangkap oleh panca-indra manusia, yang mampu berbuat hal-hal yang tak dapat diperbuat manusia, mendapat tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi objek penghormatan dan penyembahannya, yang disertai berbagai upacara berupa doa, sajian, atau korban. Religi itulah yang oleh Tylor di sebut Animisme.

5.1.3 Asal-Usul Agama

Suatu penelitian serupa itu dilakukan mengambil sebagai pokok unsur-unsur kebudayaan seperti sistem

religi, kepercayaan, kesusasteraan, adat-istiadat, upacara, dan kesenian. Penelitian itu menghasilkan karya yang terpenting, yaitu dua jilid *Primitive Culture: Language Art and Custom* (1874). Dalam buku itu ia juga mengajukan teorinya tentang asal mula religi, yang berbunyi sebagai berikut: Asal mula religi adalah kesadaran akan adanya jiwa. Kesadaran akan jiwa itu di sebabkan karena dua hal, yaitu:

1. Perbedaan yang tampak pada manusia antara lain hal-hal yang hidup dan hal hal yang mati. Satu organisma pada satu saat bergerak gerak, artinya hidup, tetapi tak lama kemudian organisma itu juga tak bergerak lagi, artinya mati. Maka manusia mulai sadar akan adanya suatu kekuatan yang menyebabkan gerak itu, yaitu jiwa.
2. Peristiwa mimpi, dalam mimpinya manusia melihat dirinya di tempat-tempat lain (bukan di tempat dimana ia sedang tidur), maka manusia mulai membedakan antara tubuh jasmaninya yang ada di tempat tidur, dan suatu bagian yang lain dari dirinya pergi ketempat-tempat lain. Bagian lain itulah yang disebut jiwa.

Mengenai Edward B. Tylor (1832-1917) diterangkan teori asal mula religi bahwa asal mula religi adalah kesadaran manusia terhadap jiwa. Kemudian manusia mentransformasikan kesadaran terhadap jiwa menjadi keyakinan kepada makhluk-makhluk halus yang dipercaya mampu berbuat hal-hal yang tidak dapat diperbuat manusia, sehingga dijadikan obyek penghormatan dan penyembahan dengan disertai doa,

sajian atau korban. Religi inilah yang disebut Tylor dengan animisme sebagai tingkat tertua evolusi religi. Alam semesta penuh dengan jiwa-jiwa merdeka itu, yang oleh Tylor tidak disebut *Soul* atau jiwa lagi tetapi disebut Spirit (makhluk halus atau roh). Dengan demikian pikiran manusia telah mentransformasikan kesadarannya akan adanya jiwa menjadi keyakinan kepada makhluk-makhluk halus.

Sifat abstrak dari jiwa itu menimbulkan keyakinan pada manusia bahwa jiwa dapat hidup langsung, lepas dari tubuh jasmaninya dan hanya dapat meninggalkan tubuh waktu manusia tidur atau pingsan. Karena pada saat-saat serupa itu kekuatan hidup pergi melayang, maka tubuh dalam keadaan lemah. Tetapi Tylor berpendirian bahwa walaupun sedang melayang, hubungan jiwa dengan jasmani pada saat tidur atau pingsan tetap ada. Hanya apabila manusia mati, jiwanya melayang terlepas, dan terputuslah hubungan dengan tubuh jasmani untuk selama-lamanya. Hal ini jelas terlihat apabila tubuh jasmani telah hancur, berubah menjadi debu di dalam tanah, atau hilang berganti menjadi abu didalam api upacara pembakaran mayat. Jiwa yang telah merdeka terlepas dari jasmaninya itu dapat berbuat sekehendaknya.

Pada abad ke sembilan belas, dalam masyarakat Eropa mengemuka sebuah paradigma (cara pandang) yang memandang bahwa gejala-gejala yang timbul dari alam, masyarakat dan kebudayaan yang ada dalam komunitas manusia dapat dilihat dan dipikirkan secara rasional. Cara pandang yang secara tidak langsung mengkritik perilaku masyarakat Eropa Barat yang

mengembalikan segala sesuatunya ke kitab suci ini kemudian dikenal dengan teori evolusi kebudayaan. Paradigma ini dipahami sebagai pandangan yang menyatakan bahwa ada kepastian dalam tata tertib perkembangan yang melintasi sejarah kebudayaan dengan kecepatan yang pelan tetapi pasti. Selanjutnya, dimulailah pergumulan dogma-dogma agama yang telah sekian lama mengakar di tengah-tengah masyarakat dengan cara pandang baru yang sepenuhnya berbeda dan asing bagi masyarakat Eropa Barat saat itu.

Agama dalam pengertian Edward Burnett Tylor yang mengaitkan kemunculan agama dengan perkembangan manusia. Menyebutkan bahwa agama merupakan suatu sistem yang muncul dikarenakan kegelisahan manusia dalam pencariannya akan suatu dzat yang mengatur kehidupan dan kematiannya. Berdasarkan penelitiannya terhadap masyarakat suku-suku primitif di Amerika Selatan dan Australia, Tylor lebih memfokuskan pada Perbedaan antara kehidupan dan kematian yang terjadi pada manusia primitif. Faktor itulah yang kemudian menjadi rujukan pokok E.B Tylor tentang agama. Dalam teorinya *animisme*, Tylor menyebutkan bahwa manusia primitif dihadapkan pada masalah perbedaan antara hidup dan mati. Kematian merupakan sesuatu yang dipertanyakan oleh manusia primitif. Manusia primitif juga merasa heran saat bermimpi melihat jiwa yang bisa lepas dari tubuh dan kembali lagi. Taylor meyakini bahwa agama muncul pertamakali dimulai dengan keyakinan manusia terhadap Anima (jiwa), keyakinan terhadap Tuhan diganti dengan keyakinan kepada Jiwa orang-orang mati. Teorinya tersebut memunculkan

dua pemahaman tentang agama sebagai sistem sosial. *Pertama*, pemahaman tentang agama lahir hasil dari kebudayaan manusia. Dan yang *Kedua*, pemahaman tentang agama yang memunculkan kebudayaan pada manusia.

Jadi Taylor mendefinisikan asal-usul agama pada manusia dimulai dari animisme. Berbeda dengan Tylor, Sir Jhon Lubbock menyatakan adanya tingkatan-tingkatan dalam agama. Lubbock menyebutkan bahwa asal-usul agama pertama kali adalah *Atheisme* karena sistem keyakinan manusia pada saat itu belum terdapat adanya mithos-mithos atau pun bentuk kepercayaan tertentu. Namun tesis Lubbock tidak mampu menyanggah teori agama dari Tylor, karena bagi Tylor teori Lubbock sendiri kurang komprehensif dalam tingkatan-tingkatannya

Berbeda dengan keduanya, Andrew Lang tokoh yang banyak dijadikan rujukan setelah Tylor. Merupakan pengikut Tylor yang paling terkenal. Menurutnya asal-usul agama dalam masyarakat primitif bukan dimulai dari keyakinan animisme ataupun atheisme seperti yang dikemukakan dua tokoh diatas. Menurutnya asal-usul agama dalam masyarakat primitif dimulai pada keyakinan akan Dewa-dewa tertinggi (*High Gods*). Lang menyatakan bahwa keyakinan masyarakat primitif terhadap satu wujud tertinggi (*Supreme Being*) pencipta spiritual dan abadi dalam kehidupannya diwujudkan dengan keyakinan masyarakat primitif terhadap dewa-dewa. Dalam ungkapannya untuk mengkritisi teori-teori sebelumnya Lang menyatakan bahwa mereka telah melakukan kesalahan fundamental, karena sengaja

mengabaikan bukti-bukti yang tidak sejalan dengan teori mereka dan menjelaskan agama dari hal-hal yang sebenarnya bukan agama.

Lang menyatakan bahwa suku-suku paling primitif pun pasti mempunyai semacam konsep tentang suatu wujud tertinggi yang abadi. Menurutnya wujud tertinggi tersebut bukan roh leluhur ataupun hantu tapi Tuhan (Dewa). Dari analisisnya diatas Lang lebih cenderung pada konsep Monotheisme yang terjadi pada masyarakat primitif.

Dari sedikit uraian tentang teori asal-usul agama diatas dapat disimpulkan bahwa keyakinan manusia akan agama muncul dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, kegelisahan manusia akan adanya siklus kehidupan, berputar dari kehidupan menuju kematian. *Kedua*, kegelisahan manusia akan adanya dzat yang maha tinggi yang mengatur kehidupan alam. *Ketiga*, kegelisahan manusia terhadap kekuatan luar biasa (Magi) yang tidak bisa dijangkau oleh manusia.

Dari ketiga faktor diatas kalau kita kontekstkan dengan teks-teks agama semitik maka akan sinkron, karena dalam kitab-kitab suci agama semitik menyebutkan tentang proses pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Ibrahim. Yang disebabkan oleh kegelisahannya akan Tuhan. Begitupun dalam konteks keyakinan manusia dewasa ini. Apa yang disebutkan Marx tentang agama adalah candu ataupun tentang konsep manusia adalah homo religi, sebetulnya terdapat kesamaan faktor utama yang kemudian mempengaruhi pendapat tersebut yakni "kegelisahan manusia".

5.2 Herbert Spencer

5.2.1 Sekilas Biografi (27 April 1820-8 Desember 1903)

Lahir di Inggris tepatnya di Derby pada 27 April 1820, dialah Herbert Spencer, tokoh filsuf sosiologi, evolusi, antropologi, psikologi bahkan juga politik yang mendunia pada masanya. Hingga sekarang pun namanya masih sering disebut-sebut dalam buku panduan referensi dalam bidang biologi, sosiologi maupun psikologi. Pria yang tak lulus sekolah ini, mengenyam pendidikan bersama ayahnya, yang selanjutnya diteruskan oleh pamannya. Di usia 17 tahun, pria yang kerap dipanggil Spencer ini sudah menjadi insinyur di pembangunan jalan kereta api. Ketertarikannya pada biologi muncul dari pekerjaannya di Birmingham sebagai insinyur jalan kereta api. Hal inilah yang selanjutnya menarik perhatiannya di bidang evolusi, yaitu ketika ia memulai pemeriksaan pada fosil yang diambil dari pemotongan kereta api.

Filsuf Sosial Inggris yang pernah dekat dengan Marian Evans ini melanjutkan karirnya di bidang jurnalistik menjadi penulis dan redaktur *The Economist*. Sebuah tabloid mingguan keuangan yang penting pada saat itu untuk kelas menengah atas di tahun 1850 . Pada tahun yang sama, ia juga menerbitkan bukunya *The Social Static*. Buku ini banyak membahas mengenai filsafat politik, meski juga menyinggung persoalan evolusi. Tahun 1852, ia menerbitkan sebuah artikel *The Deveopment of Hypothesis*. Ia pun pernah bergerak di bidang pemerintahan, salah satunya dia berperan sebagai mediator.

Tahun 1855, ia bergerak di bidang psikologi dan evolusi, kemudian pikiran-pikirannya tertuang dalam *The Principle of Psychology* edisi pertama. Tahun selanjutnya 1858, Spencer memiliki minat di sosiologi. Dia menyusun gagasan survei di bidang biologi, psikologi, sosiologi dan etika dari sudut pandang evolusi. Kemudian di tahun 1862 dia menulis bagian pertama dari *Synthetic Philosophy* atau disebut dengan filsafat sintetik yaitu *First Principles*, membahas banyak tentang prinsip evolusi. Spencer memperkerjakan peneliti untuk membaca dan meneliti sumber-sumber budaya etnografi dan sumber sejarah dan mengaturnya sesuai dengan sistem yang Spencer rencanakan. Hasil dari usaha ini diterbitkan dalam beberapa edisi atau volume yang terpisah dengan judul *The Descriptive Sociology*. Karya ini diterbitkan antara tahun 1873 dan 1881. Edisi selanjutnya tidak diterbitkan karena alasan finansial, dan diterbitkan setelah kematian Spencer.

Tahun 1873 Spencer menulis *The Study of Sociology*. Dalam karya ini, dia menjelaskan mengenai tatanan sosial. Selanjutnya buku ini disajikan sebagai buku rujukan (*text book*) di Yale. Pun buku ini memiliki dampak yang kuat di Amerika. Sebelum penerbitan jilid terakhir *The Study of Sociology*, pada 1896, Spencer telah dinobatkan sebagai seorang filsuf dan ilmuwan yang terhormat. Buku-buku karya spencer banyak dibaca dan pandangan-pandangannya mendapat perhatian besar di dunia, misalnya buku *Principles of Biology* telah diadopsi sebagai buku panduan biologi di Oxford. *Principles of Psychology* juga digunakan oleh William James sebagai buku untuk dua mata kuliah. Pada saat

itu Spencer menjadi pusat perhatian di dunia akademik.

Tahun 1867, ia diminta menjadi calon kandidat untuk jabatan guru filsafat mental dan logika di University College, London, namun ia menolaknya. Antara tahun 1871 dan 1903 ia mendapat tawaran tidak kurang dari 32 penghargaan akademis, tapi dengan sebuah pengecualian, dia menolaknya. Dia pun juga menulis *The Man Versus The State*, yang isinya mengenai masyarakat manusia dengan institusi yang bernama negara. Kemudian, Spencer meninggal di usia 83 tahun di tahun 1903.

5.2.2 Pokok-Pokok Pemikiran

Lantas bagaimana bisa seorang insinyur jalur kereta api ini mampu menjabarkan biologi, sosiologi, psikologi, evolusi bahkan juga politik secara mendetail? Hal ini bermula dari hasil pemeriksaan dan pengamatan fosil terkait dengan pemotongan jalan kereta api yang dilakukan Spencer. Kemudian tertarik pada biologi dan evolusi. *Pertama*, disini akan saya jelaskan mengenai pandangan Spencer tentang evolusi. Baginya, bahwa masyarakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah dan dapat pula dipelajari dari pandangan evolusioner. Dia juga mendiskripsikan evolusi dan menerapkan konsep evolusi secara sistematis pada alam semesta pada umumnya dan masyarakat manusia pada khususnya. Baginya alam semesta ini terdiri dasarnya materi dan energi.

Dia menjelaskan bahwa *Evolution is a change from a state of relatively indefinite, incoherent, homogeneity to a state of relatively definite, coherent, heterogeneity*. Disini

dimaksudkan bahwa perubahan dari keadaan yang relatif terbatas, tidak pasti, homogenitas, ke keadaan yang relatif pasti, masuk akal dan heterogenitas. Sebuah evolusi, bagi Spencer dilihat dari suatu hal yang sederhana menuju kerumitan dan melalui sebuah proses yang berturut-turut dengan perbedaan-perbedaan tertentu. Evolusi masyarakat manusia dapat dilihat melalui struktur lapisan tanah, iklim bumi. Kemudian dilihat pada kumpulan ras, peradaban individu, segi politik, agama, ekonomi dan tingkat aktivitas manusia dari kegiatan konkrit hingga yang abstrak.

Jadi bagi Spencer evolusi itu dimulai dari hal yang sederhana sampai menuju hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya seleksi alam. Dilihat pula dari proses sebab dan akibatnya. Menurutnya, sesuatu yang kuat atau yang mampu memperjuangkan hidupnya yang akan berhasil. Sedangkan, yang lemah dan malaslah yang akan tersisih dengan sendirinya dan kurang berhasil dalam hidupnya.

Kedua, di bidang sosiologi. Pandangan-pandangan evolusi Spencer lebih menjurus pada evolusi tingkah laku manusia. Sehingga dalam hal ini mengerucut pada sosiologi. Dalam hal ini ia telah menerbitkan tiga jilid berjudul *The Principles of Sociology*. Spencer memiliki gagasan yang jelas mengenai ilmu perbandingan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi. Ia berpendapat bahwa kemajuan organisme dari jenis rendah ke tinggi adalah jenis kemajuan dari keseragaman struktur. Ia juga mempertahankan pola sebab akibat dalam memandang suatu masalah,

misalnya dalam kaitannya dengan perilaku masyarakat manusia maupun semua hal yang berasal dari alam. Tokoh yang tidak menyukai sejarah ini pernah menyatakan bahwa ia hanya tertarik pada sosiologi yang lebih berkaitan dengan sejarah. Baginya sejarah itu ibarat bangunan sedangkan sosiologi adalah batu bata yang berkaitan satu sama lain. Untuk itu kenapa dia lebih minat terhadap sosiologi dari pada sejarah. Ia pun berasumsi bahwa sejarah yang berisi tentang nilai-nilai praktis disebut dengan sosiologi deskriptif atau *Descriptive Sociology*

Di bidang sosiologi ia juga mengutarakan bahwa fenomena sosial tergantung dari sebagian sifat individual dan sebagian pada kekuatan individu mengikuti dengan apa yang ada disekitarnya. Kemungkinan bertahan hidup terletak pada akar dari solidaritas manusia. Hidup bersama-sama, cara hidup itu muncul karena dirasa lebih menguntungkan daripada hidup terpisah. Hal ini akan terus berjalan, jika dibarengi dengan komunikasi dan pemeliharaan solidaritas yang baik. Baginya kebenaran terdalam bisa tercapai, hanya melalui pernyataan dari keseragaman terluas atau terbanyak dalam hubungan manusia. Energi dibutuhkan dalam evolusi budaya. Dan dia salah satunya ilmuwan yang pertama kali menyebutkan bahwa perubahan budaya lebih baik dijelaskan dalam hal kekuatan sosial budaya daripada akibat tindakan-tindakan manusia yang penting (*the result of action of important man*).

Ketiga, pandangan politik. Dia berpandangan bahwa sistem politik pada suatu negara hendaknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dan

tidak memaksakan sebuah sistem. Karena masyarakat itu tumbuh bukan karena sebuah pembentukan tapi karena pertumbuhan. Spencer juga menghargai adanya perkembangan ekonomi dalam sebuah negara dalam mempengaruhi perkembangan adat istiadat dan lembaga pemerintahan. Hal ini tidak hanya merujuk pada politik tetapi juga sosiologi. Baginya, peran penting ada dalam perekonomian, khususnya di bidang perdagangan dan industri. Hal ini mampu merubah tatanan masyarakat maupun lembaga pemerintahan.

Keempat, pandangan Spencer mengenai pernikahan antar manusia. Dalam karyanya *The Principles of Sociology*, ia juga membahas mengenai perkembangan perkawinan, bentuk keluarga, konsep-konsep harta milik, dan sejenisnya. Misalnya saja, dia tidak percaya bahwa hubungan seks antar saudara yang tabu dikarenakan oleh faktor bawaan. Dia juga tidak percaya bahwa hubungan seksual adalah tahap awal perkawinan manusia. Ayah merupakan faktor penentu dari garis keturunan dan kekerabatan. Ia juga memiliki pandangan, bahkan dalam masyarakat primitif yang menganut asas matrilineal atau garis keturunan ibu sebagai pusatnya masih menganggap keberadaan ayah untuk menerima garis keturunan dan kekerabatan laki-laki.

Kelima, pandangan Spencer mengenai agama. Dalam *The Principle of Sociology*, Spencer membahas teori tentang asal-usul agama yang kemudian dikenal dengan teori hantu atau *the ghost theory*. Menurut pandangan ini, konsep jiwa yang mendiami tubuh manusia adalah keyakinan supranatural manusia, yang selanjutnya

diperluas lagi untuk hewan, tumbuhan dan benda mati. Melalui suatu keberadaan dan pengkhususan menjadi lebih spesifik, konsep jiwa berubah menjadi berbagai bentuk dan kekuatan, ini yang menghasilkan kepercayaan individu berbeda, karena konsep Tuhan menjadi semakin banyak, seperti halnya kepercayaan menganut dewa. Bagi Spencer, hal ini tidak lepas pengaruhnya dari sosiologi.

Selanjutnya, Spencer beranggapan bahwa ia lebih peduli terhadap proses daripada tahapan-tahapan. Ia melihat proses perkembangan manusia itu ditimbulkan dari proses lingkungan budaya dan alam bukan gerakan melalui serangkaian tahapan-tahapan. Spencer juga menyatakan bahwa sistem ekonomi bekerja baik jika setiap individu diperbolehkan untuk mencari kepentingannya sendiri atau swasta. Sedangkan negara tidak boleh ikut campur kecuali dalam urusan peraturan mengenai hak-hak orang lain dan kecuali negara melakukan kontrak secara pribadi. Dengan demikian, bisnis akan berjalan kuat, dan akan menciptakan persaingan. Sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam sebuah negara.

5.2.3 Kesimpulan

Spencer yang meninggal di usia 83 tahun telah memiliki peran besar di dunia di bidang sosiologi, evolusi, antropologi, tipologi masyarakat manusia, pembagian kerja, struktur sosial. Meski, pengaruhnya akhir-akhir ini hanya sedikit, namun setidaknya Spencer juga memiliki sumbangan yang besar khususnya di bidang sosiologi dan antropologi. Sebagian besar pemikiran Spencer

berada pada pola tatanan masyarakat, yaitu apa yang menjadi pengaruhnya, bagaimana masyarakat mampu berkembang, faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung pengembangan masyarakat, dan apa hasil yang diperoleh. Hal ini berkaitan dengan pandangannya terhadap hubungan causal atau sebab akibat.

Pun ia sering mengulang pernyataannya terkait bahwa yang menjadi pengaruh segala gejala dan fenomena apapun tidak terlepas dari faktor budaya dan lingkungan yang mengakibatkan proses seleksi alam. Baginya ilmu sosiologi telah menjadi landasan bagi ilmu lain seperti psikologi, antropologi, ekonomi, politik, evolusi dan sejarah. Buat dia, bahwa sosiologi itu diibaratkan batu bata yang tersusun sedangkan bangunannya adalah ilmu ilmu lain, Disinilah letak filsafat Spencer. Dia juga beranggapan segala sesuatu yang kuat dan mampu bertahan, akan terus melanjutkan kehidupannya. Sebaliknya yang lemah dan tidak mampu bertahan, dengan sendirinya akan menghilang karena proses seleksi alam. Spencer juga lebih menghargai dan peduli pada sebuah proses daripada hasil akhir dari segala sesuatu. Bukan hanya sekedar langkah-mencapai sesuatu.

5.3 Friedrich Max Müller (6 Desember 1823-28 Oktober 1900)

5.3.1 Sekilas Biografi

Friedrich Max Müller (6 Desember 1823 - 28 Oktober 1900), umumnya dikenal sebagai Max Müller, adalah seorang ahli bahasa kelahiran Jerman dan orientalis, yang tinggal dan belajar di Inggris untuk sebagian

besar hidupnya . Dia adalah salah satu pendiri dari bidang akademik barat penelitian India dan disiplin perbandingan agama. Müller menulis karya baik ilmiah dan populer pada subjek Indologi . The Sacred Books of the East, satu set 50 - volume terjemahan bahasa Inggris, disusun di bawah arahnya . Dia juga mempromosikan ide dari keluarga Turanian bahasa dan orang-orang Turanian .

Pada tahun 1850 Müller diangkat wakil profesor Taylorian bahasa Eropa modern di Universitas Oxford. Pada tahun berikutnya, atas saran Thomas Gaisford, ia membuat M.A. kehormatan dan anggota dari perguruan tinggi Gereja Kristus, Oxford. Pada berhasil ke profesor penuh pada tahun 1854, ia menerima gelar penuh M.A. dengan Keputusan Convocation. Pada 1858 ia dipilih untuk sebuah persahabatan hidup di All Souls 'College.

Ia kalah dalam tahun 1860 pemilu untuk Boden Professorship dari bahasa Sansekerta, yang merupakan "kekecewaan tertarik" kepadanya. Müller adalah jauh lebih baik memenuhi syarat untuk jabatan dari calon lainnya (Monier Monier-Williams), tapi teologis yang luas pandangan, Lutheranismenya, kelahiran Jerman dan kurangnya pengetahuan tangan pertama praktis India mengatakan terhadap dirinya. Setelah pemilihan ia menulis kepada ibunya, "semua orang-orang terbaik sebagai bagi saya, Profesor hampir bulat, tetapi vulgus profanum membuat sebagian".

5.3.2 Pokok-Pokok Pemikiran

Kemudian pada tahun 1868, Müller menjadi Profesor pertama Oxford Perbandingan Filologi, posisi

didirikan atas namanya. Dia memegang kursi ini sampai kematiannya, meskipun ia pensiun dari tugas aktif pada tahun 1875. Pada 1888, Müller diangkat Gifford Dosen di Universitas Glasgow. Gifford ini Kuliah adalah yang pertama dalam seri tahunan, mengingat di beberapa perguruan tinggi Skotlandia, yang terus hari ini. Selama empat tahun ke depan, Müller memberikan empat seri kuliah Judul dan ketertiban dari kuliah adalah sebagai berikut:

1. **Agama alami.** Kursus pertama ini kuliah dimaksudkan sebagai pengantar, dan memiliki untuk objeknya definisi Alam Agama dalam arti luas.
2. **Agama fisik.** Tentu saja kedua ini kuliah dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana negara yang berbeda telah tiba di sebuah kepercayaan akan sesuatu yang tak terbatas di belakang terbatas, sesuatu yang tak terlihat di belakang terlihat, di banyak agen yang tak terlihat atau dewa-dewa alam, sampai mereka mencapai keyakinan dalam satu tuhan di atas semua dewa-dewa. Singkatnya, sejarah penemuan yang tak terbatas di alam.
3. **Antropologi Agama.** Tentu saja ketiga ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana negara-negara yang berbeda tiba di keyakinan jiwa, bagaimana mereka bernama berbagai fakultas, dan apa yang mereka bayangkan tentang nasibnya setelah kematian.
4. **Teosofi atau Agama psikologis.** Kursus keempat dan terakhir dari kuliah ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara Tuhan dan jiwa (“dua

keabadian ini”), termasuk ide-ide bahwa beberapa negara utama di dunia telah membentuk tentang hubungan ini. agama yang nyata, Müller menegaskan, didirikan pada persepsi yang benar tentang hubungan jiwa kepada Allah dan Allah jiwa; Müller ingin membuktikan bahwa ini benar, tidak hanya sebagai dalil, tetapi sebagai fakta sejarah. Judul asli dari kuliah adalah ‘Psikologis Agama’ tapi Müller merasa terdorong untuk menambahkan ‘Teosofi’ untuk itu.

Selama Gifford Lectures tentang masalah “agama alamiah”, Müller telah dikritik karena anti-Kristen. Pada tahun 1891, pada pertemuan Presbytery Didirikan dari Glasgow, Mr. Thomson (Menteri Ladywell) pindah mosi bahwa ajaran Müller adalah “subversif dari iman Kristen, dan pas untuk menyebarkan panteistik dan kafir pandangan antara mahasiswa dan lain-lain” dan mempertanyakan penunjukan Müller sebagai dosen. Sebuah serangan yang lebih kuat dari Müller dibuat oleh Monsignor Alexander Munro di Katedral St Andrew. Munro, seorang petugas dari Gereja Katolik Roma di Skotlandia (dan Provost dari Katedral Katolik Glasgow 1884-1892), menyatakan bahwa kuliah Müller “yang tidak kurang dari perang salib melawan wahyu Ilahi, terhadap Yesus Kristus, dan terhadap Kekristenan”. Kuliah menghujat yang, lanjutnya, “proklamasi ateisme dengan kedok panteisme” dan “tumbang ide kita tentang Allah, untuk itu menolak gagasan tentang Tuhan pribadi”.

Tuduhan serupa sudah menyebabkan pengecualian Müller dari kursi Boden dalam bahasa Sansekerta yang

mendukung konservatif Monier Monier-Williams. Pada 1880 Müller sedang didekati oleh Charles Godfrey Leland, Helena Blavatsky, dan penulis lain yang mencari untuk menegaskan manfaat dari “Pagan” tradisi keagamaan atas kekristenan. Desainer Mary Fraser Tytler menyatakan bahwa buku Chips Müller dari Workshop Jerman (kumpulan esainya) adalah dia “Al-kitab”, yang membantunya untuk membuat citra suci multi-budaya. Müller menjauhkan diri dari perkembangan ini, dan tetap dalam iman Lutheran di mana ia dibesarkan. Menurut G. Beckerlegge, “latar belakang Müller sebagai Lutheran Jerman dan identifikasi dengan partai Luas Gereja” menyebabkan “kecurigaan oleh mereka yang menentang posisi politik dan keagamaan yang mereka merasa Müller diwakili”, terutama latitudinarianism nya.

5.4 James G. Frazer dan Teori Batas Akal (1854-1941)

James G. Frazer (1854-1941), seorang antropolog terkemuka dari Inggris, dalam bukunya *The Golden Bough, A Study in Magic and Religion* (1890). Menurut Frazer, manusia memecahkan permasalahan hidupnya dengan akal dan pengetahuannya, tetapi akal dan pengetahuan tersebut terbatas. Semakin maju kebudayaan manusia akan semakin luas pula batas akal itu, tetapi dalam banyak kebudayaan batas akal manusia tersebut sangat sempit. Oleh karena itu persoalan-persoalan hidup yang tidak dapat dipecahkan dengan akal, dipecahkan dengan ilmu gaib. Ilmu gaib ini adalah segala perbuatan manusia, termasuk abstraksi dari perbuatan, untuk

mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di alam serta seluruh kompleks perbuatan yang terdapat di belakangnya, yang kemudian dikenal dengan teori asal-usul agama: **teori batas akal**.

Pada mulanya manusia hanya mempergunakan ilmu gaib untuk memecahkan soal-soal hidupnya yang berada di luar batas kemampuan akal dan ilmu pengetahuan. Pada saat itu agama belum ada dalam kebudayaan manusia. Karena lambat laun terbukti bahwa ilmu gaib ini banyak mengalami kegagalan, maka manusia kemudian percaya bahwa alam ini didiami oleh makhluk-makhluk halus yang lebih berkuasa. Oleh karena itu manusia berusaha mencari hubungan dengan makhluk-makhluk halus tadi. Dari sini kemudian timbul agama.

Menurut Frazer, ada perbedaan besar antara ilmu gaib dengan agama, atau antara magi dengan religi. Ilmu agama adalah segala sistem perbuatan dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan mempergunakan kekuatan dan hukum-hukum gaib yang ada di alam, sementara agama menyandarkan diri pada kemauan dan kekuasaan makhluk-makhluk halus yang menempati alam.

Edward Burnett Taylor (1832-1917) dan Sir James George Frazer (1854-1941) adalah seroang perintis antropologi sosial-budaya di Inggris (Taylor) dan seorang lagi ahli folklore Skotlandia yang banyak menggunakan bahan etnografi yang sekaligus termasuk kelompok evolusionisme (Frazer). Jika Taylor terkenal seorang otodidak yang produktif dengan karyanya *Research into the Early History of Mankind and the Development of*

Civilization (1865), kemudian *Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom* (1871) yang menempatkannya sebagai ahli teori evolusi budaya dan religi, sedangkan Frazer, dua karyanya yang terkenal adalah *Totemism, and Exogamy* (1910) dan *The Golden Bough* (1911-1913).

Karya yang kedua inilah yang banyak berhubungan dengan teori agama, magi, dan sihir, yang secara garis besar inti teorinya sebagai berikut:

- a. Animisme adalah suatu kepercayaan pada kekuatan pribadi yang hidup dibalik semua benda, dan animisme merupakan pemikiran yang sangat tua dari seluruh agama (Pals,2001).
- b. Asal –mula religi adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa, yang disebabkan dua hal, yaitu: (1) perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan mati. Di sinilah manusia menyadari pentingnya jiwa dari rasa takut atau hantu; (2) Peristiwa mimpi, di mana ia melihat dirinya di tempat yang lain (bukan tempat ia tidur atau mimpi) yang menyebabkan manusia membedakan antara tubuh jasmani dan rohani/jiwa (Taylor, 1871/1903).
- c. Manusia memecahkan beberapa persolan hidupnya selalu dengan akal dan system pengetahuannya. Tetapi karena kemampuan akal dan sistem pengetahuan tersebut terbatas, maka ia juga menggunakan magic atau ilmu gaib. Dalam pandangan Frazer adalah semua tindakan manusia untuk mencapai maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada

dalam alam, serta seluruh kompleks yang ada di-belakangnya.

- d. Ilmu gaib mulanya hanya untuk mengatasi pemecahan masalah hidup manusia yang berada di luar kemampuan akal dan sistem pengetahuannya, dan saat itu agama (religi) belum ada..
- e. Karena penggunaan *magic* tidak selalu berhasil (bahkan kebanyakan gagal) maka mulailah ia yakin bahwa alam semesta didiami oleh mahluk-mahluk halus yang lebih berkuasa daripada manusia. Dari anggapan ini kemudian berasaha menjalin hubungan dengan mahluk halus itu dan timbullah agama (Koentjaraningrat, 1987).
- f. Antara agama dan *magic* itu berbeda. Agama sebagai “cara mengambil hati untuk atau menenangkan kekuatan yang melebihi kekuatan manusia, yang menurut kepercayaan membimbing dan mengendalikan nasib dan kehidupan manusia (Frazer, 1931). Sedangkan *magic* dilihatnya sebagai usaha untuk memanipulasikan “hukum-hukum” alam tertentu yang dipahami. Jadi *magic* semacam ilmu pengetahuan semu (*pseudo-science*), bedanya dengan ilmu pengetahuan modern karena konsepsinya yang salah tentang sifat dasar hukum tertentu yang mengatur urutan terjadinya peristiwa.
- g. *Magic* memiliki dua prinsip utama. Pertama, *like produce like* (persamaan menimbulkan persamaan) disebutnya sebagai *magic simpatetis*. Misal di Burma pemuda yang ditolak cintanya, ia akan memesan boneka yang mirip dengan rupa pacarnya

kepada tukang sihir. Jika boneka itu dilempar ke dalam air yang disertai dengan guna-guna tertentu, si gadis penolak akan gila. Dengan demikian nasib si gadis akan serupa atau sama dengan nasib si-boneka sebagai tiruannya. Prinsip kedua, adalah prinsip magic senggol (*contagious magic*), yaitu bahwa benda atau manusia yang pernah saling berhubungan, sesungguhnya dapat saling mempengaruhi, kendatipun hanya seutas rambut, kuku, gigi, dan sebagainya. Sebagai contoh suku Basuto di Afrika Selatan akan hati-hati mencabut giginya jangan sampai kesenggol oleh orang lain yang dapat menyalahgunakan maksudnya.

5.5 Diskusi

Setelah mempelajari tokoh-tokoh tersebut mahasiswa mampu melakukan eksplorasi sumbangan pemikiran tokoh-tokoh tersebut dalam sosiologi agama. Bagaimana kontribusi dan keterkaitan antar para tokoh tersebut dalam bangunan sosiologi agama?

BAB 6

SOSIOLOGI DI DUNIA ISLAM

Ada banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami agama yang meliputi pendekatan teologis normative, astronomis, sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan dan juga pendekatan filosofis. Hal ini perlu dilakukan karena melalui pendekatan tersebutlah kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya, tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, maka tidak mustahil agama menjadi sulit untuk dipahami oleh masyarakat, tidak fungsional dan akhirnya masyarakat mencari pemecahan masalah kedepan dengan tidak adanya unsure keagamaan, dan hal ini tidak boleh terjadi kepada kita semua sebagai ummat islam.

Sejakkelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia dan urusan ibadah dengan urusan muamalahnya. Dan kita bisa melihat suatu

perbandingan antara perhatian islam sendiri terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata yang terjadi islam menekankan urusan muamalah lebih besar dari pada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan social dari pada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdikan kepada Allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas dari pada ibadah dalam arti yang khusus.

6.1 Ibnu Khaldun (1332-1408)

6.1.1 Sekilas Biografi

Ibnu Khaldun yang punya nama lengkap **Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami al-Ishbili**, lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 Hijriyah bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut, Yaman, yang bermigrasi ke Seville, setelah semenanjung di Spanyol itu ditaklukan Islam pada abad ke-8 Masehi.

Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada di ambang degradasi dan disintegrasi. Kala itu, Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan wilayah di sekitarnya oleh bangsa Mongol pada tahun 1258, sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Al Quran dan menguasai tajwid. Selain itu, dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari

sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi.

Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Saat menginjak usia 17 tahun, tanah kelahirannya diserang wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai *Black Death* itu, para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya *Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur* memaparkan, di usia yang masih muda, Ibnu Khaldun sudah menguasai berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat, tasawuf, dan metafisika. Selain menguasai ilmu politik, sejarah, ekonomi serta geografi, di bidang hukum, ia juga menganut madzhab Maliki.

Sejak muda, Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai intrik politik. Pada masa itu, Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang peperangan. Dinasti-dinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan, di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Tak heran, bila dia sudah terbiasa mengamati fenomena persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan.

Di usianya yang ke-21, Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Dinasti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Dua tahun kemudian, dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah, sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam, penguasa Bani Marin dari Fez, Maroko, yang tengah berada

di Maghrib Tengah. Lobinya berhasil. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Ibnu Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka.

Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Namun tak lama kemudian, hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Dua tahun berselang, jabatan strategis kembali didudukinya. Penguasa Bani Hafs, Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus, khatib dan guru di Bijayah. Setahun kemudian, Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad, gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah.

Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu, sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun, karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. Sikap politiknya berubah, tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz.

Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda, *Al-Muqaddimah*. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu

memiliki nama lengkap *Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili*. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Yaman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M, setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen, keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di kota itu, keluarga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafsiyah. Sejak terlahir ke dunia, Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas.

Ibnu Khaldun kemudian berpindah kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. Tak lama kemudian, Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez, Maroko pada 774. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad, ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Namun, penguasa Granada tak menerima kehadirannya. Ia balik lagi ke Tilmisan. Meski telah dikhianati, namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. Sejak saat itulah, Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa'lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. Dalam masa menyepinya itulah, Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental.

Diawali dengan menulis kitab *Al-Muqaddimah* yang mengupas masalah-masalah sosial manusia, Ibnu Khaldun juga menulis kitab *Al-'Ibar* (Sejarah Umum). Pada 780 H, Ibnu Khaldun sempat kembali ke Tunisia. Di tanah kelahirannya itu, ia sempat merevisi kitab *Al'Ibar*. Empat tahun kemudian, ia hijrah ke Iskandaria

(Mesir) untuk menghindari kekisruhan politik di Maghrib. Di Kairo, Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah. Tak lama kemudian, dia diangkat menjadi ketua pengadilan kerajaan.

Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan, lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Raja lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. Setelah menunaikan ibadah haji, ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. Pada 803 H, dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk, penguasa Mogul. Berkat diplomasinya yang luar biasa, Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Dia banyak berdiskusi dengan Timur. Ibnu Khaldun, akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu, pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan digunakan hingga saat ini.

6.1.2 Pokok-Pokok Pemikiran

Ibnu Khaldun telah menghimpun sosiologinya dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*. Cakrawala pikiran-pikiran Ibnu Khaldun sangat luas. Dia dapat memahami masyarakat dengan segala totalitasnya, dan dia menunjukkan segala fenomena untuk bahan studinya. Dia juga mencoba untuk memahami gejala-

gejala itu dan menjelaskan hubungan kausalitas. Di bawah sorotan sinar sejarah, kemudian ia mensistematisasikan proses peristiwa-peristiwa dan kaitannya dalam suatu kaidah sosial yang umum.

Muqaddimah bukanlah kajian sederhana bagi ilmu kemasyarakatan, tetapi suatu percobaan yang berhasil dalam memperbaharui ilmu sosial. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mengajak menjadikan ilmu sosial sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini yang membuat Prof. Sati Hasri berpendapat bahwa Ibnu Khaldun telah berbuat yang sedemikian jauh sebelum August Comte, lebih dari 460 tahun.

Keunggulan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun dapat ditemukan dalam beberapa hal, antara lain adalah pada falsafah sejarah. Penemuan ini telah memberi kita pengertian tentang pemahaman yang baru tentang sejarah, yaitu bahwa sejarah itu adalah ilmu dan memiliki filsafat. Sejarah bukanlah semata-mata merupakan peristiwa-peristiwa sejarah yang terkait dengan determinisme kealam dan bahwa fenomena sejarah adalah kejadian-kejadian dalam negara.

Metodologi sejarah Ibnu Khaldun melihat bahwa kriteria logika tidak sejalan dengan watak benda-benda empirik, oleh karena epistemologinya adalah observasi. Prinsip ini merangsang para sejarawan untuk mengorientasikan pemikirannya kepada eksperiment dan tidak menganggap cukup eksperiment yang sifatnya individual, tetapi hendaknya mengambil sejumlah eksperimen, dialah yang pertama berkata sesuai dengan metodologi sejarah, adanya hubungan antara sejarah dengan ekonomi. Dia berpendapat bahwa faktor utama

dalam revolusi dan perubahan ialah ekonomi.

Ketiga bahwa beliau adalah penggagas ilmu peradaban, atau falsafah sosial. Pokok bahasannya ialah, kesejahteraan masyarakat manusia dan kesejahteraan sosial. Ibnu Khaldun memandang ilmu peradaban perdefinisi, ilmu baru luar biasa dan banyak faedahnya. Dia jugalah yang pertama yang mengaitkan antara evolusi masyarakat manusia dari satu sisi dan sebab yang berkaitan pada sisi lain. Dia mengetahui dengan baik masalah-masalah penelitian dan laporannya. Laporan penelitian menurutnya hendakanya diperkuat oleh dalil-dalil yang meyakinkan, ia telah mengkaji perilaku manusia dan pengaruh iklim dan berbagai aspek pencarian nafkah beserta penjelasan pengaruhnya pada konstitusi tubuh manusia dan intelektual manusia dan masyarakat.

Dalam perkembangan Islam yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan maka kita akan dapat melihat berbagai macam karya monumental yang masih tetap berpengaruh hingga saat ini. Karya-karya tersebut bertujuan untuk menjelaskan Islam dengan pemahaman yang lebih mendalam, lebih humanis dan lebih universal. Sumbangan karya tersebut antara lain seperti karya para perawi hadist seperti Bukhori dan Muslim. Metode seleksi mereka terhadap reputasi sosial mata rantai hadist dipandang sebagai kajian yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis.

Kajian monumental lainnya muncul dalam bidang fikih. Abu Hanifah di Baghdad adalah orang yang sangat terkenal dengan *istinbat* hukum yang bervariasi karena pengaruh kondisi sosial, masyarakat yang homogen

dan faktor lainnya. Selain beliau ada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tentang Abu Hanifah, dalam pendapat hukumnya, ia banyak dipengaruhi oleh perkembangan sosial yang terjadi di kota Kufah (Irak). Kota Kufah terletak jauh dari Madinah yang banyak merekam aktivitas Nabi dan kaum muslimin di masa awal. Dua faktor, yakni sedikitnya hadist yang beredar di Kufah dan juga perkembangan sosial masyarakatnya yang lebih dinamis karena keheterogenan penduduknya, mempengaruhi cara pengambilan hukum antara Imam Malik di Madinah dengan Abu Hanifah di Kufah.

6.2 Ali Syariati dan Sosialisme Islam (1933-1977)

6.2.1 Sekilas Biografi

Ada satu tokoh lagi yang tidak boleh diabaikan di dunia Islam, yaitu: Ali Syari'ati dengan segala kontraversinya. Ali Syari'ati adalah seorang Syi'ah tulen. Di dalam tulisan, ceramah dan setiap gagasan yang disampaikannya hampir tidak pernah dia menjadikan Abu Bakar, Umar, dan sebagainya sebagai referensi membangun aliran pemikirannya. Idola yang sering dikepermuakan adalah Ali, Hasan dan Husein, Zainab binti Husein, Salman al-Farisi dan teristimewa adalah Abu Zar al-Ghifari. Yang sangat menarik dari karakter mazhab pemikiran Ali Syari'ati adalah kemampuannya dalam melakukan interpretasi terhadap ajaran Syi'ah yang memiliki nuansa yang sangat revolusioner.

Ali Syari'ati, anak pertama dari keluarga miskin Muhammad Taqi dan Zahra, dilahirkan pada 24 November 1933 di sebuah desa kecil di Kahak, sekitar

70 kilometer dari Sabzevar. Ia merupakan anak pertama sekaligus anak laki-laki satu-satunya dengan tiga saudara perempuannya, Tehereh, Tayebeh, dan Batul (Afsaneh). Pada masa kecilnya, Ali adalah anak yang pendiam, pemalu dan tidak mudah bersosialisasi. Dia lebih suka menyendiri memisahkan diri dari aktivitas teman-temannya. Dia anak yang nakal dan sering bolos sekolah. Meskipun begitu ada hal yang patut di kagumi pada diri Ali, yakni dia adalah seorang kutu buku, bahkan selama tahun pertamanya di sekolah dasar dia telah mengenal koleksi perpustakaan ayahnya yang memiliki koleksi dua ribu buku.

Pada usia 17 tahun, Ali Syari'ati belajar pada sebuah lembaga pendidikan, Primary Teacher's Training College. Pada usia 20 tahun, ia mendirikan organisasi Persatuan Pelajar Islam di Masyhad, Iran. Pada tahun 1958 (ketika berusia 25 tahun) ia meraih gelar sarjana muda dalam ilmu bahasa Arab dan Perancis. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Sorbonne, Paris, setelah berhasil memenangkan beasiswa untuk belajar di negara itu. Ia belajar di Perancis sampai meraih gelar doktor pada tahun 1963. Setahun kemudian, ia pulang ke negara kelahirannya. Setibanya di Iran, ia mengawali langkahnya dengan menyampaikan ilmu yang diperolehnya dari berbagai sekolah dan akademi. Kemudian ia mengadakan perjalanan keliling dalam rangka mendirikan Hushyaimiah Irsyad, sebuah lembaga pendidikan pengkajian Islam yang kelak menjadi wadah pembinaan kader militan pemuda-pemuda revolusioner.

Karena aktivitas politiknya yang menentang kediktatoran Syah Iran, Ali Syari'ati mengalami banyak

kesulitan dalam hidupnya. Ia sudah harus menjalani kehidupan di belakang terali besi dalam usia muda. Namun, hal tersebut tidak membuatnya mundur. Periode kedua tahun 1960-an, Ali Syari'ati bergabung dengan Universitas Masyhad. Kuliah-kuliahnya di masjid kampus ini sangat diminati oleh sejumlah besar mahasiswa. Karena ada kekhawatiran akan meningkatnya pengaruh Ali Syari'ati, pada tahun 1968 pemerintah Iran memaksanya menjalani masa pensiun pada usia yang relatif masih muda yaitu 25 tahun. Walaupun demikian, ia tetap sering berceramah di berbagai perguruan tinggi dan masjid di kota-kota besar Iran. Kuliah-kuliahnya yang simpatik dan berbobot menimbulkan kepercayaan diri bagi jutaan muslimin di Iran. Sejumlah intelektual Islam, para mahasiswa, dan masyarakat Iran tertarik kembali untuk mengkaji Islam yang memberikan potensi besar dalam upaya memberi makna bagi kehidupan pribadi dan nasib bangsa.

Ali Syari'ati adalah seorang orator luar biasa, lidahnya setajam penanya. Dengan kelihaiannya, kampus dan masjid-masjid di Iran menjadi pusat kegiatan organisasi revolusioner. Ia juga tampil memimpin perlawanan terhadap pemerintahan Syah Iran. Oleh karena aktivitas politiknya, pada tahun 1974, Ali Syari'ati ditangkap. Ia kemudian menjalani tahanan rumah sampai tahun 1977. Pada bulan Mei 1977, ia terpaksa meninggalkan Iran menuju Inggris untuk menghindarkan diri dari kejaran penguasa. Namun, rezim Syah tidak mengizinkannya ke luar negeri untuk berbicara serta menulis secara bebas, serta menawan istri dan anak Ali Syari'ati. Tidak lama setelah itu, tepatnya tanggal 21 Juni 1977,

Ali Syari'ati ditemukan tewas di rumah kerabatnya di Southampton, Inggris.

Meskipun berita resmi menyatakan bahwa ia terkena serangan jantung, namun banyak orang percaya bahwa ia diracuni oleh agen rahasia pemerintah Iran. Jenazahnya kemudian di kuburkan di Damaskus, Suriah. Setahun setelah kematian Ali Syari'ati, Dinasti Pahlevi runtuh dan lahirlah Republik Islam Iran pada 16 Januari 1979. Ia dinilai memainkan peran penting menjelang Revolusi Iran yang dipimpin Ayatullah Ruhullah Khomeini pada tahun 1978, yang melahirkan berdirinya Republik Islam Iran.

6.2.2 Pokok-Pokok Pemikiran

Untuk mengidentifikasi gagasan **syari'ati** tentang landasan Sosialisme Islam, setidaknya dapat di sandarkan pada beberapa analisisnya yang mendalam tentang pemahamannya terhadap Islam, seperti pandangan terhadap konteks historis turunnya Islam. Secara gamblang pokok-pokok pikiran tersebut di katakan oleh syari'ati bahwa Islam adalah agama yang di turunkan untuk membela kaum tertindas (*mustad'afin*). Di bawah ini beberapa sudut pandang pemikiran syari'ati:

Islam menurut Syari'ati bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral atau hubungan individual dan penciptanya, tetapi lebih merupakan sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Ia berkeyakinan Islam sebagai suatu mazhab sosiologi ilmiah harus di fungsionalisasikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat yang tertindas, baik secara kultural maupun politik.

Islam sebagai mazhab sosiologi ilmiah meyakini bahwa perubahan sosial (termasuk revolusi) dan perkembangan masyarakat tidak dapat di dasarkan pada kebetulan, karena masyarakat merupakan organisme hidup, memiliki norma-norma kekal yang tak tergugat dan dapat di peragakan secara ilmiah.

Manusia memiliki kebebasan dan kehendak bebas, sehingga dengan campur tangannya dalam menjalankan norma masyarakat, setelah mempelajarinya, dan dengan menggunakannya, dia dapat berencana dan meletakkan dasar-dasar bagi masa depan yang lebih baik untuk individu maupun masyarakat. Berkaitan dengan keyakinan terhadap peran agama sebagai agen revolusi, Syari'ati menyimpulkan bahwa agama Islam dapat dan harus di fungsionalisasikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat tertindas. Syari'ati melontarkan pernyataan yang anti barat dan mengajak seluruh rakyat Iran untuk kembali kepada tradisi murninya. Dalam konteks ini, Syari'ati bisa di pandang sebagai pembela gigih warisan asli kebudayaan dan identitas bangsa dunia ketiga, di mana Islam merupakan akar eksistensial yang turut menentukan watak kebudayaan masyarakat dunia tersebut.

Bagi Syari'ati, masyarakat Islam sejati tidak mengenal kelas. Ia adalah wadah bagi orang-orang yang tercerabut haknya, "*yang tersisa, lapar, tertindas dan terdiskriminasi*". Pesan Islam adalah pesan kerakyatan sebagaimana amanat Qur'an, Tuhan telah menjanjikan kepada orang-orang tertindas bahwa mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin umat manusia, Islam

menuntut terciptanya sebuah masyarakat berkeadilan, sebuah gerakan kebangkitan yang menentang penindasan, pemerasan, dan diskriminasi sehingga mereka mendapatkan masyarakat yang “sama rata”; masyarakat yang membebaskan dirinya dari tirani, ketidakadilan dan kebohongan. Karena itu, diskriminasi manusia atas dasar ras, kelas, darah, kekayaan, kekuatan dan lain-lain tidak bisa di biarkan. Kecuali itu, pandangan bahwa alam semesta penuh dengan perpecahan, pertentangan, kontradiksi dan perbedaan mesti di nilai sebagai kelalaian (*syirk*). Dengan itulah Syari’ati mendasarkan Islamnya pada sebuah kerangka idiologis yang memahami Islam sebagai kekuatan revolusioner untuk melawan segala bentuk tirani penindasan dan ketidakadilan dan menuju persamaan tanpa kelas.

Dalam memahami Qur’an sebagai kitab suci umat Islam, Syari’ati menjelaskan bahwa di dalamnya, Qur’an telah menyebutkan dua karakteristik kelompok sosial. Dua kelompok sosial tersebut terbelah menjadi bagian yang saling berlawanan, suatu dialektika yang akan terus berlangsung selamanya. Secara garis besar Syari’ati mengidentifikasi dua kelompok tersebut sebagai kelompok penindas *zalimun* sebagai representasi kelompok kuat dalam masyarakat {kelompok Qabil} yang terdiri dari *mala’* yaitu golongan aristokrat dan para bangsawan yang berkuasa, serta *mutraf* yaitu kelompok kaya, di sisi yang berlawanan adalah kelompok terlindas *mustad’afin* sebagai presentasi kaum lemah dan teraniaya (kelompok habil).

6.3 Ilmu Sosial Profetik (ISP)

Dalam proses perkembangan suatu masyarakat atau kelompok, sebagaimana yang dituturkan oleh *August Comte* mengatakan: bahwa dalam mempelajari sesuatu tentang sosiologi itu sendiri diperlukan adanya posisi penting dalam sebuah masyarakat yang kemudian berkembang paradigma perilaku sosial.

Sosiologi Profetik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sosiologi berparadigma Ilmu Sosial Profetik (ISP). ISP dicetuskan oleh Kuntowijoyo sebagai alternatif pengembangan Ilmu Sosial yang mampu mengintegrasikan antara ilmu sosial dan nilai-nilai transendental. Ilmu Sosial Profetik adalah salah satu gagasan penting Kuntowijoyo. Baginya, ilmu sosial tidak boleh berpuas diri dalam usaha untuk menjelaskan atau memahami realitas dan kemudian memaafkannya begitu saja tapi lebih dari itu, ilmu sosial harus juga mengemban tugas transformasi menuju cita-cita yang diidealkan masyarakatnya. Ia kemudian merumuskan tiga nilai dasar sebagai pijakan ilmu sosial profetik, yaitu: **humanisasi, liberasi dan transendensi**.

6.3.1 Tokoh-Tokoh ISP

Gagasan mengenai Ilmu Sosial Profetik (ISP) menurut Kuntowijoyo dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan *Muhammad Iqbal* dan *Roger Geraudy*. Dengan bersumber pada kedua tokoh ini, Kuntowijoyo memaknai tentang isi penting dari penunaian tugas-tugas kenabian (etika profetik) yang telah menjadi bagian dari proses sejarah umat manusia. Abdul Quddus (seorang sufi besar Islam

dari Ganggoh) mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah memberikan “kesadaran kreatif” (*creative consciousness*) dalam menciptakan suatu dunia ide baru (Islam) dalam menghadapi kekuatan sejarah.

Berbeda dengan kalangan sufi umumnya yang lebih mengandung dimensi mistis, sedang kemunculan Nabi telah memasukkan unsur-unsur kenabian yang menancap dalam akar kehidupan duniawi. Artinya, realitas “perjuangan” Nabi lebih membumi dan masuk pada kancah zaman dan pergolakan sejarah manusia.

Sementara Roger Garaudy memandang kemerosotan peradaban Barat yang sekuler sebagai awal dari upaya untuk membangun dan menciptakan peradaban baru yang didasarkan pada keagamaan, ia menyatakan bahwa di tengah hancurnya peradaban umat manusia di mana filsafat Barat memiliki banyak kelemahan, maka kita sebaliknya menghidupkan kembali warisan Islam yang telah ada.

Yang diambil adalah “Filsafat Kenabian” (filsafat profetika) dari Islam. Kenapa? Karena, yang menjadi pertanyaan sentral dalam filsafat Islam adalah: bagaimana wahyu (kenabian) itu mungkin? Yaitu, bagaimana keterlibatan aktif sejarah kenabian dalam proses penyampaian wahyu itu telah mampu mengubah sejarah masyarakat menjadi positif. Garaudy mengklaim bahwa bangunan filsafat itu telah dilakukan oleh para filsuf muslim sejak Al-Farabi sampai dengan Mulla Shadra, dengan puncaknya Ibn ‘Arabi.

Ide dasar dari Iqbal¹ dan Garaudy² tersebut memperoleh ruang “artikulasi” ilmiah ketika Kuntowijoyo menggali langsung dari Al-Quran, ketika itu katanya, sisi profetik yang harus diemban oleh ilmu sosial yang berbeda dari dakwah harus memenuhi tiga unsur yakni (*amar ma’ruf, nahi munkar, dan tu’minuna billah*). Unsur pertama adalah *amar ma’ruf* yang diartikan sebagai humanisasi. Dalam Ilmu Sosial Profetik, humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan “kebenadaan”, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi dasarnya.

¹ **Muhammad Iqbal** (Urdu: محمد اقبال), (lahir di Sialkot, Punjab, India, 9 November 1877 – meninggal di Lahore, 21 April 1938 pada umur 60 tahun), dikenal juga sebagai Allama Iqbal (Urdu: علامہ اقبال), adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar abad ke-20. Diantara karya-karya Muhammad Iqbal adalah *Asrar-i Khudi* (Rahasia Pribadi), (1915), *Bang-i Dara* (Seruan dari Perjalanan), (1924), *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (1930), *Payam-i Masyriq* (Pesan dari Timur), (1923) dll.

² **Roger Garaudy** (lahir di Marseille, 17 Juli 1913 – meninggal di Paris, 13 Juni 2012 pada umur 98 tahun) ialah pengarang Prancis dan penyangkal Holocaust. Selama PD II, Garaudy ditawan sebagai tahanan perang di Aljazair. Garaudy ialah seorang komunis yang mencoba mendamaikan Marxisme dengan agama Katolik pada 1970-an dan kemudian meninggalkan kedua doktrin itu dan masuk Islam pada 1982.

6.3.2 Gagasan Utamanya

Dari epistemologi di atas, sosiologi profetik memiliki paradigma-baik mandiri dari paradigma sosiologi secara umum maupun menyatu dalam keseluruhan paradigma sosiologi, artinya paradigma sosiologo profetik juga tidak terlepas dari paradigma sosiologi secara umum, meski nanti akan ada upaya mengaitkan dengan teks-teks Islam, entah sifatnya teks ke konteks atau konteks ke teks, keduanya tidaklah begitu menjadi masalah, meski yang harus ditekankan oleh sosiologi adalah dari konteks ke teks, karena fakta-fakta empiris memerlukan penjelasan rasional, yang sering kali atau kadang-kadang mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma, tetapi dalam “rumah” sosiologi profetik sedapat mungkin konteks memperoleh legitimasi nilai etisnya dari Islam.

Pelebaran obyek studi sosiologi dan humaniora dengan menggunakan cara pandang Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual akademisi muslim, yang sejak lama mengumandangkan Islamisasi ilmu. Dalam waktu yang lama terjadi pemisahan antara ilmu-ilmu empiris dengan ilmu-ilmu agama. Selama ini yang lazim dikenal dalam ilmu sosial humaniora terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu-ilmu alami (*kauniyah*) dan ilmu-ilmu Quran (*qauliyah*). Pembagian ini menurut Kuntowijoyo perlu segera ditambahkan dengan ilmu *nafsiyah*. Kalau ilmu Kauniyah berkaitan dengan hukum Tuhan, dan ilmu nafsiyah berkaitan dengan, nilai, kesadaran. Ilmu nafsiyah itu menurut Kuntowijoyo disebut dengan humaniora. Pembagian ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh

ilmuwan sebelumnya, Ibn Sina mengelompokkan ke dalam tiga kategori teori ilmu pengetahuan Islam, yaitu ilmu-ilmu metafisika, ilmu-ilmu matematika, dan ilmu-ilmu alam atau fisik.

Pembagian seperti Ibn Sina di atas jug ditemukan dalam tradisi sosiologi klasik, *August Comte* misalnya membuat klasifikasi ilmu menjadi tiga yakni teologi, metafisika, dan positivis. Kemudian Kuntowijoyo membuat fase perkembangan keilmuwan dalam kerangka yang hampir sma yakni periode utopia, periode ideologi, dan periode ide. dalam kerangka perjuangan politik kalangan Islam misalnya, pada periode utopia, para pemimpin Islam hendak mendirikan negara Islam seperti apa yang kita harapkan tanpa melihat kondisi objektif. Periode ideologi, umat Islam menghendaki negara Islam teokrasi yang demokratis, sementara periode ide lebih menekankan pada spesifikasi seperti ekonomi Islam, universitas Islam, lebih dari itu kita butuh ide Islam tentang etika, estetika, pemikiran filsafat, dan lain-lain.

6.4 HOS Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme (16 Agustus 1882-17 Desember 1934)

6.4.1 Sekilas Biografi

Beliau dikenal sebagai Salah satu Pahlawan Nasional. Nama lengkap beliau adalah **Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto** atau **H.O.S Cokroaminoto** lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta, 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Tjokroaminoto adalah anak kedua dari

12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai bupati Ponorogo. Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, ia mempunyai beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia, yaitu Musso yang sosialis/komunis, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang agamis. Namun ketiga muridnya itu saling berselisih. Pada bulan Mei 1912, Tjokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam.

Tjokroaminoto terlahir dari keluarga yang berada dan terpandang dimana dari garis ayah merupakan keurunan seorang kiai yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat. Sementara sang Ibu masih keturunan bangsawan Keraton Surakarta. Semenjak kecil sudah di didik tentang agama Islam dari keluarganya. Kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai bupati Ponorogo, sedangkan ayahnya R.M Tjokroamiseno adalah wedana kleca Madiun (Tashadi dkk, 1993). Sejak memasuki dunia pendidikan, ketajaman pikirannya sudah tampak dimana beliau tidak senang ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Sikapnya yang keras dan berbeda dengan anak-anak sebayanya sehingga beliau saat itu digolongkan anak yang nakal.

Menurut Gonggong (1985) pada masa kecilnya Tjokroaminoto memang nakal dan bandel, tetapi dia berbeda dengan anak-anak priyai nakal lainnya. Dia anak nakal yang cerdas dan dia anak bandel yang cekatan dalam berfikir. Sebagai anak bandel tentu

dia harus menanggung resiko kebandelannya. Dia harus pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain karena ia sering dikeluarkan dari sekolahnya. Setelah beberapa kali berpindah sekolah, akhirnya ia berhasil menyelesaikan sekolahnya di OSVIA (sekolah calon pegawai pemerintah atau pamong praja) di Magelang pada 1902. Pemikiran-pemikirannya terus berkembang seiring dengan pengetahuan yang dimiliki didorong dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat saat itu. Ketajaman pikirannya dapat dilihat pada ketrampilannya dalam bidang karang mengarang sehingga berbagai surat kabar mulai memuat karyanya. Sejak saat itu pemikiran-pemikirannya bisa diutarakan dalam persurat kabaran. Perhatian pikirannya lebih mengarah pada soal-soal masyarakat dan kerakyatan. Pemikirannya tampak dalam usahanya membongkar kerusakan-kerusakan di dalam masyarakat kemudian memperbaikinya. Terlahir dari keluarga yang terhormat dan masih keturunan bangsawan namun title keningratan yang disandangnya tidak ia pakai (Tashadi dkk, 1993). Tjokroaminoto merasa bahwa ia sama dengan rakyat lainnya. Dalam benaknya bahwa ketika manusia terlahir dari keluarga apapun ya tetap manusia biasa, seharusnya tidak ada sekat-sekat yang membatasi dalam masyarakat.

Tjokroaminoto kemudian menikahi Soeharsikin yang merupakan anak dari Patih Mangoensoemo yang saat itu menjadi wakil bupati Ponorogo. Kelembutan dan budi pekerti Soeharsikin meluluhkan sifat Tjokroaminoto yang keras dan berapi-api. Sikap keras dan menentang terhadap apa yang tidak sejalan

dengan pemikirannya dan membuat Tjokroaminoto meninggalkan rumah sekali-gus istrinya. Perbedaan pandangan antara beliau dan mertuanya yang melatar belakangi beliau pergi. Setelah dirasa sudah cukup menyendiri kemudian beliau mengambil istrinya kembali. Kesetiaan Soeharsikin dan dukungan moral serta kekuatan dan keteguhan hati dalam mendukung penuh keinginan suaminya dalam memperjuangkan rakyat telah memberikan kekuatan batin yang luar biasa bagi Tjokroaminoto.

Pasangan suami istri ini kemudian menetap di Surabaya. Semenjak itu Soeharsikin membuka *internaat* sekaligus sebagai induk semang. Dari sini kemudian memunculkan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Moeso, Kartowisastro, Abikoeno, dan banyak lagi lainnya (Tashadi dkk, 1993). Mengingat pondokan yang satu rumah, sehingga sangat saling memberi pengaruh dan mempengaruhi satu sama lain. Rumah inilah yang menjadi tempat dalam membangun ideologi kerakyatan, demokrasi, sosialisme, dan anti-imperialisme. Sehingga wajar jika banyak melahirkan tokoh-tokoh besar dari rumah HOS. Tjokroaminoto dan Soeharsikin.

Dalam berbagai kesempatan di kegiatan Sarekat Islam Tjokroaminoto sering mengajak Soekarno dan Abikoeno Tjokrosujoso adik beliau sendiri. Cita-cita Tjokroaminoto bukanlah cita-cita pribadi melainkan cita-cita seluruh rakyat yang senantiasa dihidupkan dengan pengorbanan lahir batin. Beliau berhasil membangun pengertian bahwa cita-cita hidup menuju kemerdekaan harus disertai pengorbanan lahir batin.

Dalam kehidupan rumah tangga, isterinya bertindak sebagai kompas bagi suaminya. Soeharsikin menyadari bahwa suaminya adalah seorang pemimpin yang waktu, tenaga, dan pikirannya dibutuhkan sekali dalam perjuangan. Kesadaran isteri tercinta inilah yang membuat HOS. Tjokroaminoto merasa tidak ada suatu ganjalan dan tidak ada lagi kabut yang menggelapi perjuangannya. Menurut HOS. Tjokroaminoto, suasana rumah tangga sebagai dasar ukuran untuk melangkah lebih jauh menata kehidupan rakyat dan sebagai landasan perjuangannya, karena itu kekuatan semangat perjuangan HOS. Tjokroaminoto dipengaruhi oleh suasana tenang, tentram dan saling pengertian antar suami dan isteri. Keberhasilan perjuangan HOS. Tjokroaminoto tidak terlepas dari dukungan dan dorongan lahir batin dari isterinya. Ketidak sesuaian dari pihak saudara-saudaranya yang lain yang tidak sepaham dengan tujuan dan cita-cita almarhum beserta cara-cara yang dilakukan dijadikan cambuk yang lebih kuat untuk memupuk semangatnya agar apa yang diangan-angankan dalam pikirannya tercapai cita-cita mulia tidaklah mulus, tetapi kadang-kadang menghadapi batu ujian yang ditemuinya (Tashadi, 1993)

Islam sangat mempengaruhi alam pikiran dan tindakan Tjokroaminoto, dimana Islam sebagai pedoman dan dikombinasikan dengan sosialisme. Sosialisme Islam menurut Tjokro adalah sosialisme yang wajib dituntut dan dilakukan oleh umat Islam, dan bukan sosialisme yang lain, melainkan sosialime yang berdasar kepada azaz-azaz Islam belaka. Baginya, cita-cita sosialisme dalam Islam tidak kurang dari 13 abad umurnya dan

tidak ada hubungannya dengan pengaruh bangsa eropa. Azaz-azaz sosialisme Islam telah dikenal dalam pergaulan hidup Islam pada zaman nabi Muhammad SAW. Pemikiran ideologi yang kuat mengenai Islam, sosialisme, ideologi kerakyatan dari Tjokroaminoto dengan segala cita-cita mulianya terhadap bangsa ini telah dilanjutkan oleh Soekarno dan kawan-kawan sepondokannya.

6.4.2 Islam dan Sosialisme

Sebagai pimpinan Sarikat Islam, HOS dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Kemampuannya berdagang menjadikannya seorang guru yang disegani karena mengetahui tata-krama dengan budaya yang beragam. Pergerakan SI yang pada awalnya sebagai bentuk protes atas para pedagang asing yang tergabung sebagai Sarekat Dagang Islam yang oleh HOS dianggap sebagai organisasi yang terlalu mementingkan perdagangan tanpa mengambil daya tawar pada bidang politik. Dan pada akhirnya tahun 1912 SID berubah menjadi Sarekat Islam.

Tahun 1924 di Mataram, HOS Tjokroaminoto seorang pendiri dan sekaligus ketua Sarekat Islam (SI) menulis buku "**Islam dan Sosialisme**". Buku tersebut ditulis oleh Tjokro, di samping karena pada waktu itu tengah terjadi pemilihan-pemilihan ideologi bangsa, juga lantaran pada waktu itu paham ideologi yang digagas para tokoh dunia sedang digandrungi oleh kalangan pelajar Indonesia, di antaranya sosialisme, Islamisme, kapitalisme dan liberalisme.

Buku Tjokroaminoto ini diterbitkan kembali oleh penerbit TriDe tahun 2003, yang meskipun merupakan pikiran lama, tetapi menjadi penting bagi generasi muda sekarang untuk memberikan inspirasi bagi pemikiran-pemikiran kedepan, pemikiran-pemikiran mendasar, untuk membangun fondasi kokoh bagi kemajuan Indonesia. Memuat tentang pemahaman arti sosialisme, sosialisme dalam Islam, sosialisme Nabi Muhammad serta sahabat-sahabat nabi yang berjiwa sosialis dan komparasi-komparasi sosialisme ala Barat dengan sosialisme ala Islam.

Diantara bab yang menarik untuk di bahas adalah “Sosialisme Dalam Islam” Bab I hal 24-41 (Penerbit TriDe). Berikut ini petikan dari Sosialisme dalam Islam:

Peri-kemanusiaan adalah menjadi satu persatuan”, begitulah pengajaran di dalam Qur’an yang suci itu, yang menjadi pokoknya sosialisme. Kalau segenap peri-kemanusiaan kita anggap menjadi satu persatuan, tak boleh tidak wajiblah kita berusaha akan mencapai keselamatan bagi mereka semuanya.

Ada lagi satu sabda Allah di dalam Al Qur’an memerintahkan kepada kita, bahwa kita *“harus membikin perdamaian (keselamatan) diantara kita”*. Lebih jauh di dalam al Qur’an ada dinyatakan, bahwa *“kita ini telah dijadikan dari seorang-orang laki-laki dan seorang-orang perempuan”* dan *“bahwa Tuhan telah memisah-misahkan kita menjadi golongan-golongan dan suku-suku, agar supaya kita mengetahui satu sama lain”*.

Nabi kita Muhammad s.a.w. telah bersabda, bahwa *“Tuhan telah menghilangkan kecongkakan dan kesombongan*

di atas asal turunan yang tinggi. Seorang Arab tidak mempunyai ketinggian atau kebesaran yang melebihi seorang asing, melainkan barang apa yang telah yakin bagi dia karena takut dan baktinya kepada Tuhan". Bersabda pula Nabi kita s.a.w. bahwa *"Allah itu hanyalah satu saja, dan asalnya sekalian manusia itu hanyalah satu, mereka ampunnya agama hanyalah satu juga".*

Berasalan sabda Tuhan dan sabda Nabi yang saya tirukan ini, maka nyatalah, bahwa sekalian anak Adam itu ialah anggotanya satu badan yang beraturan (organich lichaam), karena mereka itu telah dijadikan dari pada satu asal. Apabila salah satu anggotanya mendapat sakit, maka kesakitannya itu menjadikan rusak teraturnya segenap badan (organisme).

Barang apa yang telah saya uraikan ini, adalah saya pandang menjadi pokoknya sosialisme yang sejati, yaitu sosialisme cara Islam (bukan sosialisme cara Barat). Akan menunjukkan, bahwa agama Islam itu sungguh-sungguh menuju perdamaian dan keselamatan, maka di dalam bab ini baiklah saya uraikan maknanya perkataan "Islam". Adapun makna ini adalah empat rupa:

1. Islam –menurut pokok kata "Aslama" –maknanya: menurut kepada Allah dan kepada utusannya dan kepada pemerintahan yang dijadikan dari pada umat Islam. ("Ya ayyuhalladzina amanu athi'ulloha wa'athi urrosula waulilamri minkum")
2. Islam –menurut pokok kata "Salima" –maknanya: selamat. Tegasnya: apabila orang dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah agama Islam, maka tak boleh tidak ia akan mendapat

keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, karena orang Islam itu harus bertabi'at selamat, begitulah menurut hadist sabda Nabi kita yang suci Mohammad s.a.w.: "*Afdhalul mukminina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wayadihi*", artinya: **orang mukmin yang teranggap utama dalam pada menjalankan agama Islam, ialah mereka yang mempunyai tabi'at selamat yang menyelamatkan sekalian orang Islam, karena dari pada bicaranya dan tangannya.**

3. Islam, menurut pokok-kata "Salmi" –maknanya: rukun. Tegasnya: orang yang menjalankan agama Islam haruslah rukun. (*An aqimuddina wala tatafarraq fiha*", artinya: Hendaklah (kamu) mendirikan agama (Islam) dan janganlah (kamu) sama berselisihan.
4. Islam, menurut pokok-kata "Sulami"– maknanya: tangga, ialah tangga atau tingkat-tingkat untuk mencapai keluruhan dunia dan keluruhan akhirat. Jikalau orang Islam dengan sungguh-usngguh menjalankkn agamanya, maka tak boleh tidak mereka akan mencapai derajat yang tinggi sebagai yang telah di jalankan oleh khulafaurrasyidin.

Dalam pada mengarangkan perintah-perintah yang berhubungan dengan jalannya ibadah, maka Nabi kita Muhammad s.a.w., ialah pengubah terbesar tentang hal-ikhwal pergaulan hidup manusia bersama (*sociale Hervormer*) yang terkenal oleh dunia, tiadalah melupakan asas-asas demokrasi tentang persamaan dan persaudaraan dan juga asas-asas sosialisme.

Menurut perintah-perintah agama yang telah ditetapkan oleh Nabi kita, maka sekalian orang Islam, kaya dan miskin, dari rupa-rupa bangsa dan warna kulit, pada tiap-tiap hari Jum'at haruslah datang berkumpul di dalam masjid dan menjalankan shalat dengan tidak mengadakan perbedaan sedikitpun juga tentang tempat dan derajat, di bawah pimpinannya tiap-tiap orang yang dipilih di dalam perkumpulan itu. Dua kali dalam tiap-tiap tahun sekalian penduduknya satu kota atau tempat, datanglah berkumpul akan menjalankan shalat dan berjabat tangan serta berangkul-rangkul satu sama lain dengan rasa persaudaraannya. Dan akhirnya tiap-tiap orang Islam diwajibkan satu kali di dalam hidupnya akan mengunjungi Mekah pada waktu yang telah ditentukan, bersama dengan berpuluh-puluh beratus ribu saaudaranya Islam.

Di dalam kumpulan besar ini, beribuan mereka yang datang dari tempat yang dekat tempat yang jauh sama bertemu disatu tempat pusat, semuanya sama berpakaian satu rupa yang sangat sederhana, buka kepala dan kaki telanjang, orang-orang yang tertinggi dan terendah derajatnya dari rupa-rupa negeri dan tempat, rupa-rupa pula bangsa dan warna kulitnya; kumpulan besar yang kejadian pada tiap-tiap tahun ini adalah satu pertunjukan sosial me cara Islam dan ialah contoh besar dari pada "persamaan" dan "persaudaraan". Di dalam kumpulan ini tidak nampak perbedaan sedikitpun juga diantara seorang raja dengan hambanya. Hal inilah bukan saja menanam tetapi juga melakukan (mempraktekkan) perasaan, bahwa segala manusia itu termasuk bilangannya satu persatuan dan diwajibkan

kepada mereka itu akan berlaku satu sama lain dengan persamaan yang sempurna sebagai anggota-anggotanya satu persaudaraan.

Kumpulan besar yang kejadian pada tiap-tiap tahun ini bukan saja menunjukkan persamaan harga dan persamaan derajat diantara orang dengan orang, tetapi juga menunjukkan persatuan maksud dan tujuan pada jalannya segenap peri-kemanusiaan. Berpuluh ribu orang laki-laki dan perempuan, tua dan muda, datang di lautan pasir itu dengan segala kemudaratannya di dalam perjalannya, hanyalah dengan satu maksud yaitu akan menunjukkan kehormatan dan kepujiannya kepada satu Allah, yang meskipun mereka bisa mendapatkan dimana-mana tempat dan pada tiap-tiap saat, tetapi kecintaan mereka kepada Allah itu diperumumkan di dalam satu kumpulan bersama-sama sebagai Tuhan mereka bersama, ialah Tuhan yang mencinta mereka semuanya –Rabbil ‘alamin. Cita-cita yang terlahir di dalam kumpulan besar ini ialah guna menunjukkan pada waktu yang bersama akan keadaan lahir yang membuktikan persaudaraan bersama dan rasa cinta-mencinta di dalam batin, agar supaya di dalam rohnya tiap-tiap orang Islam tertanamlah cita-cita bersal dari satu Tuhan dan cita-cita persaudaraan diantara manusia dengan manusia.

6.5 Diskusi

Ada dua tema yang menarik dan perlu didiskusikan lebih mendalam, yaitu: Pertama, terkait dengan bapak sosiologi yang dinisbahkan pada August Comte (1798-

1857) dan disisi lain ada tokoh legendaris yang hidup empat ratus tahun sebelum Comte, yaitu: Ibnu Khaldun (1332 –1406). Kenapa bukan Ibnu Khaldun, tetapi Comte?

Kedua, setelah membaca tokoh-tokoh sosilogi di dunia Islam diharapkan mampu melakukan rekonstruksi dan pendalaman berbagai pemikiran tersebut untuk melihat dinamika sosial-keagamaan di dunia Islam, khususnya di Indonesia.

BAB 7

POSISI AGAMA DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS

Bab ini akan mencoba menggunakan teori sosial dalam menjelaskan fenomena agama. Setidaknya ada dua teori yang cukup terkenal, yaitu: teori fungsional dan teori konflik.

7.1 Agama dalam Tinjauan Teori Fungsional

7.1.1 Teori Fungsional

Teori Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer (1820-1903), menampilkan bagian-

bagian masyarakat ini sebagai “organ” yang bekerja demi berfungsinya seluruh “badan” secara wajar.

Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan “upaya untuk menghubungkan, sebisa mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif. Selain itu, Parson (1902-1979) memperkenalkan dua macam mekanisme yang dapat mengintergrasikan sistem-sistem personal ke dalam sistem sosial, yaitu mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial. Melalui operasi kedua mekanisme ini, sistem personal akan menjadi terstruktur dan secara harmonis terlihat di dalam struktur sistem sosial.

Di dalam pengertiannya yang secara abstrak mekanisme sosial dipandang sebagai cara dimana pola-pola kultural, seperti nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, bahasa serta simbol-simbol lain diinternalisasikan ke dalam sistem persona. Mekanisme kontrol sosial melibatkan cara-cara di mana tindakan-tindakan sosial diorganisasikan di dalam sistem sosial untuk mengurangi ketegangan dan penyimpangan. Ada beberapa mekanisme spesifik dari kontrol sosial, antara lain: a) institusionalisasi, yang membuat pengharapan-pengharapan di dalam masyarakat menjadi jelas dan terkontrol, b) adanya sanksi, dimana anggota masyarakat terikat di dalamnya, c) aktivitas-aktivitas keagamaan, dimana ketegangan dan penyimpangan dapat diredam dan dikurangi, d) struktur kutub pengamanan, dimana kecenderungan-kecenderungan penyimpangan dapat di arahkan ke kondisi normal kembali, e) struktur-struktur reintegrasi, dan f) sistem

yang memiliki kemampuan dalam menggunakan kekuasaan dan tekanan.

7.1.2 Agama Bentuk Asosiasi Manusia yang Paling Mungkin Bertahan

Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi seluruh sistem sosial. Perbandingan lembaga/aktifitas keagamaan dengan lembaga/aktifitas sosial lain menunjukkan bahwa agama dalam pautannya berhubungan dengan masalah yang tidak diraba (*the beyond*) merupakan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang sepele dibandingkan bagi masalah pokok manusia. Namun kenyataannya lembaga keagamaan adalah menyangkut masalah aspek kehidupan manusia, mencakup aspek penting dan menonjol bagi manusia. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan merupakan bentuk asosiasi manusia yang paling mungkin untuk terus bertahan.

Agama menunjukkan seperangkat aktifitas manusia dan sejumlah bentuk-bentuk sosial yang mempunyai arti penting. Thomas F. O'Dea (1992) dalam bukunya sosiologi agama menulis bahwa banyak hal penting dalam perkembangan penelitian sosiologi agama sangat dipengaruhi oleh sudut pandang sosiologis yang dikenal sebagai teori fungsional. Dalam masalah ini agama merupakan salah bentuk perilaku manusia yang sudah terlembaga. Maka timbul pertanyaan sejauh manakah lembaga keagamaan seperti halnya lembaga sosial yang mempunyai fungsi manifes dan laten, dalam memelihara keseimbangan seluruh sistem sosial,

Teori fungsional melihat kebudayaan bagi manusia merupakan kreasi dunia penyesuaian dan kemaknaan, dalam konteks mana kehidupan manusia dapat dijalankan dengan penuh arti. Sedang dalam konteks teori fungsional kepribadian yaitu sejauh manakah agama mempertahankan keseimbangan pribadi melakukan fungsinya. Kebudayaan, sistem sosial dan kepribadian merupakan tiga aspek dari suatu kompleks.

Dari sudut pandang teori fungsional, agama menjadi penting sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan yang memeanng merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia. Dalam hal ini fungsi agama ialah menyediakan dua hal. Yang pertama, suatu cakrawala pandang tentang dunia luar yang tak terjangkau oleh manusia (*beyond*), dalam arti dimana deprivasi dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang mempunyai makna. Yang kedua adalah sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal di luar jangkauannya yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia untuk mempertahankan moralnya.

Teori fungsional menyediakan suatu jalan masuk yang bermanfaat untuk memahami agama sebagai fenomena sosial yang universal. Agama memberi kebudayaan sebagai tepat berpijak yang berada diluar pembuktian empiris atau tidak terbukti, atas dasar mana yang tertinggi yang dipostulatkan. Makna yang tinggi ini memberikan tolakan dasar bagi tujuan dan aspirasi manusia yang karea itu membangkitkan sikap kagum yang memungkinkan kesesuaian yang sinambung

dan efektif dengan nilai dan tujuan kebudayaan itu sendiri. Agama memberikan sumbangan pada sistem sosial dalam arti pada titik kritis pada saat manusia menghadapi ketidakpastian dan ketidakberdayaan, agama menawarkan jawaban terhadap masalah makna. Agama menyediakan sarana untuk menyesuaikan diri dengan frustrasi karena kecewa, apakah itu berasal dari kondisi manusia ataupun dari susunan kelembagaan masyarakat. Fungsi agama bagi kepribadian manusia ialah menyediakan dasar pokok yang menjamin usaha dan kehidupan yang menyeluruh, dan menawarkan jalan keluar bagi kebutuhan dan rasa haru serta penawar bagi emosi manusia.

Para ahli teori fungsional telah menekankan sumbangan yang diberikan agama demi kesinambungan masyarakat, khususnya yang tidak disengaja oleh pelaku manusia yang terlibat. Fungsi atenuasi hanya menunjukkan salah satu pengaruh agama terhadap masyarakat. Sedangkan para ahli sejarah dan filosof sosial menunjukkan bahwa agama sering mempunyai efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan individu. Isu-isu keagamaan menjadi salah satu masalah penyebab perang, keyakinan agama hanya menyatukan beberapa orang tertentu dan memisahkan yang lainnya. Sebagaimana dinyatakan Jonathan Swift; "kita mempunyai cukup agama hanya untuk membuat kita membenci, namun tidak cukup untuk membuat saling mencintai".

Dalam bukunya sosiologi agama, Thomas F. O'Dea (1992) menyatakan bahwa apa yang dimaksud sebagai tujuan agama adalah apa yang dilakukan oleh agama

terhadap individu dan masyarakat. Yang dimaksud dengan tujuan agama adalah “apa yang dimaksudkan seseorang dalam perilaku agamanya”. Fungsi dan tujuan ini dapat bersifat manifes atau laten. Fungsi manifes ialah fungsi yang disadari, bukan yang tidak disengaja oleh pelaku manusia. Fungsi laten ialah fungsi yang tidak disadari dan karena itu tidak disengaja oleh pelaku. Tujuan manifes menunjuk pada apa yang dimaksudkan oleh pelaku secara sadar: sedang tujuan laten menunjuk pada “pelaksanaan kebutuhan dan motivasi-motivasi yang sangat tidak disadari dan diakui oleh pelaku”.

Disfungsi agama, kekaburan hubungan antara agama dengan masyarakat, dan peranan agama dalam melahirkan serta memperbesar konflik sosial secara keseluruhan dipersulit oleh kenyataan bahwa pelem-bagaan agama itu sendiri menghasilkan seperangkat dilema yang secara struktural inheren. Dilema itu dianggap sebagai ciri khas perkembangan organisasi keagamaan dan dari sinilah sejumlah penyebab kendala internal dan fungsional. Dilema-dilema tersebut adalah dilema motivasi, dilema simbolis, dilema tertib administrasi, dilema pembatasan, dan dilema kekuasaan. Kelima dilema tersebut merupakan sumber penting bagi ketegangan dan pertikaian.

Dari ulasan buku sosiologi agama karya Thomas F. O’Dea (1992), ada beberapa hal perlu dianalisis dari buku tersebut. Yaitu apakah agama mempunyai peranan penting dalam masyarakat dan mengapa? Terlepas dari disfungsi yang disebabkan agama dalam perkembangan nilai-nilai baru masyarakat, agama

(baca: Islam) dan masyarakat adalah lebih merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan karena agama (baca: Islam) akan memberikan pengaruh dalam masyarakat tersebut yang akhirnya ketika agama dilaksanakan oleh setiap individu dengan konsekuen akan melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang kita cita-citakan dan idamkan bersama.

Kontribusi yang bisa diberikan oleh buku sosiologi agama karya Thomas F. O'Dea (1992) adalah sangat bermanfaat bagi pembaca dari kalangan mahasiswa sosial, atau peneliti sosial terutama mengenai penelitian agama dan masyarakat, perannya, fungsinya, dan pengaruhnya. Karena tulisan dalam buku ini sangat mendetail dan menyeluruh meski kurang obyektif karena yang disorot hanya perkembangan agama menurut sejarah barat saja.

7.2 Posisi Agama Dalam Tinjauan Teori Konflik

7.2.1 Teori Konflik

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya

adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Teori yang dikemukakan oleh Dahrendorf¹ ini terkenal

¹ lahir pada tanggal 01 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ayahnya Gustav Dahrendorf dan ibunya bernama Lina. Tahun 1947-1952, ia belajar filsafat, psikologi dan sosiologi di Universitas Hamburg, dan tahun 1952 meraih gelar doktor Filsafat. Tahun 1953-1954, Ralf melakukan penelitian di London School of Economic, lalu tahun 1956, ia memperoleh gelar Phd di Universitas London. Tahun 1957-1960 menjadi Professor ilmu sosiologi di Hamburg, tahun 1960-1964 menjadi Professor ilmu sosiologi di Tübingen, selanjutnya tahun 1966-1969 menjadi Professor ilmu sosiologi di Konstanz. Menjadi ketua Deutsche Gesellschaft für Soziologie (1967-1970), dan menjadi anggota Parlemen Jerman di Partai Demokrasi. Tahun 1970, ia menjadi anggota komisi di European Commission di Brussels, dan tahun 1974-1984, menjadi direktur London School of Economics di London.

Kemudian tahun 1984-1986, Ralf menjadi Professor ilmu-ilmu sosial di Universitas Konstanz. Dan tahun 1986-1997 menetap di Inggris dan menjadi warga negara Inggris (1988). Pada tahun 1993, Dahrendorf dianugerahi penghargaan gelar sebagai Baron Dahrendorf oleh Ratu Elizabeth II di Westminster, London, dan di tahun 2007 ia menerima penghargaan dari Princes of Asturias Award untuk ilmu-ilmu sosial. *Class and Class Conflict in Industrial* Karya-

sebagai teori konflik dialektika. Dahrendorf dengan tekun dan ulet menyanggah pandangan-pandangan Parsons (1902-1979), dan teori fungsional struktural secara keseluruhan. Pada tahun 1958, Dahrendorf sudah menyatakan bahwa pandangan-pandangan Parsonian ataupun teori fungsional struktural sebagai suatu utopis. Menurut Dahrendorf, teori tersebut menawarkan suatu gambaran masyarakat yang konsensual, integral dan statis. Sementara masyarakat seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang memiliki dua wajah, yaitu yang bersifat konsensual dan konflik. Untuk melepaskan diri dari kungkungan utopia itu, Dahrendorf memerlukan suatu model teori konflik sebagai substansi model teori fungsional struktural. Model yang lahir dari sudut pandang ini disebut sebagai perspektif konflik dialektika dan dianggap lebih sesuai dengan apa yang berlaku di dunia dibanding teori fungsional struktural.

Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik, yang berasal dari sumber lain seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah meletakkan landasan untuk teori-teori yang lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural-fungsionalnya. Teori konflik Ralf Dahrendorf menarik perhatian para ahli sosiologi

karya Ralf Dahrendorf *The Modern Social Conflict Society* (Stanford University Press, 1959) University of California Press: Berkeley dan Los Angeles, 1988) *Reflection on The Revolution in Europe* (Random House, New York, 1990).

Amerika Serikat sejak diterbitkannya buku "*Class and Class Conflict in Industrial Society*", pada tahun 1959.

Asumsi Ralf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi 'otoritas' selalu menjadi faktor yang menentukankonflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas

atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain: 1. Kelompok Semu (*quasi group*) 2. Kelompok Kepentingan (*manifes*) 3. Kelompok Konflik Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama.

Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis

Coser dimana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Menurut Dahrendorf, Adanya status sosial didalam masyarakat (sumber konflik yaitu: Adanya benturan kaya-miskin, pejabat-pegawai rendah, majikan-buruh) kepentingan (buruh dan majikan, antar kelompok, antar partai dan antar Adanya dominasi Adanya ketidakadilan atau diskriminasi. agama). kekuasaan (penguasa dan dikuasai).

Dahrendorf menawarkan suatu variabel penting yang mempengaruhi derajat kekerasan dalam konflik kelas/kelompok ialah tingkat dimana konflik itu diterima secara eksplisit dan diatur. Salah satu fungsi konflik atau konsekuensi konflik utama adalah menimbulkan perubahan struktural sosial khususnya yang berkaitan dengan strukturotoritas, maka Dahrendorf membedakan tiga tipe perubahan Perubahan keseluruhan personel didalam posisi struktural yakni: Perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi. Penggabungan kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Perubahan sistem sosial ini menyebabkan juga perubahan-perubahan lain didalam masyarakat antara lain Munculnya kelas, Dekomposisi tenaga kerja, Dekomposisi modal: menengah baru Analisis Dahrendorf berbeda dengan teori Marx, yang membagi masyarakat dalam kelas borjuis dan proletar sedangkan bagi Dahrendorf, terdiri atas kaum pemilik modal, kaum eksklusif dan tenaga kerja. Hal ini

membuat perbedaan terhadap bentuk-bentuk konflik, dimana Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (*domination*) dan yang dikuasai (*submission*), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.

Sedangkan Marx berasumsi bahwa satu-satunya konflik adalah konflik kelas yang terjadi karena adanya pertentangan antara kaum pemilik sarana produksi dengan kaum buruh. Dahrendorf memandang manusia sebagai makhluk abstrak dan artifisial yang dikenal dengan sebutan "*homo sociologious*" dengan itu memiliki dua gambaran tentang manusia yakni citra moral dan citra ilmiah. Citra moral adalah gambaran manusia sebagai makhluk yang unik, integral, dan bebas. Citra ilmiah ialah gambaran manusia sebagai makhluk dengan sekumpulan peranan yang beragam yang sudah ditentukan sebelumnya. Asumsi Dahrendorf, manusia adalah gambaran citra ilmiah sebab sosiologi tidak menjelaskan citra moral, maka manusia berperilaku sesuai peranannya maka peranan yang ditentukan oleh posisi sosial seseorang di dalam masyarakat, hal inilah masyarakat yang menolong membentuk manusia, tetapi pada tingkat tertentu manusia membentuk masyarakat. Sebagai *homo sociologis*, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan peran dan posisi sosialnya tetapi di sisi lain dibatasi juga oleh peran dan posisi sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi ada perilaku yang ditentukan dan perilaku yang otonom, maka keduanya harus seimbang. Salah satu karya besar Dahrendorf "*Class and class Conflict in Industrial Society*" dapat dipahami pemikiran Dahrendorf dimana asumsinya bahwa teori fungsionalisme struktural tradisional mengalami kegagalan karena teori ini tidak mampu untuk memahami masalah perubahan sosial, terutama menganalisis masalah konflik.

Dahrendorf mengemukakan teorinya dengan melakukan kritik dan modifikasi atas pemikiran Karl Marx, yang berasumsi bahwa kapitalisme, pemilikan dan kontrol atas sarana-sarana produksi berada di tangan individu-individu yang sama, yang sering disebut kaum borjuis dan kaum proletariat.

Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana, selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: mengapa konflik bisa terjadi? Melihat kepada masalah hubungan antar agama ini, tentu pertanyaan itu harus bisa dijawab terlebih dahulu untuk mencari langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah-masalah yang erat kaitannya dengan masyarakat yang multi-budaya. Menjawab pertanyaan ini, penyusun mencoba

menguraikan analisa berdasarkan teori konflik Marx, yang mana dikatakan bahwa di dalam suatu masyarakat dapat dijumpai hal yang dianggap baik oleh suatu golongan atau kelompok, tetapi bersifat relatif, yang berarti kebaikan itu belum tentu baik pula di mata masyarakat lain (golongan atau kelompok lain).

Manusia cenderung untuk berusaha mendapatkan hal-hal yang dianggap baik (menurut hemat mereka sendiri) tadi. Karena itulah bisa menimbulkan persaingan antara individu satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok lain, yang mencakup suatu proses untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan. Dan biasanya suatu yang dianggap baik ini adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok yang berkuasa (atau bisa dikatakan kelompok yang dominan). Marx menganggap bahwa proses pertikaian ini adalah proses pertentangan kelas.

7.2.2 Agama Sebagai Penyebab Dis-integrasi

Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi. Marx mengatakan bahwa analisis konflik menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Namun, sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya. Berbicara mengenai HAM, berarti membicarakan hal yang terkait dengan kebutuhan biologis (sandang, papan, pangan) dan juga terpenuhinya kebutuhan mental spiritual (rohani), yaitu kepercayaan atau agama.

Agama terkait dengan keyakinan, yang mana keyakinan ini sangat dijunjung tinggi dan dijaga oleh penganutnya. Seseorang dijadikan pemeluk agama yang sama dengan orang tuanya sejak lahir. Sosialisasi terhadap agama mencakup nilai-nilai, aturan, tata cara, upacara/ritual dan sebagainya yang harus dituruti. Dalam kelompok agama tersebut, kesucian agama dipegang oleh suatu kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh pemuka-pemuka agama (ulama atau paus), yang terkadang perkataan (fatwa) dari para pemuka agama ini tidak terbantahkan dan diikuti oleh semua penganutnya. Selain itu adanya perkawinan antara agama dengan negara sehingga agama memiliki kekuasaan yang besar (contohnya pada negara-negara yang memiliki agama mayoritas, seperti Indonesia. Atau daerah yang memiliki agama mayoritas, seperti Islam di Aceh, atau Kristen di Papua).

Penanaman tentang agama ini dimulai sejak lahir dan anak-anak, melalui jalur sistem pendidikan nasional. Norma dan aturan agama tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dalam pola pikir masyarakat umumnya. Hal inilah kemudian yang dapat memicu konflik apabila sedikit saja ada gerakan yang menentang arus dari norma dan aturan-aturan tersebut. Konflik ini kemudian mengarah kepada tindakan kekerasan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang atau melanggar norma agama yang telah berlaku di suatu masyarakat. Hal itu bisa kita lihat contoh pada kasus pengusiran warga terhadap tokoh aliran Salafi di Lombok Barat, pada tanggal 12 Mei 2008, disebabkan perbedaan pandangan atau praktik keagamaan.

Pengaruh dominasi juga menjadi penting dalam masalah ini. Terkadang di suatu daerah yang ber mayoritas memeluk agama tertentu akan menekan kelompok minoritas yang memeluk agama lain. Ketentuan perundang-undangan dan aturan serta norma dilandaskan pada ketentuan dan norma agama yang dominan di daerah itu. Contohnya di Aceh yang menerapkan hukum Islam. Kemudian, tekanan terhadap kaum minoritas ini juga mengungkung kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah. Kelompok yang memeluk agama mayoritas merasa terganggu apabila ada kelompok minoritas yang menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan mereka, apalagi berencana untuk membangun tempat ibadah. Situasi seperti ini juga dapat menyulut tindak kekerasan, contohnya pengrusakan kompleks Pura Sengkareng di Lombok Barat, pada tanggal 16 Januari 2008.

Kuatnya pengaruh norma agama ini juga mempengaruhi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Banyak tindakan kekerasan kepada perempuan yang disebabkan tafsir agama dan patriarkhis dan pandangan materialis yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek. Mereka yang berpandangan seperti ini menganggap bahwa tubuh perempuan dapat merusak moral masyarakat karena dapat memicu syahwat. Selain itu ada juga kasus di daerah tertentu (yang kekuatan agama mayoritasnya berkuasa) yang memaksakan perempuan mengenakan jilbab, seperti di Aceh. Contoh yang cocok dengan masalah ini adalah UU pornografi yang disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008. Peraturan ini kemudian menuai banyak kritikan dari

berbagai pihak terkait dengan kebebasan berkespresi dan persoalan diskriminasi.

Tiga uraian di atas (tentang perbedaan paham agama, pembangunan tempat ibadah, serta UU pornografi) semakin menegaskan implikasi dari teori konflik, yang mengatakan bahwa agama dapat menjadi pemicu ketidaksetaraan dalam masyarakat. Di satu pihak mengatakan hal itu benar namun pihak yang lain tidak berpendapat demikian sehingga memicu konflik. Mengenai kebebasan memeluk agama dan menjalankannya, tentu menjadi pertanyaan kembali, apa faktor yang menyebabkan konflik tetap saja terjadi meskipun peraturan, ketentuan, serta UU tentang kebebasan beragama telah ditetapkan. Seharusnya, sesuai logika, tentu dengan adanya UU tentang kebebasan beragama, tidak mungkin terjadinya konflik. Namun kenyataan serta data-data yang ada berkata lain.

Dalam menjawab pertanyaan yang kedua ini, penyusun mencoba melihatnya dari pendapat Marx, yang mengatakan bahwa agama adalah kendaraan politik kaum elite dalam mempertahankan status quonya. Sebagai contoh, dari data Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008, pada bulan Juni 2008, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi langkah gerak anggota dan pengurus Jemaat Ahamdiah Indonesia. Masalah yang dianggap sebagai penodaan agama ini diawali oleh konflik antar masyarakat dan kemudian berlanjut ke pengadilan. Pada tingkat tertentu, sudah jelas bahwa MUI (yang pastinya akan menegakkan hukum-hukum

Islam) dan beberapa ormas keislaman dan kelompok kepentingan memiliki andil besar untuk mendorong proses munculnya tuduhan penodaan agama Islam di tingkat masyarakat sipil. Hal ini kemudian menyebabkan sebagian kasus konflik di tingkat masyarakat (umumnya di lingkungan masyarakat yang tidak mengerti tentang masalah multi-budaya) jatuh kepada usaha penyerangan atau tindakan kekerasan kepada kelompok minoritas (Ahmadiyah) tersebut.

Selain itu bisa kita lihat contoh pada beberapa kasus lain seperti pentingnya agama dalam menentukan siapa berhak memilih siapa dalam jabatan publik, yang mana hal ini mengakibatkan ketegangan antar kelompok keagamaan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, puluhan aktivis organisasi Islam menolak rencana pengangkatan Viktor, S.H sebagai ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pasaman Barat, disebabkan perbedaan agama. Menurut mereka, di negeri Minangkabau yang mayoritas berpenduduk muslim tidak sepatutnya memiliki seorang pemimpin yang beragama Kristen. Contoh lain adalah kasus Rudolf M. Pardede, mantan Gubernur Sumatera Utara, yang sempat menyerukan masyarakat untuk memilih calon gubernur yang seiman (Kristen).

Politisasi agama di dalam Pemilu juga menjadi salah satu faktor timbulnya konflik. Banyak kaum elite yang menggunakan agama untuk mendukung kepentingan mereka, atau dengan agama pemerintah dapat menentukan kebijakan. Akan tetapi penggunaan dasar agama ini tentu hanya berdasar pada satu agama tertentu saja (mayoritas) yang dapat menimbulkan

kecemburuan sosial. Contohnya MUI di empat propinsi di Kalimantan merekomendasikan bahwa Golput adalah tindakan yang dilarang agama. Meskipun kekritisn umat dan pemimpin agama cukup tinggi dalam hal politisasi agama, namun usaha-usaha ke arah politisasi agama masih terus terjadi.

Dari contoh-contoh di atas, kita dapat melihat implikasi dari teori konflik Marx yang menyatakan bahwa agama menjadi kekuatan kaum elite politik atau kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan pengaruhnya (kekuasaannya) sehingga akan terjadi konflik karena kaum minoritas akan melakukan brontak untuk merebut kekuasaan (sesuai dengan teori dialektis).

Penyebab terakhir yang mungkin bisa menjadi bahan renungan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makna pluralisme itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat lebih mementingkan apa yang baik untuk agama atau golongan yang mereka anut. Di sini lah dituntut kebijakan dari pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Seyogyanya pemerintah mengambil langkah untuk menanamkan makna pluralisme tersebut kepada masyarakat melalui sistem pendidikan nasional dan dimulai dari usia dini.

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, penyusun mendapatkan beberapa kesimpulan mengenai masalah yang terjadi antara agama-agama di Indonesia (dalam sudut pandang teori konflik), antara lain sebagai berikut:

1. Di Indonesia masih banyak terjadi konflik yang disebabkan oleh agama itu sendiri. Hal ini disebabkan

oleh kurangnya toleransi antar umat beragama karena masih merasa agama yang mereka anut adalah yang paling benar.

2. Masih terdapatnya kelompok agama yang dominan di beberapa daerah di Indonesia yang dapat menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang memarginalkan kelompok lain.
3. Banyak aturan-aturan baru dari suatu agama yang membuat rumit agama itu sendiri sehingga menimbulkan pertentangan dengan norma-norma yang ada, yang mengakibatkan konflik.
4. Penyebab utama terjadinya konflik agama adalah disebabkan oleh pengaruh kelompok agama itu sendiri yang sangat dominan di masyarakat. Selain itu agama juga menjadi alat bagi kaum elite tertentu untuk mempertahankan kekuasaannya.

Dari sekian banyak kasus yang telah diuraikan, pemerintah sudah berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun, penerapan upaya tersebut kurang maksimal karena masih banyak sifat egois dari masing-masing penganut agama yang fanatik sehingga tidak mau mengindahkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Saran dari penyusun dalam menghadapi masalah hubungan antar agama ini adalah kembali kepada diri individu masing-masing. Karena umat antar agama seharusnya memiliki keterbukaan dalam menanggapi dan melihat perbedaan yang ada di antara mereka. Selain itu, sangat diharapkan kebijakan dari pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan

malasah konflik yang terjadi antar agama-agama di Indonesia. Seyogyanya pemerintah mengambil langkah untuk menanamkan makna pluralisme, multikultural, dan masyarakat yang majemuk kepada masyarakat melalui sistem pendidikan nasional dan dimulai dari usia dini.

7.3 Diskusi

Tentunya teori yang digunakan dalam sosiologi tidak hanya terkait dengan teori fungsional maupun teori konflik. Maka disini mahasiswa untuk mendalami teori-teori lain dalam sosiologi untuk menjelaskan fenomena agama dan masyarakat.

BAB 8

ISU-ISU SOSIOLOGI AGAMA

Kehidupan keagamaan masyarakat dewasa ini semakin kompleks. Munculnya berbagai aliran baru dan konflik yang terjadi baik intra dan antar agama menunjukkan perkembangan manusia yang labil. Isu-isu agama yang berkembang seolah dapat menjadi percikan yang sewaktu-waktu dapat membakar darah mereka. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung membawa dampak buruk bagi eksistensi agama. Moralitas dan perpecahan menjadi masalah social yang senantiasa dapat memicu terjadinya konflik dan kekerasan.

Lukman Hakim Saifuddin¹ (2015) menyampaikan ada lima isu penting terkait kehidupan keagamaan yang dinilainya patut menjadi perhatian bersama. *Pertama*, soal posisi penganut agama-agama di luar enam agama. Menag menyampaikan, adalah fakta sosiologis, saat ini di Tanah Air ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan

¹ Menteri Agama RI (2014-2019)

keyakinannya, di luar enam agama yang sudah dilayani pemerintah.

Kedua, soal kasus-kasus pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi. Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal kerukunan beragama itu dirasakan belum menggembirakan. "Fakta masih adanya kasus-kasus di seputar rumah ibadah memunculkan pertanyaan, di mana in-efektivitasnya," katanya.

Ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Kemunculan gerakan ini, yang dalam hal tertentu dalam pandangan Menag dinilai berlebihan.

Keempat, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Ditegaskan Menag, hal ini harus betul-betul diperhatikan, karena benar-benar mengabaikan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda.

Disamping berbagai isu di atas tentunya masih banyak isu-isu yang lain yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini, antara lain, yaitu: konflik, terorisme, sekulerisme, kekerasan, atau isu yang paling hangat saat ini ialah banyaknya bermunculan aliran-aliran keagamaan baru khususnya di Indonesia. Kelompok keagamaan yang dikategorikan sesat oleh MUI sebut saja NII, Ahmadiyah, dan sebagainya. Maka sudah

seharusnya bagi seorang sosiolog menjadi kewajiban untuk menciptakan pandangan baru yang dapat menjembatani keinginan kolektif pemeluk agama dengan ide-idenya tentang masyarakat sehingga tercipta *harmony society*.

8.1 Jaringan Islam Liberal (JIL)

Diantara kelompok keagamaan tersebut, yang menarik untuk dikaji ialah Jaringan Islam Liberal (JIL). JIL menawarkan cara pandang baru dalam melihat agama dengan mengangkat isu-isu pluralisme dan penafsiran baru agama untuk lepas dari paham-paham islam sekarang yang menurutnya konservatif dan kaku. Dalam essay ini akan membahas JIL sebagai suatu kelompok keagamaan berbentuk jaringan yang menekankan pada kebebasan yang kebablasan. Pandangan JIL mengindikasikan tidak adanya pemisahan antara 'yang sakral' dan 'yang profan'. Kebebasan JIL mencakup kebebasan individu dalam berpikir dan menafsirkan agama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pandangan JIL, pandangan islam selama ini harus mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi sekarang agar islam dapat hidup dan berkembang secara kreatif untuk menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan yang universal.

Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Pluralisme Dalam situs resminya, JIL menerbitkan sebuah artikel dari salah satu anggotanya Prio Pratama yang berjudul "Pseudo Toleransi: Metode Dakwah al-Qardlawi dan Masa Depan Pluralisme". Dalam tulisan tersebut Prio

mengungkapkan pandangannya bahwa semangat toleransi yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf al-Qardlawi adalah toleransi semu atau pura-pura. Menurutnya, toleransi yang didakwahkan oleh al-Qardlawi, Hasyim Muzadi dan ulama-ulama MUI, sebetulnya tidak lebih dari respon terhadap desakan fakta sosiologis kondisi umat yang dipandang makin radikal.

Dalam pernyataannya al-Qardlawi mengungkapkan jika dikatakan bahwa arti pluralisme agama (*al-ta'addudiyah al-diniyyah*) adalah semua agama itu benar (haq), dan pendapat ini menurut kami tidak benar, maka pluralisme agama yang sesungguhnya adalah menegaskan bahwa sesungguhnya agamaku adalah yang benar, dan agama orang lain adalah salah (bathil). Pernyataan tersebut dianggap tidak sepaham dengan nilai yang dianut JIL. Toleransi yang demikian adalah konsep toleransi yang setengah-setengah, penuh kompromi dan tidak didasari oleh niat yang utuh. Toleransi dan pluralisme tidak perlu disikapi sebagai ancaman akidah, karena setiap orang memiliki preferensinya sendiri-sendiri. Berdakwah kepada non muslim dalam rumusan ini, tidak lagi identik dengan mengkonversi iman mereka, tapi cukup mengajak mereka melakukan kerjasama sosial yang sehat.

8.2 Sekulerisme

Sekularisme yang dalam bahasa Arabnya dikenal "*al-'Ilmaniyyah*", diambil dari kata ilmu. Konon, secara mafhum, ia bermaksud mengangkat martabat ilmu. Dalam hal ini tentu tidak bertentangan dengan

paham Islam yang juga menjadikan ilmu sebagai satu perkara penting manusia. Bahkan, sejak awal, Islam menganjurkan untuk memuliakan ilmu. Tetapi sebenarnya, penerjemahan kata sekular kepada "*al-'Ilmaniyyah*" hanyalah tipu daya yang berlingung di balik slogan ilmu.

Istilah **sekularisme** pertama kali digunakan oleh penulis Inggris George Holyoke pada tahun 1846. Walaupun istilah yang digunakannya adalah baru, konsep kebebasan berpikir yang darinya sekularisme didasarkan, telah ada sepanjang sejarah. Ide-ide sekular yang menyangkut pemisahan filsafat dan agama dapat dirunut baik ke Ibnu Rushdi dan aliran filsafat Averoisisme. Holyoake menggunakan istilah sekularisme untuk menjelaskan pandangannya yang mendukung tatanan sosial terpisah dari agama, tanpa merendahkan atau mengkritik sebuah kepercayaan beragama.

Kamus Dunia Baru oleh Wipster merinci makna Sekularisme dengan menyebutkan sebagai berikut, Yaitu:

Semangat Keduniaan atau orientasi "duniawi" dan sejenisnya. Secara khusus adalah undang-undang dari sekumpulan prinsip dan praktek (*practices*) yang menolak setiap bentuk keimanan dan ibadah. Keyakinan bahwa agama dan urusan-urusan gereja tidak ada hubungannya sama sekali dengan soal-soal pemerintahan, terutama soal pendidikan umum.

Kamus Oxford menyebutkan sebagai berikut,

Sekularisme artinya bersifat keduniaan atau materialisme, bukan keagamaan atau keruhaniaan. Seperti pendidikan sekuler, seni atau musik sekuler pemerintahan sekuler, pemerintahan yang bertentangan dengan gereja.

Sekularisme adalah pendapat yang mengatakan bahwa agama tidak layak menjadi fondasi ahlak dan pendidikan.

Sementara Kamus Internasional Modern ketiga menyebutkan:

Sekularisme ialah suatu pandangan dalam hidup atau dalam satu masalah yang berprinsip bahwa agama atau hal-hal yang bernuansa agama tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan, atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan harus dijauhkan darinya. Maksudnya adalah: Politik sekuler murni dalam pemerintahan, misalnya yang terpisah sama sekali dari agama.

Sekularisme atau sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu. Sekularisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan.

Pendukung sekularisme menyatakan bahwa meningkatnya pengaruh sekularisme dan menurunnya pengaruh agama di dalam negara tersekularisasi adalah hasil yang tak terelakan dari Pencerahan yang karenanya orang-orang mulai beralih kepada ilmu pengetahuan dan rasionalisme dan menjaduh dari agama

dan takhyul. Sementara Penentang sekularisme melihat pandangan diatas sebagai arrogant, mereka membantah bahwa pemerintahan sekular menciptakan lebih banyak masalah dari paa menyelesaikannya, dan bahwa pemerintahan dengan etos keagamaan adalah lebih baik.

Seperti yang dikutip dari penjelasan Dr. Yusuf Qardhawi bahwa Sekularisme yang moderat adalah sekularisme liberal yang dianut oleh negara-negara Eropa/Barat dan Amerika. Negara-negara yang disebut dengan "Alam Bebas". Negara-negara yang menggembar-gemborkan kebebasan dan hak asasi manusia secara umum, termasuk kebebasan beragama dan kebebasan manusia untuk komitmen terhadap. Sekularisme jenis ini adalah sekularisme Marxis yang dianut oleh Uni Soviet dan Rusia yang atheis serta negara lain yang sepaham. Sekularisme jenis ini sangat memusuhi agama dan berusaha untuk melenyapkannya termasuk memberihkannya dari dalam masjid atau gereja, karena agama bagi mereka adalah musuh yang bertentangan dengan pandangannya, oleh karena itu harus dikubur.

Sedangkan sekulisme dalam konteks Barat beangkat dari asumsi bahwa Agama adalah suatu usaha manusia untuk membentuk suatu yang keramat atau sakral. Sakral itu sendiri dapat dipahami dalam kaitannya dengan teologis manusia itu sendiri. Manusia dengan tindakan sosialnya berharap mempunyai makna dari apa yang telah dikerjakan. Setiap tindakan tidak hanya bertujuan untuk kepentingan yang bersifat duniawi semata, melainkan juga untuk mendapatkan makna dari sesuatu yang maha tinggi yang berada di luar dunia manusia.

Tujuan atas tindakan untuk kepentingan duniawi itu sendiri disebut dengan 'yang profan'. Manusia akan melakukan berbagai cara yang bersifat obyektif agar dapat hidup di masyarakat. Tindakan-tindakan yang bersifat normatif tersebut dilakukan agar kehidupan sosial dirinya tidak terganggu. Dari segala tindakan manusia baik 'yang sacral' maupun 'yang profan' tidak lain untuk memenuhi kebutuhan baik fisik maupun jiwanya. Keseimbangan antara keduanya menjadikan manusia memiliki dirinya seutuhnya. Oleh karena itu, pemisahan antara yang sacral dan yang profan menjadi penting ketika manusia dihadapkan benturan antara keyakinan dan intelektualnya.

Dari isu kontradiktif mengenai pluralisme agama, saatnya manusia didesak untuk dapat membedakan mana 'yang sacral' dan mana 'yang profan'. Dalam melihat pluralisme, islam mayoritas sebagai kepercayaan main stream lebih menganggap paham ini salah. Pluralisme harus dipahami sebagai pluralitas social dalam bentuk toleransi bukanlah pluralitas teologis yang menganggap semua agama itu benar.

Jadi berbeda implementasi sekulerisme di Barat dibanding dengan negara-negara Muslim, termasuk di Indonesia. Sekulerisme selalu menimbulkan berbagai persoalan, baik hubungan negara dan agama.

8.3 Pluralisme

Keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 yang menolak faham pluralisme agaknya menjadi sinyal bahwa ada wacana seputar

agama di negeri ini yang problematis. MUI dalam fatwanya melihat bahwa pluralisme adalah faham yang mengajarkan kesamaan semua agama sehingga itu berarti juga menyiratkan faham relativisme. Malah, pluralisme mendaku bahwa tidak boleh ada klaim mutlak mengenai ajaran (di sini MUI secara tidak langsung, menurut saya, melihat adanya aspek ideologis dalam pluralisme), yang bagi MUI akan berakibat pada persoalan teologis "bahwa semua pemeluk agama akan hidup berdampingan di surga".

Tampaknya ada posisi yang tersirat dalam cara bicara MUI di atas, yaitu bahwa wacana pluralisme bukanlah wacana yang sudah jelas dalam kata itu sendiri dan wacana pluralisme adalah wacana yang sarat dengan beban ideologis dan juga teologis. Posisi yang berhati-hati atas pluralisme tampak dalam tulisan Franz Magnis-Suseno (2006). Beliau tampaknya menerima pluralisme sebagai penjelasan keadaan sosial, tetapi menolak kalau pluralisme dijadikan sebagai sikap teologis (dengan memberi alternatif, yaitu inklusivisme teologi) walau beliau tetap menyarankan perlunya sikap pluralis sebab sikap inilah yang memungkinkan seseorang menjadi toleran.

Di sini kita bisa paham akan posisi hati-hati Magnis-Suseno dan posisi tegas yang tecermin dalam fatwa MUI itu sebab memang pluralisme bukanlah istilah yang jelas dan mudah. Di pihak lain, saya malah hendak menyatakan betapa tertinggalnya wacana sosiologi agama di negeri ini sehingga silang sengketa seputar pluralisme itu tampak berujung dalam deadlock. Atau, akibat tidak adanya wacana sosiologis seputar

pluralisme agama, maka belum-belum pluralisme ditanggapi sebagai persoalan ideologis (faham yang mendaku) ataupun teologis (beragama yang relativistis) sehingga ia menjadi medan konflik.

Tertinggalnya sosiologi agama di negeri ini dalam memberi perspektif yang non-ideologis ataupun non-teologis terhadap pluralisme juga kelihatan dalam kesemrawutan pemakaian istilah pluralisme itu sendiri. Seolah, tanpa memilah-milah, fakta kemajemukan agama, multikulturalisme, demokrasi, dialog, dan keterbukaan teologis adalah isi keranjang dan makna pluralisme itu sehingga kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) pro-demokrasi, Gerakan Perempuan, Inter-faith groups, pejuang masyarakat adat, dan intelektual (agama) liberal mengambil posisi berhadapan (malah frontal) dengan semua institusi yang dianggap konservatif dan eksklusif (yang secara karikatural dilekatkan pada MUI).

Padahal, dalam wacana sosiologis agama kontemporer—yang sayangnya tidak dikembangkan di Indonesia—pluralisme mengandung paling tidak tiga kenyataan yang mendasar dalam masyarakat modern, kenyataan yang belum tentu dapat dengan mudah dikelola (James Beckford, 2003). Kalau elemen-elemen pluralisme ini dikenal, mungkin saja benang kusut tidak perlu terjadi dalam wacana kita.

Pertama, pluralisme adalah ungkapan deskriptif, mengenai *de facto* kemajemukan agama (*religious diversity*). Penjelasan ini tentu tampak gamblang walau ada sejumlah turunan maknanya. Dengan kemajemukan tentu juga berarti ada derajat otonomi

dalam tradisi agama masing-masing, di mana ia mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Jadi, ada kemandirian institusional dari agama tersebut. Yang tak kalah menarik dari ihwal kemajemukan ini ialah bahwa dalam perkembangan mutakhirnya, posisi otonomi agama tadi mendorong transformasi internalnya, yang antara lain mengakibatkan adanya kemajemukan internal dalam satu agama (sekte-sekte).

Para ahli sosiologi agama melihat adanya sejumlah pola transformasi internal agama tersebut: antara lain dalam se bentuk sinkretisme (di mana ada percampuran yang melahirkan wajah baru agama itu), bisa juga pematirian aspek baru yang menyepuh agama lokal (*bricolage*, sesuatu yang umum dalam ekspresi agama di Afrika), atau proses belajar, meminjam dan berkembang walau tetap mempertahankan orisinalitas agamanya (bentuk *hybrid*). Pendek kata, pluralisme internal agama menunjukkan adanya diferensiasi di dalam agama tersebut yang menuntut semacam keleluasaan dari agama itu dalam menentukan batas-batas dirinya.

Kedua, pluralisme juga berarti pengakuan publik akan eksistensi agama-agama tertentu, yang nanti dilanjutkan pada pengakuan negara. Pengakuan publik secara sosiologis berarti ada semacam penerimaan publik bahwa eksistensi agama tertentu itu ada tanpa menjadi ancaman bagi dirinya. Demikian juga makna pengakuan negara, yaitu bahwa agama tersebut tidak akan mengguncang kekuasaannya sehingga memang dalam setiap konteks (masyarakat atau bangsa) selalu ada kepelbagaian pola dan batas-batas penerimaan atas agama-agama yang masuk. Di sini (kalau memakai

terminologi agama di Indonesia) kita membicarakan pluralisme sebagai sikap toleran (di mata publik) dan sebagai kerukunan (di mata pemerintah).

Dalam konteks pemaknaan pluralisme sebagai toleransi dan kerukunan tadi, terbentang semacam tarik-ulur yang tak terhindari. Kalau "kita" menerima lima atau enam agama resmi, itu berarti mereka kita akui sebagai kompetitor yang sah dalam menjalankan dan menyebarkan misi agamanya. Namun, segera juga persoalan ini mendatangkan persoalan baru, adakah batas kebebasan beroperasinya agama yang sudah "kami" akui eksistensinya itu? Bukankah kebebasan itu tidak boleh sampai mengguncang konsensus yang semula ada bahwa setiap agama hendaknya juga beroperasi demi menjaga integritas masyarakat (dan negara) tersebut.

Dalam perkembangan tertentu, masing-masing masyarakat malah menerbitkan seperangkat hukum untuk menjaga integritasnya atas kemungkinan tergerusnya agama tertentu akibat beroperasinya agama lain. Pluralisme agama dalam konteks itu memang menolak free-fight liberalism, juga menolak pasar bebas agama-agama sebab selalu ada batas-batas penerimaan sosial dari masyarakat terhadap karya dan sepak terjang agama-agama.

Pluralisme di sini berarti seperti yang diserukan dalam semboyan bhineka tunggal ika ('meskipun beragama, tunggal juga') itu, yang dipertegas dengan sambungan kata-kata *tan hana dharma mangrwa* ('tiada pluralisme dalam agama', di sini saya memakai terjemahan Rachmat Subagya dalam bukunya *Agama*

Asli Indonesia, 1981). Dengan kata lain, sekalipun saat itu di Jawa terjadi pluralisme ("agama primal" Jawa, Hindu, dan Buddha hidup berdampingan), ada batas-batasnya: ketiga agama itu bisa ditolerir selama mereka rukun dan konsensus dalam masyarakat saat itu tidak dilanggar (kala itu konsensusnya masih bercorak kosmis, yaitu bahwa dharma itu bagaimana pun satu jua).

8.4 Terorisme

Tidak sulit bagi siapapun untuk menyimpulkan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menentukan, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Sehingga adanya rasa takut dan cemas yang melanda warga masyarakat yang diakibatkan oleh terorisme, maka para teroris telah merampas hak asasi orang lain tentang rasa aman. Apalagi jika tindakan itu menimbulkan korban nyawa yang sering tidak sedikit jumlahnya. Dengan demikian, baik melalui pemahaman logika sederhana maupun dengan analisa normatif, telah dapat dibuktikan bahwa tindakan terorisme merupakan kejahatan terhadap HAM.

Terorisme sendiri sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan

untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Menurut *Muladi*, bentuk-bentuk terorisme seiring perkembangan zaman dapat diperinci sebagai berikut:

1. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
2. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nationalist*) sebagai “terorisme negara”. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.
3. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Gambaran yang disampaikan *Muladi* di atas, tentu saja tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan dan perubahan wajah terorisme dari waktu ke waktu.

Hal ini pula yang menyebabkan sampai saat ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Berbagai konsepsi dan definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai terorisme, sangat beragam mengikuti perkembangan corak tindakan tersebut yang sangat dinamis. Sebagian ahli berpendapat bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Definisi lain menyebutkan bahwa terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

Dari sekian banyak definisi tersebut, dapatlah dipahami bahwa dari tindakan tersebut akan timbul akibat yang sangat merugikan, baik dari segi materi maupun immaterial. Bahkan lebih daripada itu, tindakan tersebut patut diduga dapat menimbulkan korban nyawa manusia yang tidak ada hubungan dengan tujuan dilakukannya tindakan tersebut. Tegasnya, istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif, karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Pada titik inilah terorisme mendapat predikat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berbagai kajian menyimpulkan, bahwa terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*Extra Ordinary crime*" dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "*crime against humanity*". Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.

Prinsip tersebut pada satu sisi memang benar, namun di sisi lain justru menimbulkan persoalan tersendiri. Bahwa terorisme dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan itu benar, namun cara-cara penanganan dan penanggulangan kejahatan tersebut justru seringkali juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sinilah muncul pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dan membutuhkan pengkajian yang mendalam dan menyeluruh. Pertanyaan tersebut

adalah, apakah cukup manusiawi apabila penanganan terhadap kasus terorisme harus dilakukan dengan memperlakukan para tersangka teroris secara tidak manusiawi? Ataukah justru sebaliknya, masyarakat akan merasa sangat puas ketika melihat aparat keamanan berhasil 'menghabisi' para tersangka teroris?

Pertanyaan tersebut muncul sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia khususnya, umumnya para pemimpin dunia internasional. Kebijakan yang agaknya menyimpang dari konsep *Extra Ordinary Measure*. Konsep ini lebih dipahami sebagai upaya dan tindakan represif yang luar biasa oleh aparat penegak hukum daripada upaya preventif luar biasa untuk membangun sistem yang dapat menangkal terjadinya tindakan terorisme. Upaya represif tersebut diantaranya kebijakan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa teroris serta perintah tembak di tempat dalam rangka melakukan perburuan terhadap tersangka teroris.

Dalam konteks Indonesia, konsep *Extra Ordinary Measure* dalam pemberantasan tindak pidana terorisme harus dipahami sebagai kebijakan dan langkah anti-sipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan merupakan masalah hukum dan penegakan hukum semata karena juga terkait masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi dan juga keterkaitannya dengan pertahanan negara. Masih terdapat banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun negara untuk melakukan pemberantasan

terorisme dan bahkan penaggulangan terhadap kejahatan lain pada umumnya.

Upaya tersebut misalnya dengan memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat, adat, budaya, agama dan bahkan tokoh teroris sendiri untuk menyebarkan penangkal anti terorisme. Seperti halnya virus yang dapat ditangkal atau ditanggulangi dengan meramu inang dari virus itu sendiri untuk membunuh penyakit serta memulihkan akibat yang ditimbulkannya. Agaknya logika ini yang perlu dikembangkan sebagai *Extra Ordinary Measure* dalam penanggulangan tindakan terorisme di Indonesia. Di samping senantiasa merumuskan kebijakan hukum yang tetap menjunjung tinggi HAM.

8.5 Radikalisme Agama

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.

Suatu paham akan memiliki dampak manakala paham itu dimanifestasikan dalam kehidupan. Paham

yang dianut oleh individu atau kelompok lahir dari pola interaksi yang inten terhadap nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Biasanya paham itu melahirkan dan menuntut seseorang atau kelompok melakukan gerakan-gerakan tertentu yang sudah menjadi agendanya. Karena itu, dalam banyak literatur pemahaman seseorang erat kaitannya dengan lingkungan sosial dimana ia berinteraksi secara inten dan sadar. Sehingga pada akhirnya membentuk suatu pemikiran atau cara pandang tentang sesuatu yang dianggap benar oleh dirinya. Ragam pemikiran atau paham tersebut dicerna dan dijadikan sandaran dalam melakukan tindakan yang positif maupun yang negatif. Misalnya paham tentang radikalisme, paham tersebut muncul karena ada faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakanginya. Terlepas apakah pengaruh internal dalam diri atau individunya atau pengaruh eksternal yang mendorong ia melakukan cara-cara yang dianggap radikal itu.

Secara bahasa radikalisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik, baik melalui kekerasan maupun dengan cara perang pemikiran. Dalam pengertian lain, radikalisme juga diartikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai tarap kemajuan. Perbedaan radikalisme terletak pada cara mengaktualisasikan dari cara pandangnya itu. Sehingga muncul dua kutub yang berlawanan, yaitu antara kutub positif dan kutub negatif. Dua kutub inilah yang membedakan radikalisme sebagai paham seseorang atau kelompok. Radikalisme

positif didasarkan pada tuntutan reformasi struktural dalam sistem sosial yang korup, atau munculnya banyak ketimpangan sosial seperti ketidakadilan dan eksploitasi yang melampaui batas. Dalam konteks ini radikalisme disampaikan dengan cara yang santun dan elegan dan tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melahirkan dan merugikan orang banyak. Pada posisi yang kedua, radikalisme dalam agama diakibatkan oleh sempitnya pemahaman terhadap nilai dan substansi agama. Sehingga menghalalkan segala cara, seperti perbuatan anarkis dan penzaliman. Pada posisi yang kedua ini radikalisme yang disertai dengan kekerasan dan membolehkan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, adalah radikalisme dalam pengertian negatif.

Dengan demikian, radikalisme memang muncul dan ada, misalnya dikalangan **agama Hindu**, radikalisme muncul ketika kalangan hindu merespon penjajahan Inggris yang menguasai India. Respon itu memunculkan gerakan Bajrangdal, Rashtriya Svayam Sevak (RSS). Dalam konteks yang lain, radikalisme muncul dengan sosok Mahatma Gandhi. Ia tokoh radikal dalam tata pikir, namun santun dalam tindakan. Pemahaman agama Hindunya sangat mendalam dan mampu merealisasikannya sehingga ia dikenal dengan sosok yang humanis. Walaupun pada akhirnya ia meninggal karena ditembak mati oleh kelompok RSS, demikian pula ditembaknya Indira Gandhi, ia ditembak oleh pengawal kelompok Sikh dan terakhir dibunuhnya Rajiv Gandhi karena bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok garis keras Hindu yaitu Elam Tamil. Lalu, radikalisme

dalam agama Budha muncul pada masa dinasti Sungga berkuasa. Setelah mereka membunuh raja Brhadatha, maka hulubalang Pusyamitra Sungga naik tahta, ia seorang ortodox yang dikenal dengan kebencian dan penindasannya terhadap para biksu. Ia merusak wihara dan membunuh para biksu dengan imbalan 100 keping koin emas untuk setiap kepala biksu yang bertentangan dengan dirinya.

Sementara radikalisme dalam agama Kristen muncul pada abad XVI, dengan adanya reformasi yang dilakukan oleh kelompok Protestan. Reformasi tersebut memunculkan Gereja-gereja Protestan. Sehingga perpecahan tersebut merupakan awal mula atau benih munculnya radikalisme dalam agama Kristen. Tokohnya adalah seorang Marthin Luther King yang dianggap sebagai kaum radikal oleh kelompok Katholik, Marthin dianggap mampu melakukan perubahan dalam struktur gereja baik secara fisik maupun ajaran keagamaannya.

Dalam agama Yahudi pun munculnya radikalisme ketika terjadi pertentangan antara Yahudi orthodox dan Yahudi orthodox ekstrim. Kaum Yahudi orthodox menerima paham zionisme dan konsep Negara Israel. Mereka berpandangan bahwa untuk membangun Negara Israel raya tidak perlu menunggu kedatangan seorang nabi, namun cukup dengan bekerja keras dalam membangun negara Israel. Sementara kelompok Yahudi orthodox ekstrim menyangkal anggapan ini. Mereka menolak paham zionisme dan konsep Negara Israel. Menurut kelompok garis keras ini tidak boleh mendahului takdir Tuhan karena Tuhan akan

mengirimkan nabi yang akan membangun Negara Israel raya. Yahudi ini sangat ekstrim, radikal, dan rasistis seperti Baruch Goldstein yang membantai umat Islam yang sedang sholat subuh pada tahun 1994. Seorang Yigal Amir yang membunuh PM Yitzhak Rabin karena ia katanya diperintah oleh Tuhan. Dua kelompok Yahudi tersebut sampai hari ini melakukan penjajahan atas warga Palestina.

Dikalangan Islam, radikalisme ekstrim muncul pertama kalinya pada masa pemerintahan Ustman bin Afan, dalam bentuk gerakan yang dipimpin oleh Abdulah bin Saba' bersama dua ribu pengikutnya yang menghendaki untuk digantinya Usman bin Afan dari kedudukannya sebagai khalifah dengan Ali bin Abi Tholib. Karena mereka beranggapan bahwa Ali bin Tholib lebih dekat hubungan keluarganya dengan Rasul SAW, dibanding dengan Ustman. Kelompok Abdullah bin Saba' berhasil membunuh Khalifah Ustman bin Afan, dan Negara dalam keadaan kacau, sehingga para sahabat nabi mendesak Ali bin Abi Tholib untuk memangku jabatan khalifah untuk menghindari kehancuran Negara. Bahkan dalam sejarah gerakan radikalisme pada masa Ali semakin berkembang dengan munculnya gerakan radikal ekstrim Ibnu Saba' yang menganggap Ali dan anak cucunya sebagai titisan Tuhan. Pada masa itu pula teror dan kekacauan terjadi.

Dengan demikian jika melihat kondisi dari realitas sejarah tersebut, radikalisme muncul karena dilatar belakangi oleh berbagai motif. Misalnya oleh motif kepentingan dan konspirasi politik, atau juga karena kesenjangan ekonomi, merebaknya kemiskinan, men-

jamurnya ketidakadilan, dendam politik serta pemahaman yang sempit dan keliru tentang ajaran agama yang diyakininya. Sehingga pada akhirnya seluruh penganut agama dan kalangan agamawan perlu melakukan pendewasaan agama kearah yang lebih humanis dan damai.

8.6 Diskusi

Istilah JIL, sekulerisme, pluralisme, terorisme dan radikalisme agama adalah istilah yang kurang dikenal di khazanah Islam dan kurang populer dalam dunia akademik. Bagaimana sejarah lahirnya istilah itu? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan istilah itu?

BAB 9

STUDI KASUS

Ada beberapa kasus yang bisa dijadikan sebagai pengantar diskusi mahasiswa dalam kesempatan ini dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab atas problem ummat, juga kemampuan menggunakan teori untuk memahami problem tersebut serta solusi yang ditawarkan, antara lain, yaitu: terorisme, radikalisme dan komunisme dalam tinjauan sosiologis; Politik Pondok Modern Gontor;

9.1 Terorisme, Radikalisme dan Komunisme Dalam Tinjauan Sosiologis¹

Selama ini pembicaraan terorisme, radikalisme dan komunisme bisa melebar kemana-mana, bahkan sering

¹ Dipresentasikan oleh penulis dalam Seminar “Waspada Komunis dan Paham Radikal”, BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2016, juga sebelumnya dipresentasikan dalam Seminar Nasional, “*Pendidikan Kebangsaan Dalam Rangka Antisipasi Gerakan Komunisme dan Terorisme*”, LSM Bintang Nusantara Jawa Timur di Hall Hotel Istana Tulungagung, Kamis, 31 Oktober 2013.

diarahkan ke agama atau suatu aliran tertentu. Pada bab ini akan menjelaskan duduk persoalan terorisme, radikalisme dan komunisme secara obyektif dan adil.

9.1.1 Kerangka Berpikir

Jika dilihat dari segi pola gerakannya ada kesamaan antara terorisme, radikalisme dan komunisme, yaitu sama-sama gerakan yang menakutkan. Identik dengan anarkis dan pembunuhan, vandalisme (kegiatan kriminal yang menghancurkan, merusak). Bedanya terorisme dan radikalisme adalah salah satu instrumen/pendekatan yang digunakan oleh gerakan-gerakan yang bersifat ideologis, termasuk ideologi komunisme. Sedangkan komunisme adalah salah satu gerakan ideologi besar di dunia, selain liberalisme, Zionisme, Syi'ah dan sebagainya.

Komunisme mempunyai akar sejarah yang sama dengan liberalisme, yaitu berakar dari ideologi materialisme. Fahaman yang menempatkan MATERI di atas segala-segalanya, termasuk agama sekalipun sebagai sub-ordinate (nomor dua). Liberalisme menyikapi agama secara moderat, yaitu masih bisa menerima kehadiran agama, tetapi sebatas urusan pribadi (sekulerisme moderat). Sedangkan komunisme tidak mentolerir keberadaan dan kehadiran agama sama sekali dalam urusan publik. Karena agama (tentunya termasuk Islam) dalam pandangan komunisme adalah CANDU/RACUN (sekulerisme radikal).

Untuk mencapai gagasan filosofisnya, Marx menawarkan filsafat Materialisme. Yakni materi sajalah menurut Marx yang nyata. Di dalam hidup

kemasyarakatan satu-satunya yang nyata adalah masyarakat yang bekerja. Menurut Marx manusia bekerja, maka dia ada (hidup). Ia membagi masyarakat menjadi dua kelas; yaitu kelas buruh dan kelas borjuis. Gagasan utama Karl Marx adalah memperjuangkan emansipasi kaum buruh, yakni membela kaum proletar tersebut untuk mencapai kesetaraan dengan kaum borju.

Berdasarkan hal itu, Karl Marx menyatakan bahwa manusia tidak boleh dipandang secara abstrak, akan tetapi harus dipandang secara konkrit yaitu dalam hubungannya dengan dunia sekitarnya sebagai makhluk yang bekerja. Hakikat manusia menurutnya adalah bahwa ia adalah makhluk pekerja (*homo laborans, homo faber*). Mengenai agama, pandangan Karl Marx hampir sama dengan pemikiran Feuerbach. Menurutnya, agama adalah hasil proyeksi keinginan manusia. Perasaan dan gagasan keagamaan adalah hasil suatu bentuk masyarakat tertentu. Jika kita membicarakan manusia tidak boleh kita membicarakan sebagai tokoh yang abstrak, yang berada di luar dunia. Manusia berarti dunia manusia, yaitu negara-masyarakat dan masyarakat-negara, hal inilah menurut Marx yang menghasilkan agama.

Marx berkesimpulan bahwa sebelum orang dapat mencapai kebahagiaan yang senyatanya, agama haruslah ditiadakan karena agama menjadi kebahagiaan semu dari orang-orang tertindas. Namun, karena agama adalah produk dari kondisi sosial, maka agama tidak dapat ditiadakan kecuali dengan meniadakan bentuk kondisi sosial tersebut. Marx yakin bahwa agama itu tidak punya masa depan. Agama bukanlah

kecenderungan naluriah manusia yang melekat tetapi merupakan produk dari lingkungan sosial tertentu. Secara jelas, Marx merujuk pada tesis Feuerbach yang ketujuh yakni bahwa sentimen religius itu sendiri adalah suatu produk sosial.

Lebih lanjut, menurut Marx, agama adalah *universal ground of consolation* dan sebagai *candu rakyat*. Dalam pengertian ini, termuat suatu implikasi bahwa apapun hiburan yang dibawa oleh agama bagi mereka yang menderita dan tertindas adalah merupakan suatu hiburan yang semu dan hanya memberi kelegaan sementara. Agama tidak menghasilkan solusi yang nyata dan dalam kenyataannya, justru cenderung merintangangi berbagai solusi nyata dengan membuat penderitaan dan penindasan menjadi dapat ditanggung. Solusi nyata yang dimaksud di sini adalah terkait dengan pengusahaan peningkatan kesejahteraan secara material. Agama ternyata tidak mampu mengarah pada hal tersebut. Dalam hal ini, agama cenderung mengabaikan usaha konkrit manusiawi untuk memperjuangkan taraf hidupnya lewat barang-barang duniawi. Agama mengajarkan orang untuk menerima apa adanya termasuk betapa kecilnya pendapatan yang ia peroleh. Dengan ini semua, secara tidak langsung agama telah membiarkan orang untuk tetap pada kondisi materialnya dan menerima secara pasrah apa yang ia terima walaupun ia tengah mengalami penderitaan secara material. (Harun Hadiwijono, 1980).

Jadi terorisme dan radikalisme secara teoritis seharusnya tidak identik dengan ideologi atau agama tertentu (Frans Magnis Suseno: Jawa Pos, 2002),

dikalangan agama Hindu, dikenal dengan gerakan Bajrangdal, Rashtriya Svayam Sevak (RSS) dan kelompok Sikh di India, agama Budha lahir pada masa dinasti Sungga, ia seorang ortodox yang dikenal dengan kebencian dan penindasannya terhadap para biksu. Agama Kristen muncul pada abad XVI, dengan tokohnya adalah seorang Marthin Luther King yang dianggap sebagai kaum radikal oleh kelompok Katholik. Agama Yahudi pun munculnya radikalisme ketika terjadi pertentangan antara Yahudi orthodox dan Yahudi orthodox ekstrim. Dua kelompok Yahudi tersebut sampai hari ini melakukan penjajahan atas warga Palestina.

Dikalangan Islam, radikalisme ekstrim muncul pertama kalinya pada masa pemerintahan Ustam bin Afan, dalam bentuk gerakan yang dipimpin oleh Abdulah bin Saba' bersama dua ribu pengikutnya yang menghendaki untuk digantinya Usman bin Afan dari kedudukannya sebagai khalifah dengan Ali bin Abi Tholib gerakan Syiah Iran, dan lain-lain. Jadi bukan terkait dengan semata-mata doktrin agamanya (yang diyakini selama ini) yang melahirkan terorisme dan radikalisme, tetapi lebih terkait dengan kemiskinan (faktor ekonomi) dan sejauhmana hubungan antara rakyat dan penguasa (faktor politik).

Daniel Pipes, Ketua Organisasi Perdamaian Amerika Serikat (AS) dan juga anggota Kongres AS, pernah menulis dalam *The National Interest*, Winter 2001, mengenai hubungan radikalisme dalam Islam dengan kemiskinan. Pipes mencatat banyak tokoh Muslim yang berpendapat bahwa Muslim militan dan radikal muncul

karena kemiskinan. Di antara pendapat yang dicatat Pipes adalah pendapat Suleyman Demirel, mantan presiden Turki yang mengatakan, “Selama di dunia ini masih ada kemiskinan, inequality, dan ketidakadilan, maka radikalisme akan terus berkembang di dunia.”

Asumsi bahwa penyebab radikalisme adalah karena kemiskinan juga muncul di kalangan politisi Barat. Mantan Presiden AS Bill Clinton berpendapat, akar gerakan Muslim militan ada pada semakin memburuknya kondisi sosial-ekonomi di masing-masing negara. Martin Indyk, seorang diplomat AS, juga memperingatkan bahwa siapa pun yang ingin mengurangi bahaya Muslim militan harus terlebih dahulu memecahkan masalah ekonomi, sosial dan politik yang menyebabkan gerakan itu menjamur.

9.1.2 Studi Kasus Indonesia

Di Indonesia, para pelaku aksi teror, misalnya pelaku pengeboman di depan Kedubes Australia Kuningan, bisa diasumsikan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sebut saja Ahmad Hasan yang merupakan karyawan PT Pertani Blitar dan Agus Ahmad seorang karyawan PT Sajira di Jakarta. Jejak radikalisme mereka tidak ada. Apalagi, mengaitkan mereka dengan pendidikan militer di Afghanistan maupun Mindano Filipina, tentu tidak berhubungan.

Pelaku bom bunuh diri Bali tahun 2005 lalu juga berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sebut saja dua pelaku di antaranya, yakni Salik yang menjadi pedagang pakaian di Pasar Cikijing Majalengka, Misno yang pernah menjadi kuli bangunan dan sedang

mencari pekerjaan. Dari pemetaan sementara, para pelaku aksi terror berasal dari kantong-kantong wilayah miskin di Banten, Ciamis, Majalengka (Jawa Barat), Semarang, Solo (Jawa Tengah), Ngawi, dan Lamongan (Jawa Timur).

Guru Besar FISIP UGM dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Amien Rais menyatakan, radikalisme yang muncul dalam konflik masyarakat, terutama dalam gerakan keagamaan dan konflik antaragama, tidak lain dipicu pemiskinan ekonomi dan pengangguran yang meluas. "Kondisi ini membuat rakyat putus asa dan mudah sekali diprovokasi," ingatnya. Amien mengakui, permasalahan mendasar munculnya radikalisme ini adalah terbatasnya akses ekonomi dan pendidikan pada kelompok masyarakat, terutama kelompok minoritas. Ia pun menyadari, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum sadar, pemiskinan ekonomi menyebabkan munculnya radikalisme.

Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi menegaskan, sejatinya penyebab lahirnya radikalisme, bukan berasal dari aspek agama tetapi kombinasi dengan masalah politik ekonomi dan sosial. "Ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan juga memicu radikalisme," katanya kepada At-Tanwir. Hasyim menegaskan, kaum radikal di Indonesia yang lebih menginterpretasikan agama secara sempit dengan mengeksploitasi potensi perbedaan ketimbang menilainya sebagai potensi kemanusiaan. "Cara berfikir sempit itu ada di setiap agama," jelasnya. Menurut Hasyim, konflik Arab-Israel yang melebar menjadi konflik Timur Tengah yang tak terselesaikan memperparah kondisi yang ada. Muslim,

kata dia, berhadapan dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat. "Konflik itu berakumulasi terus ditambah," ingatnya.

Fenomena Indonesia menunjukkan ketika Islam, Militer dan Politik bersinergi tidak hanya melahirkan kekuatan politik yang dahsyat, tetapi juga berhasil mewujudkan stabilitas politik yang mantap, misalnya, tumpasnya G30-S/PKI tidak bisa dipisahkan peran dan kontribusi ummat Islam dan militer. Sebagaimana yang terjadi di Ponorogo. Tidak hanya melahirkan kekuatan politik yang dahsyat, tetapi berhasil melahirkan peradaban yang besar sebagaimana yang kita rasakan hari ini, yaitu sinergisitas antara kekuatan politik (Raden Bathoro Katong), kekuatan militer (Selo Aji) dan kekuatan Islam (Ki Ageng Muslim).

Namun sebaliknya ketika munculnya dis-harmonisasi dari ketiga kekuatan tersebut (Islam, militer dan politik), maka mulai saat itulah terjadinya ketegangan, kecurigaan dan konflik. Penulis melihat ketika negara ini dipecah-pecah dengan istilah Ekstrem kanan (Islam) dan Ekstrem kiri (komunis), sebagai konsekuensi masuknya pengaruh zionisme di Indonesia. Semakin parah munculnya istilah Islam konservatif, Islam moderat, Islam radikal, Islam garis keras dan kemudian munculnya terorisme, yang implementasinya banyak merugikan pihak Islam.

Istilah-istilah yang kurang begitu dikenal dalam khazanah Islam dan kurang populer dalam dunia akademik, tetapi lebih dikenal dan identik sebagai suatu gerakan inteljen. Menurut penulis tidak hanya merugikan ummat Islam, tetapi juga pemerintah (ter-

utama kepentingan makro dan jangka panjang). Kerugian pemerintah akan dicap “anti-Islam”, Islamophobia dan sejenisnya. Implikasinya setiap kebijakan dan program senantiasa dicurigai sebagai “pesanan”, sebagai “proyek” dan sejenisnya. Kerugian ummat Islam dalam setiap even serasa dalam posisi sebagai pihak yang “tertuduh”.

9.1.3 Diskusi

Jadi faktor ekonomi dan politik yang melahirkan fenomena radikalisme, komunisme dan sebagainya. Masih relevankan keinginan dari berbagai pihak untuk mengkaji kurikulum pendidikan diberbagai pesantren?

9.2 Politik Pondok Modern Gontor²

Memang tidak mudah memahami kemana arah, aliran atau madzhab politik Pondok Modern Gontor Ponorogo, termasuk sekalipun di kalangan kader, Asatidzah, guru dan Dosen ISID Gontor. Tentunya disebabkan karena memang Pondok Modern Gontor bukan sebagai institusi atau kekuatan politik, tetapi sebagai lembaga pendidikan. Namun, harus diakui bahwa keberadaan dan kiprah serta pengaruhnya melampaui apa yang dimiliki oleh suatu kekuatan politik, baik dari kiprah dan daya tariknya.

² Dipublikasikan Ponorogo Pos No. 362 Tahun VII, 18-24 September 2008

9.2.1 Kerangka Pemikiran

Menurut penulis, setidaknya ada beberapa faktor penyebab, pertama, kiprah KH Abdullah Sukri yang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi, baik di level nasional maupun di level lokal dalam permasalahan keumatan, bangsa dan negara. Beliau tidak hanya aktif dan peduli membangun jaringan Gontor secara nasional, seperti, rencana pendirian seribu Pondok Modern Gontor di Indonesia, tetapi beliau juga aktif mengadakan berbagai pertemuan dengan para pejabat dan berbagai tokoh nasional, bahkan kepedulian terhadap persoalan-persoalan dunia Islam.

Namun, di sisi lain beliau juga tidak lupa dengan persoalan-persoalan lokal, misalnya, kesediaan beliau menjadi Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo, kepedulian Beliau terhadap pendidikan TPA dengan Harsono sebagai Komandan Lapangannya, kemudian berkembang terhadap Paguyuban Kepala Desa dengan Amin, Wakil Bupati dan Kepala Desa Imam Mubasir sebagai motor, Kelompok Warok dengan tokohnya Mbah Jolego (almarhum), termasuk kesedian Beliau berdialog dengan aktivis LSM, para pejabat daerah, baik legislatif dan eksekutif. Menurut catatan penulis hampir semua elemen di Ponorogo pernah berinteraksi dengan beliau kecuali kalangan pengusaha dan para pendekar beladiri.

9.2.2 Legitimasi Politik

Sekalipun dalam berbagai kesempatan KH Abdullah Sukri menyatakan bahwa kiprahnya itu

bukan representasi (mewakili) institusi Pondok Modern Gontor, tetapi lebih sebagai bentuk improvisasi dan kreasi sebagai salah satu Pimpinan Pondok Modern Gontor (PMG). Bagaimanapun kebanyakan orang akan memahami sebagai kebijakan dan program PMG, secara institusional. Yang pasti dengan kiprahnya itu PMG tidak semata-mata berwajah lembaga pendidikan, tetapi menjadi berwajah lain, tergantung yang mengapresiasi. Jika yang mengapresiasi kalangan aktivis LSM, mereka berpendapat bahwa PMG (baca: KH Abdullah Sukri Zarkazy) sedang memainkan peran aktivis LSM, terutama dalam pemberdayaan dan pencerahan masyarakat.

Namun, bagi kalangan politisi mempunyai apresiasi atau penilaian lain, yaitu bahwa PMG (baca: KH Abdullah Sukri Zarkazy) sedang memainkan berbagai agenda politik. Lebih-lebih jika hal ini dikaitkan dengan peta dan konstelasi politik nasional, dimana para Alumni Gontor menempati posisi penting dan strategis, yang bisa kita sebut sebagai faktor kedua, misalnya DR Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR RI, Maftuh Basuni, sebagai Menteri Agama RI, Lukman Hakiem sebagai Wakil DPR RI dan disektor non-pemerintah, Dien Syamsudin sebagai Ketua PP Muhammadiyah, KH Hasyim Muzadi, sebagai Ketua PB NU dan masih banyak lagi alumni Gontor menjadi pejabat di Daerah, baik di legislatif maupun eksekutif.

Maka wajar jika PMG mempunyai daya tarik bagi siapapun, termasuk politisi dan pejabat daerah dan pusat. Rasanya belum lengkap jika mereka belum mendapatkan restu dan dukungan dari PMG. Suatu

hal yang menarik jika dikaitkan PMG dengan Pemkab Ponorogo terkait dengan maraknya para pejabat yang datang ke Ponorogo, baik kalangan tokoh nasional, menteri dan bahkan Presiden di mana secara jumlah dan intensitas seakan telah menenggelamkan Pemkab Ponorogo. Sebelum dan sesudah reformasi hampir semua Presiden pernah berkunjung ke PMG, tidak ke Pemkab Ponorogo, seperti, Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahkan yang terakhir ini sudah sekian kali.

Tidak tanggung-tanggung pada hari Rabu, 10 Ramadhan 1429 H, yang bertepatan pada 10 September 2008 dengan membawa punggowo kabinetnya, antara lain, Menteri Koordinasi Politik dan Hukum Widodo AS, Menteri Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Sri Mulyani, Menko Kesra Abu Rizal Bakrie, Menteri Infokom Muh Nuh, Menteri BUMN Sofian Jalil, Menteri Perhubungan Jayusman, juga juru bicara Presiden Andi Malarangeng, Ketua DPP Demokrat Anas Urbaningrum, Deny, Staf Khusus Korupsi dan masih lagi rombongan lain yang tergabung dalam Majelis Dzikir Nusantara. Suatu hal yang langka dilakukan oleh Presiden SBY untuk sejenis kunjungan di Pesantren dan hal ini mempertegas daya tarik PMG bagi politisi, pejabat dan tokoh nasional. Dengan kata lain, bahwa PMG dipahami sebagai sumber-sumber kekuasaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja secara politis, sekalipun sekali lagi bahwa PMG sebagai lembaga pendidikan.

9.2.3 Diskusi

Pertanyaannya, kemudian apa yang ingin dicapai PMG dalam politik? Ternyata sederhana. Dalam berbagai kesempatan baik saat diskusi dengan pejabat daerah maupun sambutan ketika pejabat Pusat ke Gontor, KH Abdullah Sukri Zarkasy menyatakan bahwa PMG tidak mengharapkan secara materi dari Pemerintah RI, tetapi rasa kenyamanan dan tidak dirusuhi dalam mengemban amanah sebagai lembaga pendidikan yang telah terbukti menghasilkan banyak kader dan mengambil bagian penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Inilah, yang kalau boleh disebut sebagai madzab politik *adiluhung* (*high politics*), yakni jalan atau cara lain (tidak menggunakan jalan konvensional partai politik) untuk mencapai kedudukan penting dalam berbangsa dan bernegara dengan menyumbangkan putra atau kader terbaik Gontor untuk negara RI. Wallahu A'lam

9.3 Politik *Golek Bolo*³

Ada satu hal yang penulis catat dan yang menjadi pegangan dalam mensikapi dinamika politik di Ponorogo (dari tausiyah Bapak KH Sukri dihadapan forum Paguyuban Kepala Desa dan Kelompok INTI serta elemen masyarakat lain di Wisma Gontor tahun lalu), yaitu apa yang dikenal dengan istilah politik *golek bolo*. Yaitu gaya politik yang mengedepankan semangat persahabatan dan kebersamaan.

³ Dipublikasikan Ponorogo Pos No. 200 Tahun IV, hal. 1, 21 - 27 April 2005.

9.3.1 Kerangka Pemikiran

Semangat (politik golek bolo) itulah yang menurut penulis sebagai salah satu kunci keberhasilan yang telah dibangun oleh kekuatan perubahan dan kemajuan Ponorogo, yang terdiri dari PKS, para ulama, Jaringan akademisi dan aktivis, jaringan politisi, PBB, Partai Merdeka, Aliansi dan lain-lain yang tidak mungkin disebut di sini (tetapi mereka mempunyai peranan yang signifikan). Kemudian munculah pasangan H. Moch. Supajar dan H. Mulyanto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Apakah itu sudah dikatakan berhasil? Jawabnya sudah, tetapi masih dalam tahapan konsolidasi kekuatan perubahan dan kemajuan Ponorogo ke depan. Dijawab belum, karena ini masih pada tahap pertempuran tahap pertama, yaitu untuk mendapatkan kendaraan politik. Singkatnya, perjalanan untuk menuju puncak harapan masih jauh dan berliku serta penuh onak dan duri. Kuncinya, sangat tergantung sejauhmana mereka menjaga stamina dan semangat untuk mencari bolo (sekutu). Terlepas semuanya itu, bahwa fenomena ini menarik dalam politik, baik dalam tataran akademik maupun praktis. Jadinya semuanya dikembalikan pada sikap hidup dan pilihan politiknya masing-masing individu yang tergabung dalam kekuatan tersebut. Apakah termasuk bagian masalah (problem maker) atau bagian dari solusi?

9.3.2 Ketidak-jelasan Posisi Masyarakat Dalam Proses Politik

Menurut penulis, ada beberapa catatan terkait dengan fenomena di atas. Pertama, secara akademik bahwa munculnya fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis tidak tegasnya konstitusi atau perundang-undangan dalam memposisikan masyarakat dalam proses politik. Kenyataannya yang terjadi antara kewenangan partai politik dan kewenangan individu (sikap politik) masih kabur. Sehingga ketika dibaca dalam perspektif logika elit juga tidak jelas. Sebaliknya, jika dilihat dalam perspektif logika massa juga tidak jelas. Implikasinya, calon dari parpol besar belum tentu baik. Sebaliknya, calon dari parpol kecil belum tentu tidak baik. Sangat tergantung, aturan, mekanisme, karakteristik elit, karakteristik massa, pendekatan atau strategi dan kekuatan dana.

Kedua, secara praktis politik, menurut penulis ada beberapa input agar kekuatan perubahan dan kemajuan Ponorogo tersebut itu tetap solid dan bisa berhasil dalam pertempuran lanjutan:

1. Secara internal, harus bisa menjaga stamina dan semangat kebersamaan dan persahabatan serta cair, bukan yang ditumbuhkan egoisme, apalagi kepentingan jangka pendek. Jika yang terakhir ini yang dikembangkan dan menjadi pilihan, kita akan dikenang oleh masyarakat dan anak cucu kita sebagai bagian dari persoalan. Naudhubillah min dzalik. Justru dalam kondisi kritis seperti ini yang perlu dikedepankan adalah kesadaran

bahwa kebersamaan dan persahabatan adalah segala-galanya. Kita tidak punya arti apa-apa, tanpa yang lain. Pendekatan permusuhan disamping high-cost (biaya tinggi), juga sangat tidak menguntungkan untuk apapun, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Sebaliknya pendekatan kebersamaan dan persahabatan disamping biaya murah, juga mendatangkan keberkahan dalam politik. Kuncinya, pengorbanan dan tahu posisi dan perannya masing-masing. Wallahu A'lam.

2. Secara eksternal, perlu kiranya menyusun format politik baru siapapun pemimpinnya, (sebagaimana yang pernah disampaikan penulis, baik kepada Bapak R. Tonny Soenarto, Mantan Sekab, Bapak H. Muryanto, Mantan Bupati dan Bapak H. Moch. Supajar, Calon Bupati), yaitu terwujudnya suatu pemerintahan yang tidak memunculkan permasalahan baru, yang bisa membangun kebersamaan dan memegang wewarah leluhur kita, yaitu *MIKUL DHUWUR, MENDHEMJERO*⁴. Sehingga diharapkan pemerintahan ke depan bukan sebagai ancaman, tetapi bisa mengayomi semua elemen masyarakat, termasuk pejabat maupun mantan pejabat. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan tersebut adalah yang harus dilandasi oleh kebersamaan, persahabatan dan mengutamakan persatuan untuk perubahan dan kemajuan Ponorogo ke depan.
3. Terakhir penulis berharap bahwa momentum Pilkada 2005 di Ponorogo ini tidak semata-mata dibawa

⁴ Mengangkat dan memelihara kebaikan dan memutus atau menuti keburukan masa lampau.

kepada persoalan perebutan kekuasaan semata (sekalipun tidak salah), tetapi bisa dimaksimalkan sebagai wahana pendidikan politik dan sebagai wahana perubahan dan kemajuan di Ponorogo ke depan.

9.3.3 Diskusi

Bagaimana seharusnya peranan yang dimainkan oleh Pondok Modern Gontor untuk mensinergiskan kekuatan sosial dan kekuatan politik untuk kebaikan Ponorogo?

9.4 Paguyuban Kepala Desa, Warok Dan Keluarga Besar Pondok Modern Gontor⁵

Menarik itu dicermati silaturrohmi Perkumpulan warok Insan Taqwa Illahi (INTI), Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Ponorogo dan Keluarga Besar Pondok Modern Gontor (PMG) di Wisma Gontor pada hari Senin, 19 Juli 2004. Bagaimana kerangka pemikiran dan implikasi terhadap hubungan PMG sebagai institusi agama dengan berbegara kekuatan sosial-politik di Ponorogo.

9.4.1 Kerangka Pemikiran

Dalam perspektif sejarah Ponorogo bersatunya Raden Bathara Katong, Patih Selo Aji dan Ki Ageng Mirah yang masing-masing mempunyai spesifikasi profesi dan kecenderungan menjadi kekuatan sinergis (saling melengkapi), tidak hanya berhasil me-

⁵ Ponorogo Pos, No. 166 Tahun III, hal. 1, 22 Juli-5 Agustus 2004

wujudkan Ponorogo yang aman dan tentram, juga berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan Ponorogo diperhitungkan baik dalam Kerajaan-Kerajaan Hindu-Budha dan tentunya juga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada abad XV. Setidaknya itulah yang menjadi obsesi silaturrohmi Per-kumpulan warok Insan Taqwa Illahi (INTI), Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Ponorogo dan Keluarga Besar Pondok Modern Gontor di Wisma Gontor pada hari Senin, 19 Juli 2004.

Jika toh memunculkan spekulasi politik adalah sangat wajar. Pertama, dilakukan menjelang pilpres putaran kedua dan pemilihan Bupati Ponorogo. Kedua, dihadiri hampir semua pengurus dan anggota PKD dan INTI, yang dimana pada kurun waktu tertentu kedua kekuatan terakhir ini telah teruji menjadi mesin politik yang relatif efektif oleh kekuatan politik tertentu. Ketiga, dari segi materi di samping mengkritisi kebijakan pembangunan Pemkab Ponorogo, juga mensosialisasikan format dan mekanisme salah satu agenda pilbud Ponorogo ke depan, yaitu berupa pemaparan visi dan misi cabud dihadapan forum tersebut.

9.4.2 PMG Mempunyai Asset Besar

Penulis sendiri yang kebetulan hadir dalam acara tersebut atas undangan Pimpinan Pondok Modern Gontor (PMG) mempunyai beberapa catatan, pertama, dari segi hubungan antara Pimpinan Pondok dengan para warok di Ponorogo itu sudah terjalin lama, misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Almarhum KH Imam Zarkazy, ayahanda KH Abdullah Sukri

Zarkazy, salah satu pimpinan PMG sekarang, dengan Pak Pethil, Pak Ainan, Pak Mardi dan sebagainya, yang semuanya kebetulan di Jetis. Maka sekarang bertemunya KH Abdullah Sukri Zarkazy dengan Pak Jolego (Pak Haji Ghozali), Ketua INTI dan tokoh-tokoh lain, yang tidak hanya berhubungan secara personal-individu, tetapi secara kelembagaan adalah suatu yang wajar, baik dalam tinjauan sejarah maupun untuk kepentingan Ponorogo.

Kedua, silaturrohmi yang dilakukan oleh INTI, PKD dan lain-lain (paguyuban Dalang, yoga, sinden, ilmu kebatinan, dsb) dengan keluarga Pondok Modern Gontor di Wisma Gontor tersebut menurut penulis tidak ada yang dirugikan, tetapi semua pihak diuntungkan, baik dalam kepentingan mikro (sempit) atau makro (luas), juga baik untuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang, terutama untuk masa depan dan kemajuan Ponorogo. Kita ketahui sekalipun PMG baik nama, posisi dan perannya sudah skala nasional dan internasional, masih mempunyai kepedulian yang tinggi bagi kemashlahatan local Ponorogo. Tidak hanya menguntungkan PMG, tetapi juga Pemkab Ponorogo.

PMG yang mempunyai asset besar, baik SDM dan *network* yang luas, bahkan (semoga tidak berlebihan) di mana salah satu peran dalam skala tertentu belum bisa digantikan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di Ponorogo, termasuk Pemkab sekalipun, sudah sewajarnya dan seharusnya membangun komunikasi dan sebagai motor untuk membangun soliditas kekuatan-kekuatan pembangunan Ponorogo untuk masa depan dan kemajuan Ponorogo. Sedangkan dipihak

Pemkab Ponorogo pertemuan di Wisma Gontor itu sebagai momentum sejarah untuk menumbuhkan sikap saling membutuhkan, saling menghargai dan sebaliknya menjauhkan sikap saling curiga, sikap saling meremehkan dan mengabaikan antar komponen masyarakat Ponorogo di mana akhir-akhir ini hampir seluruh potensi tersedot pada pusaran politik praktis.

Keuntungan lain dari pertemuan tersebut bagi INTI, PKD dan Pondok Modern Gontor sebagai wahana untuk saling mengenal, saling memahami dan saling mengisi dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan Pemkab Ponorogo. Dalam kenyataan obyektif di Ponorogo bahwa pusat-pusat perubahan menuju kebaikan dan kemajuan tidak cukup di langgar-langgar, mushola-mushola dan masjid-masjid serta pondok-pondok pesantren, maka pertemuan berbagai komponen penting masyarakat Ponorogo tersebut baik *santri*, *priyayi* dan *wong abangan* (pinjam istilah *Clifford Gertz*) adalah sebagai momentum perubahan paradigma politik yang semula didasarkan oleh kebencian, kelicikan, kekotoran, dendam dan sejenisnya, semoga berubah menjadi paradigma politik yang didasarkan oleh hati nurani.

Catatan ketiga, makna acara tersebut dengan pilpub dan cabub-cabub di Ponorogo tentunya fenomena tersebut perlu menjadi kajian tersendiri. Memang untuk konteks pilpres belum lama ini dengan memunculkan fenomena Jendral TNI (Purn.) SBY dipahami banyak kalangan sebagai kemenangan *perang udara* atas *perang darat*. Sekalipun Jendral TNI (Purn.) SBY sendiri dari angkatan darat. Dalam analisa penulis bahwa pilpres agak berbeda dengan pilpub ke depan, sekalipun ke-

dua-duanya akan dipilih secara langsung.

Jika dalam pengakuan Jendral TNI (Purn) SBY bahwa yang diandalkan dalam pilpres adalah bukan mesin politik, sebagai andalan perang darat. Tetapi untuk konteks di Ponorogo tidak bisa otomatis diterapkan. Pertama, pola komunikasi langsung dan bisik-bisik sebagai konsekuensi masyarakat komunal untuk konteks di Ponorogo nampaknya masih relatif lebih efektif dibanding model komunikasi lainnya, misalnya, jalur media massa (elektronik maupun non-elektronik). Jadi jika ingin menang dalam pertempuran di medan Ponorogo tetap tidak bisa meninggalkan model perang darat, di mana salah satunya mengandalkan mesin politik.

9.4.3 Diskusi

Kesimpulannya, sekalipun banyak dalam evaluasi pada kasus pilpres bahwa mesin politik, seperti, parpol, paguyuban, ormas dan sebagainya mulai tidak efektif. Di samping semakin mandirinya masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dan sebagai konsekuensi kegagalan elit politik dalam mengelola konflik. Tetapi untuk konteks di Ponorogo sekalipun bukan satu-satunya bahwa mesin politik di Ponorogo secara kongkrit INTI, PKD dan Pesantren tidak bisa ditinggalkan begitu saja, apalagi untuk kepentingan yang lebih luas lagi dari sekedar kepentingan politik praktis, yaitu untuk kepentingan masa depan dan kemajuan masyarakat Ponorogo. Wallahu A'lam

9.5 Merasionalisasikan Sistem Pemerintahan Desa: In Memoriam Mbah Jolego dan Pergolakan Kades⁶

Memang tidak ada hubungan antara wafatnya Mbah Jolego atau Imam Al-Ghozali atau Mbah Soimin (30 juni 1942-1 April 2006, 64 tahun) dengan pergolakan Kades akhir-akhir ini. Yang pertama adalah seorang prototype politisi kepolitikan desa. Tidak ada satu even-pun dalam perpolitikan desa yang tidak lepas dari peran Mbah Jolego. Hal ini tidak lepas dari latar belakang beliau sebagai Warok dan mantan Kades (22 tahun) Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo serta terakhir menjadi Ketua Kelompok INTI (Insan Taqwa Illahi), sebagai wadah Warok atau satuan keamanan swasta yang membantu keamanan dan ketertiban Pemkab Ponorogo.

9.5.1 Kerangka Pemikiran

Penulis sendiri mengenal secara langsung dengan Mbah Jolego baru akhir tahun 2003 melalui beberapa even, pertama, ketika Mbah Jolego memberi sambutan pada saat acara Silaturrohim Kelompok INTI dan Paguyuban Kepala Desa se-Ponorogo dengan KH Abdullah Sukri Zarkazy, MA di Wisma Gontor Ponorogo. Kedua, bersama Tim Peneliti LP2BM dan Biro Riset dan Kajian Ilmiah ISID Gontor untuk mewawancarai Mbah Jolego tentang Politik Desa dan Peta Politik Pra Pilkada. Ketiga, kemudian dilanjutkan dengan diskusi-diskusi kecil terkait dengan Pilkada serta obsesi Mbah Jolego, baik terkait dengan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah.

⁶ Dipublikan Ponorogo Pos No. Tahun 246, hal. 1, 06-12 April 2006.

Berdasarkan interaksi penulis dengan Mbah Jolego dengan segala kekurangan, ada beberapa hal yang sempat penulis catat, pertama, Mbah Jolego adalah seorang yang mempunyai pemahaman dan kesadaran politik yang tinggi, terlepas motivasinya. Sebelum metode penelitian menjadi alternatif dalam membaca peta politik, beliau adalah salah satu sosok yang patut didengar dan diperhitungkan pendapatnya. Tidak hanya menjadi nara sumber para Botoh dan Politisi Desa, tapi juga kalangan akademisi. Kedua, dengan caranya sendiri, Mbah Jolego adalah sosok yang mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kemajuan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah satu bentuk adalah mengkawinkan kultur “abangan” dengan kultur “santri”, yang intinya mereka sepakat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan itu perlu dikawal oleh moral atau nilai-nilai luhur.

Ketiga, dalam perjalanan religius telah mendapatkan apa yang beliau cita-citakan. Menurut pengakuan Mbah Jolego (waktu masih sugeng), baik yang dilontarkan pada acara silaturahmi di Wisma Gontor maupun dalam pertemuan-pertemuan khusus katanya dengan bimbingan KH Abdullah Zarkazy beliau telah menemukan jati dirinya. Puncaknya bahwa perasaan “*semende neng murbeng dumadi*” benar-benar telah diraihinya ketika setelah menyempurnakan rukun Islam ke lima (tahun 1987) dan terakhir bukti kecintaannya kepada Islam yaitu dengan memprakasai berdirinya Masjid Sunan Kalijogo di Desa Karanglo Lor dengan biaya yang tidak kecil dari Beliau. Semoga menjadi amal jariyahnya.

9.5.2 Prinsip “*Mikul Dhuwur, Mendhem Jero*”

Maka sudah sewajarnya kalau masyarakat Ponorogo merasa kehilangan salah satu tokoh panutannya. Dengan berpegang prinsip “*mikul dhuwur, mendhem jero*” sudah seharusnya kita melanjutkan cita-cita perjuangan Beliau. Mengambil pelajaran dari perjalanan Beliau yang penuh onak dan duri, baik sisi gelap maupun sisi yang terang. Karena di dalam perjalanan Beliau sebenarnya banyak hal yang perlu digali. Penulis sendiri sebenarnya merasa terlalu singkat dalam berkawan, bergaul dan ingin banyak tambahan waktu untuk “*ngangsu kaweruh*”. Penulis hanya bisa berdo’a semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, khushnul khotimah dan segala darma baktinya kepada masyarakat dan agama ini bisa menghantarkan Beliau untuk mendapatkan rahmat (kasih sayang) dari Allah SWT.

Bersamaan waktu dengan hari berkabungnya Mbah Jolego muncul Pergolakan Kades se-Jawa dan Bali, termasuk Ponorogo yang fenomenal dalam sejarah penyelinggaran Pemerintahan Desa. Ada banyak tuntutan yang diajukan, misalnya, dari persoalan masa jabatan, kompensasi/kesejahteraan, keadilan (dalam kasus Sekdes) dan sebagainya. Jika boleh penulis istilahkan tuntutan mereka (dulur-dulur Kades) adalah keinginan untuk melakukan rasionalisasi Sistem Pemerintahan Desa. Karena masih dalam pemikiran mereka untuk mendapatkan posisi sebagai Kades cukup rumit, berliku-liku dan memakan biaya yang tidak kecil. Apalagi ditambah dengan pekerjaan mereka sehari-hari yang tidak ringan. Namun disisi lain kompensasi mereka (gaji/bengkok) sangat-sangat tidak seimbang.

Bisa saja kita mempertahankan tatanan lama, tapi rasanya sulit untuk menuntut mereka agar bekerja secara maksimal dan professional serta efektif. Maka sudah sewajrnya jika mengharapkan Pemerintahan Desa efektif perlu segera dilakukan rasionalisasi Pemerintahan Desa. Salah satu bentuk rasionalisasinya adalah mensikronkan antara aturan, kelembagaan dan kesejahteraan kades serta kultur politik pedesaan. Maksudnya dalam kasus masa jabatan enam (6) tahun. Tentunya tidak realistis kalau calon kades memikul semua biaya pilkades, juga tentunya perlu dihitung kembali kompensasi (gaji/bengkok) dengan beban tugas mereka.

Juga kesiapan dan kesanggupan masyarakat dalam menerima konsekuensi sistem pilkades pola baru. Juga dalam kasus rencana me-PNS-kan Sekdes sebenarnya cukup ideal yaitu dalam rangka menjaga keberkelanjutan pemerintahan Desa. Atau mencoba untuk memisahkan urusan politik dan urusan birokrasi. Tetapi karena sosialisasinya kurang maksimal menjadi bergeser ke isu politik (baca: ketidakadilan). Sekalipun harus diakui bahwa pergolakan Kades untuk konteks di Ponorogo tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi limbah pilkada dan tidak segera diantisipasi banyaknya (lebih dari 30 persen dari jumlah Kades di Ponorogo) memasuki purna tugas Bisa jadi hal ini juga merupakan salah satu sebab keresahan dulur-dulur Kades.

9.5.3 Diskusi

Alhamdulillah berkat perjuangan panjang dan serius serta tulus dari dulur-dulur Kades segera di-

respon baik oleh Pemerintahan Pusat. Sekarang tergantung bagaimana Pemerintahan Daerah mengimplementasikan, mengawal dan mengamankan kebijakan atau komitmen pemerintahan pusat dengan dulur-dulur Kades. Apakah kita akan terus menerus berkuat pada aturan yang kaku dengan tidak diimbangi dengan pola komunikasi yang hangat, semanak, elegan, suasana yang saling membutuhkan, tidak saling meremehkan? Tentunya berpulang kepada yang berwenang, dalam konteks ini tentunya adalah Bupati Muhadi Suyono. Wallahu A'lam

9.6 Mbah Wo Kucing - (In Memoriam-Tokoh Reyog Ponorogo)⁷

Inalillahi Wainailahi Rojiun. Mbah Wo Kucing, yang mempunyai nama asli Kasni Gunopati telah menghembuskan nafasnya terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono Ponorogo, pada hari Rabu (13/8), jam 15.15 dalam usia 74 tahun dan tentunya meninggalkan banyak kenangan dan catatan bagi keluarga dan secara umum bagi masyarakat Ponorogo serta khususnya bagi komunitas Reyog Ponorogo.

9.6.1 Kerangka Pemikiran

Pertama, Mbah Wo Kucing adalah identik dengan Reyog Ponorogo, sekalipun masih ada nama tokoh lain, seperti, H. Thobron Turejo, Budi Santrijo dan tokoh-tokoh lain, adalah sebagai nara sumber utama/penting untuk mengetahui lahir dan berkembang

⁷ Ponorogo Pos No. 358 Tahun VII, 21-27 Agustus 2008.

Reyog Ponorogo oleh para peneliti dan teman-teman pers. Maka tidak salah jika posisinya berbanding lurus dengan apresiasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap Reyog. Karena apresiasi Pemkab Ponorogo cukup besar, baik dari segi pendanaan dan support yang lain, terutama semenjak Bupati Markum hingga sekarang, Bupati Muhadi. Maka wajar posisi Mbah Wo Kucing menjadi penting.

Kedua, dari dunia kebatinan mempunyai posisi penting, terutama Aliran Kebatinan Purwoayu, yang konon mendapat *kekancing* (Surat Tugas) dari Keraton Surakarta, yang semula sebenarnya diberikan kepada Ki Joko Sutrisno (Ketua Partai Merdeka Ponorogo) yang masih mempunyai hubungan keturunan Yogyakarta dari jalur pengging. Tidak jelas, apa alasannya, sehingga *kekancing* itu akhirnya diserahkan kepada Mbah Wo Kucing. Sehingga tidak salah jika posisi Mbah Wo Kucing bisa disejajarkan dengan Mendiang Mbah Darwi (Babadan) dan Mbah Bikan (Pulung) (Aliran Kebatinan Perjalanan).

Ketiga, terkait dengan aliran politik sebagai tokoh warok di Ponorogo, yaitu aliran politik Negara, yakni akan senantiasa menjadi bagian politik penguasa. Hal ini mempunyai akar sejarah yang panjang, misalnya, pada masa akhir kekuasaan Kerajaan Wengker (Ki Ageng Kutu) ada beberapa tokoh, antarlain, Ki Honggojoyo (Sukasewu/Sukorejo, Ponorogo Barat), Ki Setrajaya (Gunung Loreng, Ponorogo Timur), Warok Suromenggolo, Surohandoko, Ki Surogentho (Gunung Pegat, Ponorogo Selatan), Singokubro, Singobowo, Gunoseco dan Ki Ageng Mirah atau Jaka Waleri.

Ketika masa Raden Bathorokatong semua tokoh tersebut diakomodir (diserap dan dioptimalkan) dalam Pemerintahannya, termasuk anaknya Ki Ageng Kutu, disamping Niken Gandini dijadikan sebagai isteri, anak tertua Ki Ageng Kutu yang bernama Suromenggolo dijadikan Demang Kertosari dan sebagai pengawal pribadi Raden Bathorokatong, juga Suryongalim atau Surohandoko diangkat menjadi Demang Kutu, melanjutkan atau menempati posisi ayahnya, Ki Ageng Kutu sebelumnya. Kecuali dua dua warok yang tidak tunduk, yaitu Warok Surogentho dan Singokrobro yang berada di sekitar bukit Klotok dan tetap menjadi brandal menentang pemerintahan Raden Bathorokatong. Jadi, wajar jika para warok di Ponorogo, ketika masa orde baru menjadi bagian kekuasaan pemerintah dan mendukung Golkar dan tidak terkecuali Mbah Wo Kucing.

9.6.2 Simbol Sisa Kekuatan Kultural Orde Baru

Secara sederhana bisa dipetakan bahwa kekuatan Warok itu menjadi dua keterlibatannya dalam politik, yaitu: Pertama, yang mengambil peran di ranah budaya atau kultural, yaitu dengan munculnya Yayasan Reyog Ponorogo dengan tokohnya Mbah Wo Kucing. Kedua, warok yang mengambil jalur structural, yaitu munculnya INTI, dengan tokohnya Almarhum Mbah Jolego, yang kemudian secara institusional dilanjutkan oleh Paguyuban Desa dan kemudian hari berhasil menghantarkan kader terbaiknya sebagai orang nomor dua di Ponorogo, Amin, Wakil Bupati Ponorogo. Maka hal yang wajar jika keberadaan warok tidak bisa dipisahkan dengan berbagai kepentingan politik di

Ponorogo, sebagaimana kyai dalam konstalasi politik di tlatah Madura.

Jika pada perkembangan kemudian peranan warok semakin menurun atau efektif di lingkungan terbatas karena lebih disebabkan berbagai konsekuensi, pertama, terkait dengan efektivitas peranan warok yang semakin hari semakin menurun dalam mengapresiasi masyarakat yang terus berubah (karena tuntutan demokratisasi (pilihan langsung) dan kecenderungan pragmatisme, maka warok tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya kekuatan perubahan, tetapi menjadi salah satu kekuatan perubahan di Ponorogo sebagaimana yang lain, misalnya, kekuatan akademisi, LSM, Pengusaha atau media massa. Singkatnya, tidak lagi memegang "hak monopoli" di masyarakat. Misalnya, dalam politik masyarakat tidak lagi percaya pada peranan warok semata, tetapi mulai terbagi pada banyak pihak, seperti, pengusaha, akademisi, peneliti dan teman-teman pers.

Kedua, disebabkan masyarakat yang semakin mandiri dan tidak lagi tergantung pada tokoh (baca: warok) karena factor pendidikan dan akses informasi. Konsekuensinya di ranah politik dan budaya yang dulu banyak didominasi oleh warok, kini banyak diperankan oleh tokoh lain, apalagi diranah lain, seperti, dalam pendidikan, pemerintahan dan ekonomi, mulai diperankan oleh para akademisi, aktivis LSM, pengusaha, birokrat, kelompok pendidikan dan teman-teman pers. Bahkan untuk konteks politik pilkada banyak ditentukan oleh kalangan botoh, bukan warok dan juga bukan kyai.

Ketiga, karena konsekuensi kecenderungan masyarakat yang pragmatis-positiv. Artinya, yang dibutuhkan

kan masyarakat sekarang tidak lagi simbol, tetapi isi; tidak lagi mitos, tetapi fungsi dan kontribusi. Bukan lagi dongeng-dongeng, tetapi solusi. Maka dalam konteks masyarakat seperti inilah yang menghantarkan posisi Mbah Wo Kucing diakhir hayatnya hanya efektif di lingkungan terbatas (baca: dunianya), kemudian tergantikan oleh kekuatan dan konsep baru serta dengan tantangan baru. Bagaimanapun Mbah Wo Kucing adalah seorang tokoh yang telah berkarya dan besar dimasanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita sebagai generasi muda tentunya harus berpegang pada prinsip, "*Mikul dhuwur mendhem jero*". Artinya, kita harus melanjutkan prestasi dan kontribusi kebaikan yang telah dibangun oleh Mbah Wo Kucing dengan generasinya di Ponorogo ini dan sebaliknya kita berusaha menutup atau mengubur berbagai kekurangan dan kesalahan masa lalu Mbah Wo Kucing.

Akhirnya, *Kawulo Sekeluarga nderek belosungkowo. Mugio ketampi sedoyo amal ing garsonipun Gusti Ingkang Maringi Urip. Amien*

9.6.3 Diskusi

Jika pada perkembangan kemudian peranan warok semakin menurun atau efektif di lingkungan terbatas karena lebih disebabkan berbagai konsekuensi, pertama, terkait dengan efektivitas peranan warok yang semakin hari semakin menurun dalam mengapresiasi masyarakat yang terus berubah (karena tuntutan demokratisasi (pilihan langsung) dan kecenderungan pragmatisme, maka warok tidak lagi dianggap sebagai

satu-satunya kekuatan perubahan, tetapi menjadi salah satu kekuatan perubahan di Ponorogo sebagaimana yang lain, misalnya, kekuatan akademisi, LSM, Pengusaha atau media massa. Singkatnya, tidak lagi memegang “hak monopoli” di masyarakat. Misalnya, dalam politik masyarakat tidak lagi percaya pada peranan warok semata, tetapi mulai terbagi pada banyak pihak, seperti, pengusaha, akademisi, peneliti dan teman-teman pers. Bagaimana menurut Anda?

9.7 ‘Grebeg Suro’ Telah Keluar Dari Khitohnya?⁸

Terlepas Kontroversi kapan tepatnya Hari Jadi Kota Ponorogo, hampir semua tulisan yang terkait dengan sejarah Ponorogo, baik yang ditulis Moelyadi dalam bukunya *Ungkapan Kerajaan Wengker dan Reyog Ponorogo*, jug, oleh Purwowijono dalam bukunya *Babad Kota Ponorogo dan Citra Rakyat Reyog Ponorogo* maupun oleh tim penyusun buku *Hari Jadi Ponorogo* dalam bukunya *Kabupaten Ponorogo*, mereka sepakat bahwa Hari Jadi Ponorogo itu sangat terkait erat dengan sejarah masuknya Raden Batoro Katong ke Ponorogo.

Dan kehadiran R. Batoro Katong di Ponorogo itu, mengandung dua makna. Makna pertama, adalah keberhasilan R. Batoro Katong menumpas pembelot Ki Demang Suryongalam, atau yang dikenal Ki Ageng Kutu. Makna kedua adalah terbukanya Islam di Ponorogo.

⁸ Dipublikasikan Radar Madiun - Jawa Pos, Sabtu, 01 April 2000.

9.7.1 Ki Demang Suryongalam

Ki Demang Suryongalam, atau Ki Ageng Kutu yang pada Akhir abad XIV menjadi Demang di Kutu (ada yang menyebut Surukubeng), yang juga sebagai bekas Ibukota Kerajaan Wengker, bisa dikatakan sebagai penerus dan pewaris kerajaan Wengker, yang beragama Hindu-Budha. Sebenarnya ia masih kerabat dekat dengan kerajaan Majapahit dan termasuk punggawa yang disayangi. Hanya, kemudian hubungan keduanya mulai retak. Dan klimaksnya akan menyempal dari kerajaan Majapahit, yang pada waktu itu sebagai Raja adalah Prabu Kertobhumi Brawijaya V.

Setidaknya ada beberapa alasan, *Pertama*; terutama berdirinya Kasultanan Demak yang hingga kini, dipahami oleh kalangan luas (baik oleh ummat Islam maupun non Islam) merupakan representasi dari keberadaan dan perkembangan Islam di tanah Jawa. Yang menjadi Sultan adalah Raden Patah, yang juga masih anaknya Prabu Brawijaya V dari isterinya yang dari Cina. Dan juga masih saudara kandung (seayah), tepatnya adalah kakak kandung R. Batoro Katong. *Kedua*; yang lebih menyakitkan lagi bagi Ki Demang Suryongalam, berdirinya Kesultanan Demak itu direstui dan didukung oleh Sang Prabu. *Ketiga*; juga tidak kalah penting adalah juga masih tingginya kecintaan dan keterikatan Ki Ageng Kutu pada ajaran Hindu-Budha. Dan *keempat*; kerena memang kondisi kerajaan Majapahit sudah mulai rapuh.

Dari Latar belakang itulah. amanah 'yang harus diselesaikan oleh R. Batoro Katong. Dan Alhamdulillah

berkat Rahmat Allah SWT dan kecakapannya serta dibantu oleh Panglima Perang Selo Aji dan Penasehat Spiritualnya, Ki Ageng Mirah, tentunya juga dukungan dari yang lain, amanah itu bisa dijalankan secara baik dan memuaskan. Maka tidak berlebihan jika ada yang berpendapat bahwa keberhasilan R. Batoro Katong dalam menjalankan amanah itu identik dengan berakhirnya Kerajaan Wengker di Ponorogo., yang merupakan representasi dari keberadaan agama Hindu BhUda di Ponorogo. Atau dengan kata lain mulai bertahtanya R. Batoro Katong, yang merupakan representasi dari keberadaan dan perkembangan Islam di Ponorogo.

9.7.2 Misi Raden Batoro Katong

Raden Batoro Katong, atau Raden Lembu Kanigoro, yang juga anaknya Prabu Kertobhumi Brawijaya V dari isteri Bagelen, dikenal mempunyai pemahaman yang dalam dan luas serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap agama Islam. Ia mempunyai peranan yang tidak kecil akan keberadaan dan perkembangan Islam di Ponorogo. Sekalipun kita tahu kehadiran R. Batoro Katong ada Ki Ageng Mirah, yang berusaha menyebarkan ajaran Islam. Tetapi penyebaran agama Islam kurang optimal, tidak sebagaimana disaat R. Batoro Katong tampil. Dan terbukti semenjak bertahtanya R. Batoro Katong sebagai Adipati di Ponorogo, agama Islam berkembang pesat. Baik secara personal, kelembagaan dan kultural, yang hingga kini bisa kita lihat dan bisa kita rasakan.

Termasuk nanti berdirinya Pondok Pesantren Setono, kemudian Pondok Pesantren Tegalsari, dan

kemudian Gontor, Ngabar dan masih banyak lagi. Juga munculnya tokoh-tokoh Islam, seperti Ki Ageng Imam Besari, Ronggowarsito, KH. Ahmad Sahal, KH. Zarkasy dan sebagainya. Dan juga berdirinya Ormas dan berbagai lembaga dan yayasan keagamaan (Islam), termasuk ghiroh dan juga gairah ummat terhadap Islam tidak bisa begitu saja dilepaskan dari latar belakang ini.

Ini artinya, *pertama*, bahwa perkembangan Islam itu tidak akan optimal, tanpa dukungan politik (good will) penguasanya. Kedua, hal ini mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu cocok dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dasar dari masyarakat Ponorogo, yang mencintai persamaan derajat. Yang kita tahu, sebelumnya masyarakat Ponorogo terkotak-kotak berdasarkan kasta, yang merupakan perwujudan dari ajaran Hindu-Bhuda. Dan dimana hingga saat ini bekas-bekasnya masih tersisa dalam kehidupan kita.

Sekalipun demikian R. Batoro Katong tidak terus menghabisi semua yang berbau Hindu-Bhuda atau budaya lama. Tetapi dalam beberapa hal ada yang masih dibiarkan, juga tidak dilarang (bukan dipertahankan). Dengan harapan, nantinya semakin tinggi pemahaman dari kesadaran masyarakat terhadap Islam, tradisi yang tidak sejalan atau yang bertentangan dengan ajaran Islam akan dilslamkan. Tetapi ada warisan ajaran Hindu-Bhuda yang “diformat” dengan ajaran Islam. Yang diharapkan, nantinya sebagai sarana penyebaran agama Islam di Ponorogo. Salah satunya REYOG, yang kemudian oleh bupati Markum Singodimedjo diganti dengan REOG (tanpa Y).

9.7.3 Diskusi

Dengan latar belakang inilah, seharusnya siapa saja yang berkuasa atau bertanggungjawab terhadap keberadaan dan masa depan Ponorogo, tidak boleh meninggalkan misi utama yang diemban R. Batoro Katong, sebagai Bapaknya orang Ponorogo. Yaitu *menghidupsuburkan agama Islam dan bersikap bijak serta proporsional terhadap budaya non-Islam atau budaya lama.*

9.8 NU dan Pemberdayaan Potensi Lokal⁹

Salah satu berkah dari otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pusat kepada daerah (Pemkab/Pemkot) untuk melakukan kreasi dan improvisasi seluas-luasnya dalam proses pembangunan di daerah, terutama dalam pemberdayaan potensi lokal. Potensi lokal yang dimaksud di sini antara lain, potensi sumber daya alam (SDA) dan potensi sumber daya manusia (SDM), termasuk memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk menduduki posisi kepemimpinan di daerah tersebut.

Sesuai hasil polling yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat (LP2BM) dan Biro Riset dan Kajian Ilmiah Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor pada tanggal 27-31 Agustus 2004, ketika responden diajukan pertanyaan ekstrem jika ada dua cabup di mana masing-masing

⁹ Dipublikasikan Ponorogo Pos, No. 173 Tahun III, hal. 1, 16-22 September 2004, juga dipresentasikan dalam acara Seminar Kebangsaan Harlah NU ke-81, "NU dan Pemberdayaan Potensi Lokal", PC NU Ponorogo di Aula Sami Lumayan Ponorogo, Sabtu, 11 September 2004.

sama-sama mempunyai pengalaman, profesional dan mempunyai pernihakan kepada rakyat serta komitmen terhadap negara kesatuan RI, tetapi bedanya hanya satu, yaitu, yang satu putra daerah dan yang satu lagi bukan putra daerah?

Dari 52 responden yang terdiri dari berbagai ragam kategori sosial dan yang tersebar di 5 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Ponorogo, sebanyak 41 orang atau 79 persen menjawab memilih putra daerah. Sisanya, 2 orang atau 4 persen memilih bukan putra daerah dan 9 orang atau 17 persen tidak mempersoalkan putra daerah atau bukan. Yang perlu digaris bawahi di sini bukan semata-mata pilihan kepada putra daerah semata, tetapi motif dan alasan mereka, yaitu, *sense of belonging*, tanggung jawab moral dan dalam anggapan mereka tidak mungkin melarikan kekayaan daerah ke luar daerah Ponorogo.

Di mana motif dan alasan tersebut bisa sebagai modal untuk pemberdayaan potensi lain termasuk keinginan untuk mendongkrak prestasi suatu daerah sehingga diakui oleh rakyatnya maupun lembaga-lembaga domestik maupun internasional.

Dan ternyata untuk mewujudkan tujuan tersebut disamping tidak perlu banyak isu pembangunan yang ditangani, tetapi cukup satu atau dua isu pembangunan dan ditangani secara serius. Misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dengan pelayanan publik, Pemkab Indramayu dengan kebijakan dan program pendidikan dan ketahanan pangan, fenomena pembangunan di Pemkab Lamongan dan sebagainya.

9.8.1 Kondisi Pembangunan

Bagaimana dengan kondisi pembangunan di Pemkab Ponorogo? Tanpa mengurangi penghargaan usaha yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo selama ini dan juga tanpa mengurangi apresiasi kepada KUA Sukorejo yang telah mengukir prestasinya dalam pelayanan publik, ada beberapa catatan penulis dari hasil evaluasi LP2BM. pertama, bahwa pembangunan Ponorogo di camping tidak jelas Skala prioritasnya, juga tidak fokus. Kedua, pertimbangan politic dalam proses pembangunan cenderung lebih dominan daripada pertimbangan lain, misalnya, dimensi profesionalisme. Ketiga, jika toh ada kebijakan kurang bertumpu pada institusi, tetapi kepada figur.

Implikasinya, pertama, proses,pembangunan di Pemkab Ponorogo cenderung elitis, atau tidak populis. Kedua, kurang adanya hubungan emosionalistas antara masyarakat dengan proses pembangunan itu sendiri (bedakan, dengan pembangunan masjid). Ketiga, kurang adanya *sense of belonging* masyarakat Ponorogo dengan hasil-hasil pembangunan. Sehingga kurangnya ada rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut, misalnya, dalam pemeliharaan jalan-jalan.

Maka untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan lokal, setidaknya ada beberapa langkah, pertama, membangun kekuatan pembangunan di Ponorogo dengan format dan motivasi serta visi baru. Kedua, kemudian memotret kembali potensi daerah Ponorogo, baik secara subyektif maupun obyektif. Ketiga, tidak malu belajar

atas keberhasilan yang dicapai oleh Pemkab/Pemkot lain (*model oriented* dan mencoba untuk ditransformasikan di Pemkab Ponorogo, tentunya berdasarkan kondisi subyektif dan kondisi obyektifnya.

9.8.2 Peranan dan Kontribusi NU

Bagaimana dengan NU Ponorogo dalam kotalasi pembangunan di Ponorogo? Tentunya yang dimaksud di sini yang dihitung bukan berapa orang NU yang ada dalam struktur pemerintahan di Ponorogo, tetapi seberapa jauh peran dan kontribusi NU, baik sebagai institusi maupun secara individual dalam mewarnai dan mengarahkan proses pembangunan di Ponorogo.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu dipetakan dulu kondisi subyektif dan kondisi obyektif NU. Kondisi subyektif NU dalam konteks ini terkait dengan kondisi internalnya, antara lain, soliditas NU baik secara struktural maupun secara kultural serta kemampuan dalam mengelola konflik, mobilitas vertikal dan mobilitas horisontal para kader NU, terkait dengan pendidikan, ekonomi dan politik. Sedangkan kondisi obyektif dalam konteks ini terkait kondisi eksternalnya, antara lain, terutama kemampuan NU dalam membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang ada di Ponorogo, kesiapan dan kesediaan NU untuk melakukan kompetisi secara sehat dengan kekuatan lain, kemampuan NU untuk menggalang atau mengakomodir potensi eksternal untuk tujuan perjuangan NU.

Secara subyektif, pertama, dari segi solidaritas terutama hubungan antara golongan tua dan golongan

muda perlu dibenahi. Kedua, dari segi mobilitas, terutama dari segi pendidikan dan politik sudah cukup menggembirakan, hanya saja bagaimana ke depan *disetting* tidak menjadi kekuatan personal atau individual, tetapi menjadi kekuatan yang institusional. Sedangkan secara obyektif, dalam proses pembangunan secara umum di Ponorogo masih diperhitungkan secara personal, belum secara institusional. Maka wajar langkah dan tindakan kader NU di posisi strategic kurang sejalan dengan garis atau kebijakan NU secara institusional.

Berdasarkan kondisi subyektif dan kondisi obyektif tersebut, ada beberapa hal yang dicatat oleh penulis, pertama, dalam pilbup, yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Seingat penulis belum pernah ada dalam sejarah kepemimpinan di Pemkab Ponorogo itu dari kader NU, tetapi tidak ada satupun Bupati Ponorogo yang mengabaikan keberadaan NU (terutama dalam dukungan politik, atau minimal dukungan moral). Jadi posisinya dalam Pilbup selama ini sebagai, pemeran figuran, bukan pemeran utama. Oleh karena itu ke depan perlu dipertimbangkan.

Kedua, dalam pendidikan, ekonomi dan sosial serta dalam mewujudkan tertib masyarakat. Jika dilihat dari jumlah lembaga pendidikan yang dikelola Ma'arif, badan usaha yang dikelola PC NU serta keterlibatan GP Anshor juga cukup menggembirakan. Jika seandainya kontribusi NU itu diuangkan dan dibiayai oleh Pemkab, berapa banyak yang harus dianggarkan oleh Pemkab dalam APBDnya? Tentunya banyak dan memang NU tidak mengharapkan imbalan itu. Lebih dari itu ke

depan perlu dipikirkan suatu hal yang spesifik. Tidak sekedar mengcopy. Karena mengcopy itu tidak akan pernah nomor satu.

Ketiga, dalam pemerintahan dan penegakan hukum. Sebagai lembaga-lembaga non-pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan dalam penegakan hukum peran yang dimainkan sifatnya sebatas kontrol. Namun dalam konteks ini peran yang dimainkan NU belum maksimal. Menarik program Dewar Syuriah PC NU, LKPM dan P3M Jakarta belum lama ini (9 Maret 2004) dalam menyelenggarakan forum Bahsul Masail Korupsi di Pondok Ittihadul Ummah Banyudono Ponorogo. Persoalannya, adalah sejauh mana *follow-up* dari acara tersebut?

Kelima, dalam demokratisasi, yakni upaya untuk memperjuangkan peran masyarakat secara aktif dan konstruktif dalam proses politik atau proses pembangunan di Ponorogo. Sebagaimana umumnya masyarakat Ponorogo lainnya sebatas sebagai obyek, kalau toh sebagai subyek posisinya sebatas untuk legitimasi. Sebenarnya ada fenomena menarik strategi pembangunan antara tahun 1998-2000 di mana hampir semua proyek pembangunan menempatkan masyarakat sebagai faktor penting. Termasuk berbagai kebijakan penting, misalnya dalam pendidikan, itu harus melibatkan Komite Sekolah (masyarakat). Namun kemudian hak-hak itu sedikit demi sedikit mulai dicabut kembali oleh elit politik. Kasus Dana Hibah Belanda bisa dijelaskan dalam perspektif ini. Wallahu A'lam.

9.8.3 Diskusi

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan, pertama, NU adalah tidak sekedar asset atau potensi besar. Maka agar menjadi kekuatan yang signifikan (berarti) perlu ada pembenahan-pembenahan, baik dalam tataran motivasi, orientasi, konsepsional, institusional dan operasionalnya. Kedua, untuk penataan potensi NU ke depan tidak hanya berorientasi kepada eksistensi dan aktualisasi diri, tetapi bagaimana NU, terutama para kadernya siap dan mampu kompetisi secara sehat di pasar bebas, tidak mengandalkan “jaminan”. Bagaimana menurut Anda?

9.9 Pasang Surut Hubungan Muhammadiyah (PDM) Dan Pemkab Ponorogo - Suatu Tinjauan Analisis¹⁰

Ada suatu pola pemikiran yang aksiomatik (yang tidak terbantahkan) yang senantiasa dimiliki oleh siapapun yang menjadi Bupati di Pemkab Ponorogo, yaitu harus membangun hubungan yang baik dengan ormas-ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah (baca: PDM) Ponorogo.

9.9.1 Kontribusi dalam Pembangunan

Salah satu alasannya, tanpa bermaksud untuk mengabaikan keberadaan lainnya, misalnya Nandlatul Ulama atau ormas lain, adalah Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan tidak bisa dipandang sebelah mata, jika dilihat dari kontribusinya dalam pemberdayaan

¹⁰ Ponorogo Pos, No.75 Tahun II, hal. 2, 23-29/8-2002.

sosial, ekonomi, pendidikan dan moralitas masyarakat Ponorogo.

Misalnya, dalam bidang ekonomi, ketika Pemkab mengalami situasi yang stagnasi atau bahkan tumpul dalam mengatasi persoalan ekonomi rakyat, hal ini terlihat tidak jelasnya konsep pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan dan keberadaan Badan Milik Pemkab dalam kondisi terpuruk, kasus Perusahaan Gamping di Sampung. Tetapi Muhammadiyah sekalipun tidak dibiayai oleh APED dengan cantiknya memberi tawaran alternatif dalam bentuk swalayan-swalayan dan juga dalam dunia perbankan (terlepas kontraversinya). Di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo, juga sekaligus membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran, atau permasalahan ketenagakerjaan di Pemkab Ponorogo.

Juga dalam bidang pendidikan, sekalipun kurang di back-up atau didukung secara penuh oleh Pemkab, baik tenaga, pemikiran dan dana sebagaimana SDN Mangkujayan atau sekolah Mandiri yang masih dalam angan-angan Pemkab, SD Muhammadiyah I Ponorogo telah menunjukkan prestasinya, tidak hanya diakui oleh masyarakat Ponorogo, tetapi juga tingkat Pemprop Jatim dan daerah-daerah lain. Bukan Drumbandnya, tetapi prestasi akademiknya. Atau dengan kata lain, ketika Pemkab melontarkan konsep sekolah Mandiri dalam tataran wacana, tetapi Muhammadiyah, menjawab dalam tataran praktis. Belum terhitung keberadaan dan peranan TK dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam mencerdaskan masyarakat Ponorogo.

Dan juga perhatian Muhammadiyah terhadap masyarakat bawah atau pinggir, di pinggir-pinggir hiruk pikuk politik, proyek dan keramaian kota, seperti, di Ngebel, Gajah, Ngrayun dan sebagainya telah memberikan santunan baik yang instan, berupa zakat fitrah dan qurban atau dalam bentuk lain, minimal satu tahun dua kali, atau santunan dalam bentuk sarana, seperti, pembangunan Masjid-masjid atau Mushola-Mushola di daerah-daerah terpencil di Ponorogo. Juga keberadaan dan peranan Panti-Panti Asuhan di lingkungan Muhammadiyah dalam mengatasi anak-anak terlantar di Ponorogo, di mana dalam UUD 1945 sebagai tanggung jawab negara. Tetapi, dengan semangat ibadah dan perjuangan Muhammadiyah memberikan perhatian yang khusus.

9.9.2 Pola Hubungan Sinergis

Dengan pemaparan ini penulis tidak bermaksud untuk menkonfrontir atau mengadap-hadapkan Muhammadiyah di satu sisi dan di sisi lain Pemkab Ponorogo. Namun ingin menunjukkan atau mengingatkan kepada Pemkab Ponorogo bahwa keberadaan Muhammadiyah tidak bisa dipandang remeh. Di samping keberadaannya itu lebih awal dari lahirnya Kabupaten Ponorogo (dihitung semenjak Merdeka 1945) dan kontribusinya sangat jelas bagi pembangunan masyarakat Ponorogo. Maka sangat wajar jika pada suatu kesempatan pada awal menjabat sebagai Bupati dalam acara Muhammadiyah di Gedung Bakti, Bupati Markum Singodimendjo dalam perkenalannya mengaku dirinya sebagai kader Muhammadiyah (terlepas

sesungguhnya). Apalagi banyak kader Muhammadiyah kini masuk dalam jajaran elit di Pemkab Ponorogo, apakah dalam dunia pendidikan, politik dan sektor-sektor lain.

Jadi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, tentunya dengan ormas-ormas keagamaan lainnya yaitu membangun kekuatan yang sinergis untuk kepentingan pembangunan di Ponorogo. Tidak sating mencurigai. Jika ada masalah bisa dirembug bersama. Suatu sikap yang absurd (baca: sembrono) jika sikap atau kebijakan itu dilandasi oleh sas-sus, misalnya, keinginan dari warga Muhammadiyah untuk melengserkan Bupati Markum bersamaan dengan lengsernya Dandim (periode 1998-an) dengan cara yang tidak terhormat. Sikap dan kebijakan hendaknya dibangun dengan semangat kebersamaan dan data yang akurat serta komprehensif.

Apalagi banyak persoalan yang dihadapi oleh Pemkab Ponorogo yang perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat, baik kalangan akademisi, LSM, Pondok Pesantren, parpol dan tentunya Ormas keamanan, seperti, Muhammadiyah, disamping persoalan ekonomi, pengangguran, kenakalan remaja, perilaku kekerasan di sebagian masyarakat Ponorogo, KKN, kebobrohan, juga masalah keamanan, yang semakin hari semakin jauh dari panggang api atau jauh dari harapan masyarakat Ponorogo yang aman, nyaman dan tentram.

9.9.3 Diskusi

Berbagai persoalan itu penulis yakin tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh Pemkab Ponorogo. Jadi harus ada formulasi yang tepat antara visi Pemkab Ponorogo

untuk mewujudkan *Gumuyune Wong Cilik* dengan Muhammadiyah sebagai *Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.

9.10 Membedah Sisi Linguistik Kalimat Ahok Soal Al-Maidah 51¹¹

Seorang penulis buku Brili Agung¹² merasa terusik dengan polemik calon gubernur DKI Jakarta pejabat Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan warga DKI telah dibohongi dengan surat Al Maidah ayat 51. Cuplikan pernyataan Ahok tersebut menjadi viral dan telah dilaporkan menghina Agama Islam ke polisi.

“Sebenarnya saya sudah malas untuk membahas hal ini. Namun nurani saya terusik saat pembela Pak Basuki berdalih tidak ada yang salah dengan kalimat Pak Basuki. Salah satu yang membuat saya heran adalah pernyataan Pak Nusron Wahid yang notabnya adalah tokoh NU,” kata Brili memulai tulisannya di blog *briliagung.com* yang diterbitkan pada Jumat (7/10).

9.10.1 Kerangka Pemikiran

Brili mengatakan, karena dirinya bukan ahli agama, maka dia akan membedah pernyataan Ahok tersebut

¹¹ Disalin dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/08/oeq21v-membedah-sisi-linguistik-kalimat-ahok-soal-almaidah-51> dengan berbagai modifikasi.

¹² Brili Agung juga sudah menulis 17 buku seperti *Jangan Bodoh Mencari Jodoh*, *Mencintai Tak Bisa Menunggu*, *Reborn: JBMJ*, *Seni Memantaskan Diri*, *ME*, *Sebuah Novel* berjudul *PETAKA* dan lainnya. Brili juga menjadighost dan co-writer puluhan trainer, pengusaha dan artis nasional.

pada sisi linguistik. “Tulisan ini akan lebih difokuskan untuk membedah sisi linguistik, sisi kaidah bahasa yang beliau gunakan,” katanya dalam tulisan berjudul *Membedah Sisi Linguistik Kalimat Pak Basuki*.

9.10.2 Kajian Brili Agung¹³:

Ini adalah potongan kalimat beliau: *“Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam..”* Sengaja saya fokuskan pada kalimat yang menimbulkan polemik ini...” Saya sudah melihat keseluruhan video, dan memang masalahnya ada pada frasa ini. Terjemahan versi sebagian besar orang: Pak Basuki menistakan surat Al Maidah. Al Maidah 51 dibilang bohong oleh Pak Basuki. Terjemahan versi pembela Pak Basuki: Pak Basuki tidak menistakan Al Maidah 51. Dia menyoroti orang yang membawa surat Al Maidah 51 untuk berbohong.

Mari kita bedah dengan kepala dingin. Jika kita ubah kalimat di atas dengan struktur yang lengkap maka akan menjadi seperti ini: “Anda dibohongin orang pakai surat Al Maidah 51”-Ini adalah kalimat pasif. Anda: Objek. Dibohongin: Predikat. Orang: Subjek. Pakai surat Al Maidah 51: Keterangan Alat.

Dengan struktur kalimat seperti ini, jelas yang disasar dalam kalimat Pak Basuki adalah SUBYEK-nya.

¹³ Brili Agung dikenal sebagai Authormaker dengan visi hid-up “Di tahun 2060, 7 dari 10 penulis di Indonesia ketika ditanya siapa gurunya, mereka akan menjawab Brili Agung.” Brili disebut sudah melanglang buana ke seluruh pelosok Indonesia dan ASIA untuk memberikan training di perusahaan multinasional. Dia juga mencetak puluhan penulis lewat Inspirator Academy. Di sana ia menjadi guru untuk semua yang ingin menginspirasi lewat tulisan.

Yaitu “**orang**”. Dalam hal ini orang yang menggunakan surat Al Maidah 51. Karena Surat Al Maidah 51 di sini hanya sebagai keterangan alat yang sifatnya NETRAL. Saya analogikan dengan struktur kalimat yang sama seperti ini: “Anda dipukul orang pakai penggaris.”

Struktur kalimat di atas sama, yaitu: OPSK. Jenis kalimat pasif. Subyek ada pada orang. Sedangkan penggaris merupakan keterangan alat yang bersifat netral. Di sini menariknya. Penggaris memang bersifat netral. Bisa dipakai menggaris, memukul, dan yang lainnya tergantung predikatnya. Yang menentukan apakah si penggaris ini fungsinya menjadi positif atau negatif adalah predikatnya.

Nah masalahnya adalah apakah Surat Al Maidah 51 bisa digunakan sebagai alat untuk berbohong? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bohong/bo-hong/berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta:

Dan inilah arti dari surat Al Maidah 51 tersebut: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”*

Makna dari surat Al Maidah 51 tersebut sudah sangat jelas. Bukan kalimat bersayap yang bisa dimul-titafsirkan. Tanpa dibacakan oleh orang lain, seseorang yang membaca langsung Surat Al Maidah 51 pun

mampu memahami artinya. Kesimpulan saya, dengan makna sejelas ini surat Al Maidah 51 TIDAK BISA DIJADIKAN ALAT UNTUK BERBOHONG. Jadi ketika Pak Basuki berkata dengan kalimat seperti itu, sudah pasti dia menyakiti Umat Islam karena menempatkan Al Maidah 51 sebagai “keterangan alat” yang didahului oleh predikat bohong. Menempelkan sesuatu yang suci dengan sebuah kata negatif, itulah kesalahannya.

Sebuah logika yang sama dengan kasus seperti ini: Seseorang Ustadz menghimbau jamaahnya: “Jangan makan babi, Allah mengharamkannya dalam Surat Al Maidah ayat 3.” Pedagang babi lalu komplain: “Anda jangan mau dibohongi Ustadz pake Surat Al Maidah Ayat 3.” Atau Seseorang Ustadz menghimbau jamaahnya: “Al Quran mengharamkan khamr dan judi dalam Surat Al Maidah ayat 90.” Bandar judi dan produsen vodka pun protes: “Anda jangan mau dibohongi Ustadz pakai Surat Al Maidah Ayat 90.”

Jika Anda sudah membaca arti Surat Al Maidah Ayat 3 dan 90, mana yang akan Anda percaya? Ustadz yang memberitahu Anda atau Pedagang Babi, Khamr, dan Bandar Judinya? Itu pilihan Anda. Namun sebagai orang yang mengaku Muslim, jika Alquran dan As Sunnah tidak menjadi pegangan utama kita, apakah kita masih layak menyebut diri kita Muslim?

9.10.3 Diskusi

Brili Melanjutkan, selama tinggal di Jakarta, dia mengalami dua periode gubernur, yaitu Fauzi Bowo dan Ahok. Secara kinerja, dia angkat topi terhadap Ahok yang sudah membuat banyak perubahan di kota Jakarta

yang dicintai.

Brili mengandaikan kinerja Ahok seperti makanan yang sangat enak, walaupun tentu saja ini *debatable*. Tapi pembungkus makanan ini sangat kotor. Brili meng-analogikan makanan kesukaannya adalah Mie Ayam. Tapi dia akan menolak memakan mie ayam itu jika dibungkus memakai kulit babi yang busuk. “Namun, saya akan memakan mie ayam tersebut jika dibungkus dengan wadah yang bersih dan halal,” kata dia.

Brili melanjutkan, jika ada dua pilihan untuk masyarakat Jakarta, pertama makanan enak, namun bungkusnya kotor dan haram. Pilihan kedua adalah makanan enak dan bungkusnya bersih dan halal. “Maka saya yakin masyarakat Jakarta ini akan memilih yang kedua. Bagaimana dengan Anda?” tulisnya.

9.11 Ketidakadilan dan Kemiskinan Picu Radikalisme¹⁴

Daniel Pipes, Ketua Organisasi Perdamaian Amerika Serikat (AS) dan juga anggota Kongres AS, pernah menulis dalam *The National Interest*, Winter 2001, mengenai hubungan radikalisme dalam Islam dengan kemiskinan. Pipes mencatat banyak tokoh Muslim yang berpendapat bahwa Muslim militan dan radikal muncul karena kemiskinan. Di antara pendapat yang dicatat Pipes adalah pendapat Suleyman Demirel, mantan presiden Turki yang mengatakan, “Selama di dunia ini masih ada kemiskinan, inequality, dan ketidakadilan, maka radikalisme akan terus berkembang di dunia.”

¹⁴ Dikutip dari <https://teguhtimur.com/2006/03/24/ketidakadilan-dan-kemiskinan-picu-radikalisme/>

9.11.1 Kerangka Pemikiran

Asumsi bahwa penyebab radikalisme adalah karena kemiskinan juga muncul di kalangan politisi Barat. Mantan Presiden AS Bill Clinton berpendapat, akar gerakan Muslim militan ada pada semakin memburuknya kondisi sosial-ekonomi di masing-masing negara. Martin Indyk, seorang diplomat AS, juga memperingatkan bahwa siapa pun yang ingin mengurangi bahaya Muslim militan harus terlebih dahulu memecahkan masalah ekonomi, sosial dan politik yang menyebabkan gerakan itu menjamur.

Di Indonesia, para pelaku aksi teror, misalnya pelaku pengeboman di depan Kedubes Australia Kuningan, bisa diasumsikan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sebut saja Ahmad Hasan yang merupakan karyawan PT Pertani Blitar dan Agus Ahmad seorang karyawan PT Sajira di Jakarta. Jejak radikalisme mereka tidak ada. Apalagi, mengaitkan mereka dengan pendidikan militer di Afghanistan maupun Mindano Filipina, tentu tidak berhubungan.

9.11.2 Kontraversi Picu Radikalisme

Pelaku bom bunuh diri Bali tahun 2005 lalu juga berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sebut saja dua pelaku di antaranya, yakni Salik yang menjadi pedagang pakaian di Pasar Cikijing Majalengka, Misno yang pernah menjadi kuli bangunan dan sedang mencari pekerjaan. Dari pemetaan sementara, para pelaku aksi terror berasal dari kantong-kantong wilayah miskin di Banten, Ciamis, Majalengka (Jawa Barat),

Semarang, Solo (Jawa Tengah), Ngawi, dan Lamongan (Jawa Timur).

Guru Besar FISIP UGM dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Amien Rais menyatakan, radikalisme yang muncul dalam konflik masyarakat, terutama dalam gerakan keagamaan dan konflik antaragama, tidak lain dipicu pemiskinan ekonomi dan pengangguran yang meluas. "Kondisi ini membuat rakyat putus asa dan mudah sekali diprovokasi," ingatnya. Amien mengakui, permasalahan mendasar munculnya radikalisme ini adalah terbatasnya akses ekonomi dan pendidikan pada kelompok masyarakat, terutama kelompok minoritas. Ia pun menyadari, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum sadar, pemiskinan ekonomi menyebabkan munculnya radikalisme.

Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi menegaskan, sejatinya penyebab lahirnya radikalisme, bukan berasal dari aspek agama tetapi kombinasi dengan masalah politik ekonomi dan sosial. "Ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan juga memicu radikalisme," katanya kepada At-Tanwir. Hasyim menegaskan, kaum radikal di Indonesia yang lebih menginterpretasikan agama secara sempit dengan mengeksploitasi potensi perbedaan ketimbang menilainya sebagai potensi kemanusiaan. "Cara berfikir sempit itu ada di setiap agama," jelasnya.

Menurut Hasyim, konflik Arab-Israel yang melebar menjadi konflik Timur Tengah yang tak terselesaikan memperparah kondisi yang ada. Muslim, kata dia, berhadapan dengan kepentingan Israel dan Amerika serikat. "Konflik itu berakumulasi terus ditambah," ingatnya.

KH Nuril Huda, dari lembaga dakwah NU, menambahkan, diperlukan adanya pemahaman kepada faktor-faktor dasar radikalisme dan harus terus dikaji secara mendalam serta tidak berstandar ganda. Di samping itu, kata Nuril, diperlukan sikap yang adil dalam mengelola tatanan dunia ke depan baik bagi Barat maupun Islam untuk membangun peradaban baru. "Cara ini dilakukan karena Islam sebagai agama dakwah wajib disampaikan ajarannya kepada siapapun hanya saja, wajah Islam harus berwujud keadilan, damai, toleran, dan memberi solusi pada problem kemanusiaan. Nilai-nilai itu harus dikedepankan," jelasnya.

Di lain pihak, Ketua Departemen Data dan Informasi MMI Fauzan Al Anshori berpendapat, radikalisme bukan muncul semata-mata faktor kemiskinan. "Radikalisme muncul karena perlakuan diskriminatif, ini tak terjadi hanya di Negara Islam tapi juga non-Muslim, tidak semata faktor ekonomi, tapi akibat melawan hegemoni AS," jelasnya. Contoh terkini, kata Fauzan, adalah aksi anarkis yang dilakukan para pendemo PT Freeport di Jayapura. "Itu bukan dilakukan orang Islam, tapi warga dari berbagai agama yang bereaksi karena ketidakpuasan dengan hegemoni AS," cetusnya. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto juga tidak sependapat jika radikalisme dikaitkan dengan faktor kemiskinan. "Yang jelas mereka yang melakukan teror itu akibat ada infiltrasi dan stigma negatif yang menyusup dalam gerakan Islam. Yang jelas tidak ada hubungan antara kemiskinan dan tindakan radikal yang dilakukan sebagian umat Islam," tegasnya.

9.11.3 Diskusi

Disatu sisi ada yang mengatakan bahwa radikalisme dipicu oleh kemiskinan, tetapi dipihak lain karena faktor perlakuan diskriminatif atau sebagai bentuk perlawanan hegemoni (kesewenang-wenangan) Amerika Serikat. Bagaimana menurut Anda?

9.12 *The Highest Result Of Tolerance Is Respect And Social Relations (Catatan Untuk Ahok)*¹⁵

Bismillahirrahmanirrahim...

Dua hari lalu, sebelum saya menerima penghargaan *Empowering people Award* dari Siemens di Jerman, salah seorang panitia mendatangi saya untuk menanyakan cara bersalaman diatas panggung karena pimpinan mereka adalah seorang wanita. Mereka menghormati ketika tahu saya tidak bersalaman dengan wanita karena tidak ingin bersentuhan dengan yang bukan muhrim saya. Saya cukup menempelkan kedua tangan saya, lalu menyapa mereka tanpa menyentuh tangannya. Mereka mengatur itu diatas panggung agar saya merasakan kenyamanan. Itulah toleransi.

Di perjalanan ke Inggris untuk kunjungan ke 15 perusahaan, pernah saya menaiki pesawat yang tidak menyediakan makanan halal. Setelah saya sampaikan kepada mereka saya hanya bisa makan makanan halal, mereka mencari sebuah mie instan yang memiliki label

¹⁵ Ditulis oleh dr. Gamal di Jakarta, 15 Oktober 2016. dr Gamal adalah alumni FK Universitas Brawijaya, penerima berbagai penghargaan internasional karena bank sampah yang dikelolanya untuk berobat warga miskin, yang disebarakan diberbagai group WA.

halal untuk saya. Itulah toleransi.

Ketika saya harus presentasi di California University yang bersamaan saat shalat Jumat, saya minta panitia menggeser jam presentasi kami, karena saya ingin melaksanakan Salat Jum'at disana. Mereka mengizinkan menggeser waktu presentasi saya. Itulah toleransi.

Ketika makan malam dengan pangeran Charles di Istana Buckingham, mereka mengatur supaya saya mendapatkan makanan untuk vegetarian agar saya merasa nyaman. Itulah toleransi.

9.12.1 Kerangka Pemikiran

Di berbagai pengalaman itu, saya merasakan dan menyimpulkan bahwa bentuk toleransi adalah hormat. Bagi saya "*The highest result of tolerance is respect and social relations*", toleransi itu adalah bentuk penghormatan kita pada perbedaan yang ada. Mulai dari hal yang kecil seperti makanan, cara berpakaian, cara beraktivitas, sampai hal yang besar soal agama, kitab suci, dan prinsip Ketuhanan.

UNESCO dalam publikasinya "*Tolerance: The Threshold of Peace*" menyatakan social relations adalah salah satu indikator dari suksesnya toleransi di sebuah masyarakat. Oleh karenanya hasil dari toleransi adalah kenyamanan individu dan keharmonisan sosial.

Mau tidak mau, pemimpin berperan besar dalam menjaga, membangun, dan menciptakan toleransi yang baik. Tidak boleh pemimpin itu masuk atau memberikan komentar terhadap agama, kitab suci, prinsip Ketuhanan, dan cara beribadah sebuah agama.

Peran pemimpin itu penting sekali dalam toleransi yang kita bangun. Kita rindu pemimpin yang mampu menyejukkan perbedaan kita dalam kesantunan, menciptakan keharmonisan diantara perbedaan dengan sikap saling menghormati dalam cinta kasih. Bukan pemimpin yang tidak mepedulikan perbedaan yang ada, menciptakan ketegangan dengan menghina agama, melecehkan kitab, membatasi cara beribadah.

Seorang pemimpin harus menghormati agama yang berbeda dengan tidak menilai atau mengomentari agama, tidak mengomentari kitab suci, dan tidak mengomentari cara beribadah. Lalu bagaimana keharmonisan bisa hadir jika pernyataan mengarah pada pelecehan atau penghinaan pada kitab suci dan isi kitab suci?

9.12.2 Catatan Untuk Pak Ahok

Teruntuk Pak Ahok, *Before you say something, stop and think how you'd feel if someone said it to you.* Sungguh menyakitkan jika anda merasakan bagaimana yang kami rasakan sebagai umat Islam, kitab yang kami baca tiap hari, kami jadikan pegangan hidup, kami hafalkan, kami baca saat banyak orang tidur, kami pelajari bertahun-tahun, lalu dengan mudahnya anda sebut sebagai alat melakukan kebohongan.

Apakah Pak Ahok pernah menempuh jurusan tafsir hingga merasa berhak menafsirkan Alquran senaknya? Pak Ahok, jangan hina kitab suci saya hanya untuk kepentingan politik Anda! Tidak ada sedikitpun kebohongan dalam Alquran! Hormati Alquran kami ! *"Don't get so tolerant that you tolerate intolerance"*(Bill Maher). Kita tidak boleh mentoleransi sebuah ke-

intoleransian.

Jangan salah mengartikan toleransi, *“Tolerance does not mean tolerating intolerance”*.

Saya sebenarnya tidak suka menuliskan atau memberikan tanggapan soal permasalahan politik, tapi nasehat Ayaan Hirsi Ali bahwa *“Tolerance of intolerance is cowardice* (mentoleransi sebuah intoleransi adalah sikap pengecut)” cukup memantapkan hati saya untuk tidak diam. Gagasan toleransi Ayaan Hirsi Ali itu sama dengan apa yang dikatakan Haji Abdul malik Karim Amrullah atau yang biasa kita kenal dengan Buya Hamka, *“Jika agamamu, nabimu, kitabmu dihina dan engkau diam saja, jelaslah ghiroh telah hilang darimu.... Jika ghiroh telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan. Sebab kehilangan ghiroh sama dengan mati....”*, ya jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Itu jika diam, lalu bagaimana *“jika membela orang yang menghina agamamu?”* Guntur Romli dan Nusron Wahid mungkin bisa membantu saya menjawabnya. *Wallaahua'lam*

9.12.3 Diskusi

UNESCO dalam publikasinya *“Tolerance: The Threshold of Peace”* menyatakan social relations adalah salah satu indikator dari suksesnya toleransi di sebuah masyarakat. Oleh karenanya hasil dari toleransi adalah kenyamanan individu dan keharmonisan sosial. Bagaimana menurut Anda implementasinya di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syamsuddin, 1997. *Agama dan Masyarakat* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet.)
- Abdullah, Taufik, 1982. Tesis Weber dan Islam di Indonesia (ed) dalam "*Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Al-Attas, Muhammad Naquib, 1995. *Prolegomena To The Metaphysic of Islam, Islam: The Conscept of Religion The Foundation of Ethichcs and Morality*, International Institute of Islamic Thought and Civillization (ISTAC), Kuala Lumpur.
- Andersen, Heine dan Lars Bo Kasperen., 2000. *Classical and Modern Social Theory*, Massachusetts-USA: Penerbit Blackwell Publishers Inc
- Beilharz, Peter, 2003. *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filsof Terkemuka*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Brubaker, Rogers, 1984. *The Limits of Rationality: An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber*. London: George Allen and Unwin.
- Calhoun, C, 2002. *Classical Sociological Theory* (ed). Massachusetts: Blackwell Published Ltd.

- Connolly (ed.), 2002. *Approach to the Study of Religion*, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul, *Aneka Pendekatan Agama*, terj, Imam Khoiri (Yogyakarta: LKIS)
- Dea, Thomas F O, 1992. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Dirdjosisworo, Soedjono., 1996. *Esensi Moralitas dalam Sosiologisme*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Durkheim, Emile, 1947. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press.
- Durkheim, Emile., 1991. *Sosiologi dan Filsafat*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- _____, 1964. *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press.
- Lacboix, Bernard., 2005, *Sosiologi Politik Durkheim*, Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- Fahmy Zarkasyi, Hamid, 2009. *Liberalisasi Pemikiran Islam, Barat Modern*, P: 6, CIOS (Centre for Islamic and Occidental Studies), ISID Gontor.
- Fahmy Zarkasyi, Hamid, 2007. *Pandangan Hidup Islam (Sebagai Framework Studi Islam)*, P: 3, berbentuk Makalah yang disampaikan dalam Kuliyah Peradaban Islam sesi ke III, kerjasama Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 3 Juni.
- Farid Ahmad, Ilyas Ba-Yunus, 1996. *Sosiologi Islam: Sebuah Pendekatan*, terj. Hamid Ba-Syaib (Bandung: Mizan)
- Gerth, H. & C. W. Mills, 1958. *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.

- Gurney, Patrick J, 1981. "Historical Origins of Ideological Denial: The Case of Marx in American Sociology". *American Sociologist* 16: 196-201.
- Halevy Eva Etzioni (1964). *Social Change: Source, Pattern, and Consequences* (ed). New York: Basic Books Inc. Publishers.
- Hendropuspito, 1983. *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, cet. 22)
- Johnson, Doyle P diterj. Robert M. Z. Lawang, 1990. *Teori Sosiologi Klasik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Johnson, Doyle. P, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjemahan Robert M. Z. Lawang dari judul asli "*Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*" (John Wiley & Sons Inc.). Jakarta: Penerbit P. T. Gramedia.
- L. Pals, Daniel, , 2005. *Dekontruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama*, (terj) Seven Theory of Religion, P: 52, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Lawang, Robet MZ, 1999. *Pengantar Sosiologi*, (ttp: Universitas Terbuka)
- Marx, Karl, 1891. *Capital*, Vol. 2. New York: Vintage Books.
- Muhni, Drujetna A. Imam., 1994. *Moral dan Religi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Naszir, Nasrullah, 2008. *Teori-Teori Sosiologi*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Polak, Maijor, 1991. *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve)

- Ritzer, G. & Goodman, D. J, 2003. *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan dari judul asli “*Modern Sociological Theory*” (McGraw-Hill). Jakarta: Kencana-Prenada Media.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J, 1997. *Teori Sosiologi Modern*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim, Agus (2002). *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sandersson, Steven K., 1995. *Sosiologi Makro*, terj. Hotman M. Siahaan (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Scharf, Betty R., 2004. *The Sociological Studi of Religion*. Terj. *Sosiologi Agam* (Jakarta: Kencana, cet. 1)
- Shadilly, Hasan, 1983. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, Cet 3).
- Smith, Huston (2001). *Agama-Agama Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjon. 1982. *Teori Sosiologi: Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syani, Abdul, 1999. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Lampung: Pustaka Jaya, 1995) hlm. 2, Tim MGMP, Sosiologi SUMUT, *Sosisologi* (Medan: Kurnia)
- Thayib, Anshari dkk. 1997. *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK).
- Turner, Bryan S, 1982. *Islam, Kapitalisme, dan Tesis Weber*, dalam Taufik Abdullah (ed) *Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Weber, Max, 1951. *The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism*. Glencoe III: Free Press.

- _____, 1958a. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribner's Sons.
- _____, 1958b. *The Religion of China: Confucianism and Taoism*. Glencoe III: Free Press.
- Worsley, Peter, 2002. *Marx and Marxian*. London & New York: Routledge.

SEKILAS PENULIS



Muh Fajar Pramono. Lahir di Ponorogo, 19 April 1966. Alamat rumah: Jl. Gabah Sinawur 30-D Cokromenggalan. Menikah dengan Binti Maesaroh Abdullah Mukti (1988) yang telah melahirkan dan mendidik anak-anaknya Mahshunah dan Alhamdulillah sudah berkeluarga dengan Madha, yang telah memberikan seorang cucu, Mafaza (1 tahun), juga Rumaisha, Salman, Fatih dan Mutiara.

Setelah lulus SMA Muhammadiyah I Ponorogo melanjutkan Program Studi Ilmu Politik FISIP Unair Surabaya (lulus tahun 1990), dengan judul skripsi, “Ekstremitas Keagamaan dan Afiliasi Politiknya – Studi Kasus Gerakan Islam Jama’ah di Indonesia” dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian melanjutkan Program Studi Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) – Pemerintahan Program Pasca Sarjana Unair Surabaya (lulus tahun 2004) dengan judul tesis, “Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Inisiatif Kepemimpinan di Pemkab Sidoarjo”, dengan pendekatan kuantitatif. Pada tahun 2015 menyelesaikan

program doktornya di Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta dengan program studi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan dengan judul disertasi-nya, "Penataan dan Pembinaan PKL Dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Surakarta", dengan pendekatan mix-method.

Di samping aktif sebagai nara sumber dalam acara diskusi, seminar dan pelatihan, juga aktif menulis masalah agama, keluarga, politik dan pemerintahan daerah diberbagai media lokal maupun nasional. Juga sebagai Dosen pada program studi Studi Agama-Agama (yang sebelumnya dikenal dengan program studi Perbandingan Agama), juga mendapat amanah sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UNIDA Gontor.

Adapun karya tulis dalam bentuk buku, antara lain: 1) *Raden Bathoro Katong Bapak-e Wong Ponorogo* diterbitkan oleh LP2BM Ponorogo, September 2006, Cet. I. ISBN: 979994029-X; 2) *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah – Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000-2012* diterbitkan oleh Adicitra Cemerlang Solo, Juli 2013, Cet. I. ISBN: 978-602-17720-5-8; 3) sebagai salah satu penulis dalam buku yang berjudul, *Membaca dan Menggagas NU ke Depan Senerai Pemikiran Orang Muda NU* diterbitkan oleh Tera Kata Yogyakarta, Februari 2015, Cet I, ISBN: 978-602-99494-6-9.